

# BULETIN

## UNCAK KAPUAS

# 2017

JANUARI - APRIL



E D I S I



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU

# 1

# TIM BULETIN UNCAK KAPUAS

## PENGARAH I

A.M. NASIR, S.H.  
(BUPATI KAPUAS HULU)

## PENGARAH II

ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.  
(WAKIL BUPATI KAPUAS HULU)

## PENANGGUNG JAWAB

Ir. H. Muhammad Sukri  
(SEKRETARIS DAERAH KAPUAS HULU)

## KETUA

H. Sarbani, S.E., M.A.P

## WAKIL KETUA

Drs. D. WILLIAM, M.Si

## SEKRETARIS

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si

## PIMPINAN REDAKSI

ALLUKMANUL HAKIM, S.STP., M.Eng

## WAKIL REDAKSI

ABANG SUANDAR

## SEKRETARIS REDAKSI

BUDI ARNANDO, S.Kom, M.M.

## PENYUNTING

M. YAMIN

## DESAIN GRAFIS

SUTIK, S.T.

## REDAKTUR PELAKSANA

EDUARDUS ERICKS, S.T.

## REDAKTUR PELAKSANA

ROSMADIAH ELVIANI, S.T.

## FOTOGRAFER

LULY IFTAKHUL IMAN, A.Md.

## KORESPONDEN

YOHANES SANTOSO, A.Md  
MAKARIA ASFINA RATU, S.S  
DEDEK SILAWATI MULYANA  
LEDRIYANA PENARANG  
GITA MUHARNI RISHAWATI  
APRILIA SRI REJEKI

di Terbitkan Oleh :





# PENGANTAR REDAKSI BULETIN UNCAK KAPUAS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat monumental bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik (Diskominfo Statistik) Kabupaten Kapuas Hulu, karena pada tahun ini Diskominfo Statistik telah berdiri sendiri menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kami berharap, dengan berdirinya Kominfo sebagai lembaga tersendiri, membuat Diskominfo Statistik menjadi lebih mandiri dan dapat berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyebarluasan informasi, penyerapan serta pengelolaan opini publik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016. Oleh karena itu, Buletin Uncak Kapuas yang kami hadirkan kembali pada tahun ini akan memuat sebuah kolom berita baru yakni “liputan OPD” , dimana setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dilibatkan untuk turut serta memberikan informasi terkait perkembangan program/kegiatan yang dilakukan oleh masing masing instansi. Tujuan dari penambahan kolom berita ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada pembaca/masyarakat agar mengetahui peran, kontribusi dan progress kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada kurun waktu tertentu. Selain itu, dapat pula menjadi bahan evaluasi pimpinan daerah atas kinerja unit kerja pemerintah kabupaten yang menjadi naungannya.

Dalam proses awal penerbitan kolom berita baru ini, masih banyak sekali kekurangan dan menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk penerbitan buletin edisi selanjutnya. Kami selaku pengelola Buletin Uncak Kapuas mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buletin sehingga menjadi media yang informatif bagi masyarakat Kapuas Hulu. Kami berharap, pada proses penerbitan edisi selanjutnya akan lebih banyak lagi dukungan dari berbagai pihak khususnya kontribusi berita dan informasi dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, April 2017

Plt. KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**H. SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003





## BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU KUNJUNGI MASYARAKAT DESA NANGA NUAR

Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, SH dan Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, SH beserta sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu mengunjungi Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Sabtu (28/1). Dua pucuk pimpinan Kapuas Hulu tersebut sengaja datang ke desa Nanga Nuar untuk bertemu langsung dengan masyarakat. “Ini menjadi catatan kita bersama. Ini bukti kami cinta masyarakat Kapuas Hulu, semua hadir, ada Wakil Bupati beserta istri, ketua DPRD Kapuas Hulu dan rombongan,” buka Bupati Kapuas Hulu.

Pada kesempatan itu, Bupati dan Wabup turut menyaksikan final turnamen sepak bola antara Nanga Nuar FC vs Rantau Badai FC. Dalam penutupan kompetisi sepak bola tersebut, Bupati Kapuas Hulu AM. Nasir berpesan kepada kedua tim yang bertanding di final mengedepankan sportifitas. Kemudian para penonton dihimbaunya agar tetap menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung, sehingga semua bisa menikmati pertandingan dengan baik. “Tunjukan pertandingan bagus dan menghibur, karna ini ajang bergengsi. Tunjukan pertasi yang baik, bukan semata-mata mengejar hadiah,” ucapnya.

Pada acara final pertandingan sepak bola tersebut, Bupati turut memberikan bantuan kepada ketua panitia kegiatan. Turnamen sepak bola di Desa Nanga Nuar dimulai sejak 24 Desember 2016 dan berakhir 28 Januari 2017.

Dengan jumlah peserta 67 klub yang terdiri dari Kecamatan Silat Hulu, Silat Hilir, Hulu Gurung, Boyan Tanjung, Pengkadan, Semitau, Seberuang, partisipasi kabupaten 13 klub. Total hadiah untuk juara 1 sebesar Rp13 juta, dengan sumber dana Pemda Kapuas Hulu dan pihak swasta dengan total dana untuk kegiatan sebesar Rp 86.626.000. (Dok. KIP)

**“ INI MENJADI CATATAN  
KITA BERSAMA. INI BUKTI  
KAMI CINTA MASYARAKAT  
KAPUAS HULU,  
SEMUA HADIR, ADA  
WAKIL BUPATI BESERTA  
ISTRI, KETUA DPRD  
KAPUAS HULU DAN  
ROMBONGAN”**



## BUPATI RESMIKAN GEDUNG DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR YANG BARU

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu kini telah memiliki gedung baru di desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara. Gedung senilai 18 Milyar tersebut diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, SH Senin (30/1) siang.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, SH mengatakan, gedung Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tersebut baru bisa digunakan karena ada beberapa pertimbangan. Mulai dari ketiadaan sarana listrik, hingga belum adanya lingkungan pemerintahan yang aktif. "Namun karena sudah masuk instalasi listrik, jajaran Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu memutuskan untuk menggunakan gedung tersebut walau fasilitas dan sarananya juga belum lengkap. Disisi lain, penempatan gedung tersebut adalah upaya untuk menjaga aset pemerintah yang sudah dibangun. Sehingga tidak dirusak oleh oknum tertentu. "Gedung ini jangan seperti gedung yang disebelah yang rusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Aset ini harus dijaga jadi perlu ditempati,"

Menurut Bupati Kapuas Hulu, Gedung Dinas PU sudah representatif untuk digunakan. Fasilitas sudah cukup memadai. "Gedung ini juga megah dari pada kantor yang lama dan juga SKPD yang lain,".

Dengan sarana yang sudah memadai tersebut, Bupati berharap motifasi dan semangat kerja para ASN Dinas PU semakin tinggi, sebab suasana sudah baru dan lebih nyaman. "Disisi lain saya minta jajaran Dinas PU yang ada disini juga turut menjaga aset pemerintah di sekitar gedung ini.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu, Ana Mariana, ST.MM mengatakan, bangunan yang ditempati pihaknya adalah bangunan yang mulai dikerjakan dari tahun 2009 dan selesai di tahun 2013 pembangunannya. Pendirian gedung Dinas PU yang ada di Jl. Lingkar Mupa Transmigrasi, di desa Pala Pulau ini menelan dana Rp18 milyar. "Nama jalan itu mungkin bisa berubah nantinya, karena ada usulan dari Bupati untuk ganti nama jalannya jadi jalan perjuangan,"



Terkait semangat kerja, Kata Ana Mariana, ST.MM, pihaknya tidak semata bergantung pada gedung yang megah. Ana Mariana, ST.MM menegaskan di kantornya kurang lebih ada 100 lebih pegawai ASN dan kontrak daerah, dan keseluruhan pegawai tersebut akan berusaha bekerja optimal apa pun keadaan sarana-prasarana perkantornya. "Kalau masalah kinerja kami di PU tetap bertekad meningkat kinerja sesuai bidang kerja kami, khususnya bidang infrastruktur. Kami tidak perhatikan kantor itu megah atau tidak, tapi kami bersyukur sekarang ini gedung sudah lebih bagus," terangnya.

Lebih lanjut, Ana Mariana, ST.MM menegaskan pihaknya akan melengkapi fasilitas perkantoran yang masih kurang, mulai dari fasilitas garasi pagar hingga laboratorium untuk uji konstruksi. "Kalau untuk jalan didepan kantor ini memang belum diprioritaskan, mungkin tahun depan baru kita anggar,"

Dalam peresmian gedung Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu ini, selain Bupati Kapuas Hulu juga di hadirinya pula jajaran Forkompinda Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah, S.Pd beserta anggota DPRD Kapuas Hulu, berikut para kepala serta perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. (Dok. KIP)

**"DISISI LAIN SAYA MINTA JAJARAN DINAS PU YANG ADA DISINI JUGA  
TURUT MENJAGA ASET PEMERINTAH DI SEKITAR GEDUNG INI"**

## BUPATI KAPUAS HULU, PANEN RAYA PERDANA GUNAKAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, S.H melakukan panen raya ikan dan padi (Mina Padi) bersama Kelompok Tani Harapan Baru, desa Sungai Besar, kecamatan Bunut Hulu, Kamis (02/02) pagi. Dalam panen padi kali ini, agak berbeda dari kegiatan Bupati Kapuas Hulu sebelumnya. Apabila dahulu Bupati panen perdana menggunakan alat sajam, sekarang menggunakan alat mesin pertanian (alsintan). "Ini bukan kali pertama kita melakukan pemanenan disini, cuma bedanya dulu kita menggunakan alat manual sementara sekarang menggunakan bantuan tenaga mesin," ungkap Bupati Kapuas Hulu, disela kegiatan panen.

Perkembangan teknologi saat ini memang semakin pesat, termasuk pada sektor pertanian. Adanya peralatan teknologi yang canggih ini tentu dapat mempermudah dan mempercepat kerja para petani. "Adanya mesin pemanenan ini diharapkan semakin meningkatkan semangat petani dan meningkatkan juga produktifitas pertanian masyarakat kita,".

Tak Lupa, Bupati Kapuas Hulu menghimbau agar petani di Kapuas Hulu harus tekun, cintai pekerjaan, disiplin, jujur dan berkomitmen. Bahkan akan lebih baik apabila bukan hanya mengembangkan pertanian saja, tetapi juga bidang lainnya. "Petani bisa memelihara ikan disekitar lokasi persawahan, agar kebutuhan para petani sehari-harinya terpenuhi," tuturnya.

Menurut Bupati Kapuas Hulu, Pemerintah Pusat sangat berkomitmen dan konsisten membangun sektor pertanian. Pemerintah menargetkan 2045 mendatang Kapuas Hulu menjadi lumbung beras. "Dari itu kita bersama-sama harus semangat mewujudkannya," pesan Bupati Kapuas Hulu.

Sementara itu, Camat Bunut Hulu Sopuan, SE menegaskan bahwa masyarakat petani di kecamatan Bunut Hulu senantiasa komitmen dalam mendukung program Pemerintah Pusat, khususnya dibidang pengembangan pertanian. Hal tersebut dibuktikan pula dengan adanya panen perdana ini. "Kami juga telah membuktikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah telah dimanfaatkan dan membuahkan hasil,". Saat ini para petani di kecamatannya

terus bersemangat. Apalagi ada dukungan dari prajurit TNI-AD dalam pembukaan lahan. Oleh sebab itu Camat Bunut Hulu mengharapkan pembukaan lahan oleh TNI dan Dinas Pertanian bisa terus dilanjutkan. "Kalau semua mendukung saya optimis kedepan Kecamatan Bunut Hulu akan mampu memproduksi padi dalam jumlah yang besar, walaupun belum sebanyak yang di pulau Jawa," tutupnya. (Dok. KIP)



**“ADANYA MESIN  
PEMANENAN INI  
DIHARAPKAN SEMAKIN  
MENINGKATKAN SEMANGAT  
PETANI DAN  
MENINGKATKAN JUGA  
PRODUKTIFITAS PERTANIAN  
MASYARAKAT KITA”**



## WAKIL BUPATI KAPUAS HULU HADIRI PELEPASAN MGR. AGUSTINUS AGUS

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH menghadiri acara ramah tamah dan pelepasan Uskup Sintang, Mgr. Agustinus Agus dengan masyarakat Kapuas Hulu di gereja lama Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau, Minggu (26/2), Pukul 10.00 wib. Mgr. Agustinus Agus, sejak tahun 2016 lalu telah ditunjuk menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Pontinak. Untuk posisi Ukup Sintang (mewadahi Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi) sendiri, akan dijabat Mgr. Samuel Oton Sidin, yang rencananya ditabiskan pada 22 Maret mendatang, di Sintang.

Dalam acara pelepasannya, Mgr. Agus mengatakan, tokoh agama katolik harus dapat menyatu dengan pemerintah dan tokoh-tokoh agama lainnya. Hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, sebab masing-masing ada perannya. “Saya sampaikan pada uskup yang baru supaya hubungan itu diteruskan, karena bagi saya pribadi ini dirasakan sangat penting,” ungkapnya.

Sebagai tokoh agama, tentu tidak punya arti kalau tidak didukung masyarakat, tokoh masyarakat dan umat yang lain. Sebab tokoh katolik ini bukan hidup pada orang katolik saja tetapi juga hidup dalam kebhinekaan. “Saya bahagia dan bangga selama ini saya lihat tidak ada gesekan-gesekan yang berarti yang sungguh-sungguh membuat keresahan dalam bermasyarakat,” ucapnya.

Kepada Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH beserta jajarannya, Mgr. Agus mengharapkan kerjasama yang baik selama ini dapat diteruskan. Kepada tokoh agama lain, Agus juga mengajak untuk terus membangun keharmonisan antar umat beragama. “Mari kita jaga kerukunan umat beragama dengan baik, sebab akhir-akhir ada gesek-gesek toleransi dan sebagainya. Saya berharap umat bijak dalam menanggapi ini, demikian juga sebaiknya para tokoh agama beri pandangan yang bijak, agar wujud kebhinekaan kita bisa lebih indah,”.

Tak luput, Mgr. Agustinus Agus mengajak umat katolik untuk mendukung Uskup Sintang yang baru, yang rencananya akan ditabiskan pada tanggal 22 Maret 2017, jam 9 pagi di stadion sepakbola Banning, Kabupaten Sintang. Sebelumnya, pada jam 5 pagi ada upacara pemberkasan kitab kukuh di paroki Sungai Durian. “Rencananya akan dihadiri 20 uskup dari 27 uskup yang ada di Indonesia dan bahkan

duta besar vatikan Indonesia. Saya himbau umat katolik memeriahkan acara tersebut sebagai wujud dukungan,” ucap pria yang sudah mengabdikan 20 tahun sebagai Uskup Sintang ini. Sehubungan dengan pelepasan uskup sintang yang lama, Wakil Bupati, Antonius L Ain Pamero mengatakan, dirinya sangat mendukung karya Mgr. Agus di tengah-tengah keanekaragaman budaya dalam keuskupan Sintang. “Tentu banyak pengalaman yang baik selama ini,” ucapnya.

Memperhatikan perkembangan Umat Katolik di Bumi Uncak Kapuas, banyak perkembangan kearah yang baik, ada banyak karya dari paroki-paroki yang ada. “Kita tahu ada lagu lagu daerah yang dipadukan dengan nuansa rohani, seperti Dayak Kendayan. Ini sangat baik,” tutur Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Kepada umat katolik, Wakil Bupati Kapuas Hulu juga mengajak, untuk memberi dukungan doa kepada uskup yang baru, supaya mampu memimpin umat di keuskupan Sintang. “Demikian dukungan umat, tentu sangat dibutuhkan dalam pembangunan rohani di setiap daerah, termasuk Kapuas Hulu,” tutup Wakil Bupati Kapuas Hulu. **(Dok. KIP)**



**“SAYA BAHAGIA DAN BANGGA SELAMA INI SAYA LIHAT TIDAK ADA GESEKAN-GESEKAN YANG BERARTI YANG SINGGUH-SINGH MEMBUAT KERESAHAN DALAM BERMASYARAKAT,”**



Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Rudi Hartono menandatangani kesepakatan kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (7/3). Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Sugiono SH.MM., Asisten Kejati, Suoriyanto, SH MH., Koordinator Kejati Kalbar, Basuki SH.MH.

Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat ke Kapuas Hulu merupakan kunjungan perdana, setelah dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, belum lama ini. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kejaksaan Negeri Putussibau berkaitan dengan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Acara penandatanganan MoU tersebut dibaringi dengan sosialisasi tim p4d (pengawal dan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sugiono SH.MM mengatakan, mou bidang perdata dan tata usaha negara ini hendaknya dimanfaatkan oleh SKPD yang ada di Kapuas Hulu. Dari mou itu sendiri, akan ada pengacara negara yang dipersiapkan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. "Ini sangat membantu sekali, apalagi non-fee (tanpa imbalan). Kalau gunakan pengacara umum, Pemda tentu harus ada kontrak dengan dana tertentu."

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sugiono SH.MM mengharapkan, dengan adanya bantuan hukum dari kejaksaan ini bisa membantu pemerintahan. "Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tertentu, dari Sekda Kapuas Hulu bisa meminta pertimbangan hukum dari kejaksaan, sehingga bisa membentengi dari permasalahan kedepannya," Sementara itu Bupati, Abang Muhammad Nasir SH, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu punya misi memperkuat tata kelola pemerintahan. Untuk merealisasikan misi ini, diharapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada harus meningkatkan profesional kinerja guna membangun pelayanan publik yang semakin baik. "Dalam hal ini sangat dibutuhkan pendampingan hukum, sehingga tidak melanggar aturan yang ada,"

Diakui Bupati Kapuas Hulu persoalan hukum yang mengaitkan aparatur negara menjadi tekanan tersendiri. karena banyak pejabat yang menolak jadi PPK, karena takut.

## BUPATI KAPUAS HULU DAN KAJARI PUTUSSIBAU MENANTANGANI MOU

Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan ini, Bupati mengharapkan, hal itu dapat mencegah terjadinya persoalan hukum yang mengaitkan dengan penggunaan anggaran dan sebagainya. "Penggunaan anggaran pasti ada resiko, jadi perlu pendamping dari kejaksaan, termasuk dari Tim P4D," (Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah).

Selain itu, Bupati Kapuas Hulu juga mengharapkan, mou tersebut bukan justru memicu munculnya persoalan hukum baru. Sebab tujuannya untuk mempercepat akselerasi pembangunan, yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. "Jangan sampai ada yang sudah pensiun justru tersangkut hukum lagi, kasihan,"

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Rudi Hartono menambahkan, pihaknya membuat mou dengan Pemda Kapuas Hulu untuk memkasimalkan peran tim p4d, yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Dari instansi Kejaksaan sendiri. Kejari Putussibau memandang dengan adanya pendampingan hukum bagi pejabat terkait, sehingga ekselaborasi pembangunan di pusat sampai daerah maksimal, tanpa penyimpangan. "Ini sesuai instruksi Kejaksaan Agung, tim p4d bertindak sebagai pengarah dan pengendali pelaksanaan kegiatan, mulai dari Pusat sampai Daerah," Kejari Putussibau berharap, mudah-mudahan dengan adanya mou Kejari Putussibau dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, dapat membawa manfaat yang baik bagi masyarakat dan pemerintah, guna kesinambungan pembangunan kabupaten Kapuas Hulu. (Dok. KIP)



## "JANGAN SAMPAI ADA YANG SUDAH PENSIUN JUSTRU TERSANGKUT HUKUM LAGI, KASIHAN,"

## BUPATI KAPUAS HULU RESMIKAN SPBU BARU, DESA TEKUDAK KECAMATAN KALIS

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kamis (9/2). SPBU yang diresmikan orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini adalah milik PT. Hasil Bumi Perkasa (PT.HBP).

Dengan adanya SPBU tersebut, Bupati Kapuas Hulu berharap dapat mengurangi masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebab kelangkaan minyak selalu memicu harga bbm menjadi tinggi dan menyusahkan masyarakat.

"Dua tahun lalu kita alami kelangkaan bbm, akibatnya harga BBM juga melambung tinggi bahkan sampai belasan ribu rupiah perliternya. Masyarakat disini sampai ada yang membeli BBM ke Kabupaten Sintang," ungkap Nasir saat menghadiri acara syukuran SPBU tipe D PT. Hasil Bumi Perkasa Jalan Lintas Selatan Desa Tekudak Kecamatan Kalis, Kamis (09/02).

Satu-satunya SPBU di kecamatan Kalis ini berdiri, ternyata atas inisiasi Bupati Kapuas Hulu sendiri. "Dua tahun lalu saya menyarankan kepada Faisal agar mendirikan SPBU di Kecamatan Kalis, mengingat saat itu di Kapuas Hulu terjadi kelangkaan BBM dan ternyata baru sekarang terealisasi," tuturnya.

Dengan adanya SPBU baru ini, jumlah SPBU/ APMS di jalur Lintas Selatan jadi sekitar 5 unit yang beroperasi. Dengan adanya APMS-APMS tersebut, Bupati Kapuas Hulu juga mengharapkan agar masyarakat setempat menjadi terbantu dengan harga bbm yang sesuai standar. "Kami minta APMS atau SPBU yang ada bekerja profesional," tutupnya.

Dirut SPBU tipe D PT. HBP, Faisal mengatakan, latar belakang pendirian SPBU tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyetabilkan harga BBM di Bumi Uncak Kapuas. "Untuk harga penjualan BBM ini akan kami sesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina,"katanya.

SPBU miliknya tersebut menjual BBM jenis Solar, Premium dan Peralite. Dimana untuk pengambilan BBM khusus untuk Solar dan Premium dari Sintang, sementara Peralite dari Pontianak. "Untuk jatah Kuota BBM Solar 16 ribu liter perhari, Premium 16 ribu liter perhari dan Peralite 16 ribu liter perhari,"terangnya.

Jumlah kuota BBM yang diberikan Pertamina tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Kapuas Hulu. Kedepan pihaknya juga akan mengembangkan usaha Gas Elpiji. "Kami akan beroperasi selama 24 jam, selain itu kami juga akan meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat serta akan taat dalam pengelolaan administrasi,"tutupnya. (Dok. KIP)

**"DUA TAHUN LALU SAYA  
MENYARANKAN KEPADA  
FAISAL AGAR MENDIRIKAN  
SPBU DI KECAMATAN  
KALIS, MENINGAT SAAT  
ITU DI KAPUAS HULU  
TERJADI KELANGKAAN BBM  
DAN TERNYATA BARU  
SEKARANG TEREALISASI,"**



## WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PRESENTASIKAN DESA RIAM TAPANG DI PONTIANAK

Desa Riam Tapang, kecamatan Silat Hulu yang dulunya terpencil telah berhasil menjadi desa yang lebih maju. Hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama pihak-pihak lainnya berhasil merealisasikan program Kampung Keluarga Berencana (KB) di desa Riam Tapang, desa tersebut pun menjadi percontohan di tingkat nasional.

Senin (20/3) lalu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH menjadi narasumber untuk memaparkan realisasi desa Riam Tapang menjadi kampung KB, di Hotel Mercure, Pontianak dalam acara konsolidasi pejabat administrator dan pejabat pengawas dibidang advokasi, pergerakan dan informasi (ADPIN) Optimalisasi Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi Untuk Mendukung Program Kependudukan, Keluarga (KKBP) dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Anton mewakili Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diminta hadir untuk memberikan paparan tentang kegiatan yang dianggap berhasil oleh BKKBN Provinsi Kalbar. Pemaparan tersebut di ikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Wakil Bupati Kapuas Hulu mendapatkan kehormatan untuk memaparkan tentang Kampung KB yang ada di Kapuas Hulu, satu – satunya daerah terpilih untuk penancangan kampung KB tersebut adalah Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu,”

Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu penancangan kampung KB di desa Riam Tapang dari 21 April 2016 sampai 31 Desember 2016. Selama kurun waktu delapan bulan, Desa Riam Tapang dikelola untuk menjadi daerah yang lebih maju. “Awalnya akses menuju Desa Riam Tapang cukup sulit, dulunya dari desa Riam Tapang butuh 10 jam menuju ibukota kabupaten Kapuas Hulu, setelah pakai mobil harus lewat sungai dan jalan kaki lagi baru sampai. Sekarang tidak lebih dari 3 jam sampai di ibukota kabupaten Kapuas Hulu, tinggal pakai mobil sudah nyampai,”.

Lebih lanjut Wakil Bupati Kapuas Hulu menjelaskan, Kampung KB dibentuk berdasarkan amanat presiden tentang membangun dari daerah pinggiran, wacananya dimulai dari BKKBN pusat, bagaimana kalau KB itu dikembangkan. Karena sekitar tahun 80 – an paling semarak yang namanya KB.



“Namun akhir – akhir ini seperti meredup. Nah bagaimana kita sekarang dalam istilah mencari namanya kampung KB. Ide itu memang dari Bapak Presiden, ditindaklanjuti oleh Mendagri memerintahkan kepada gubernur dan bupati/walikota se Indonesia untuk membentuk kampung KB. Ditindaklanjuti oleh gubernur kepada bupati dan walikota,”

Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu pembentukan kampung KB merupakan tujuan dari program nasional yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Sesuai komitmen dalam surat edaran, dimana telah diinstruksi seluruh daerah untuk tahun 2017 setiap kecamatan satu desa satu kampung KB.

“Kita sudah di SK – kan oleh Bupati Kapuas Hulu tahun 2017 ditambah 2 desa yang difokus, tidak dibagi per kecamatan tapi sistem zona. Karena kita membangun yang paling ujung, dampaknya akan terasa nanti. Misal pembangunan akses menuju desa paling ujung, otomatis desa sebelumnya bisa merasakan dampak pembangunan jalan tersebut. Artinya sudah beberapa desa yang terbuka akses, meski secara formal hanya 1 – 2 desa saja,”. (Dok. KIP)

**“AWALNYA AKSES MENUJU DESA RIAM TAPANG CUKUP SULIT, DULUNYA DARI DESA RIAM TAPANG BUTUH 10 JAM ..... SEKARANG TIDAK LEBIH DARI 3 JAM SAMPAI DI IBUKOTA KABUPATEN KAPUAS HULU, TINGGAL PAKAI MOBIL SUDAH NYAMPAI,”.**



## BUPATI KAPUAS HULU RESMIKAN BEBERAPA GEDUNG PROYEK DESA DI DESA NANGA JEMAH

Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, S.H melaksanakan kunjungan kerja di Desa Nanga Jemah, Kecamatan Boyan Tanjung, Selasa (21/3) lalu. Kedatangan Bupati Kapuas Hulu beserta Rombongan di sambut oleh langsung masyarakat di pedalaman Boyan Tanjung dan sekaligus meresmikan sejumlah beberapa Gedung Proyek desa yang baru selesai dibangun. Adapun bangunan yang diresmikan oleh Bupati Kapuas Hulu adalah gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), gedung serba guna, Kantor Desa Nanga Jemah dan Balai Pertemuan Dusun Bangik, Desa Nanga Jemah.

Pada kesempatan itu Bupati Kapuas Hulu datang didampingi para SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemb) Kapuas Hulu, camat, kepala desa serta unsur Forpimda Kecamatan Boyan Tanjung serta kepala perwakilan Bank Kalbar, Kecamatan Boyan Tanjung.

Dalam Sambutanannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan terima kasih kepada Camat Boyan Tanjung beserta jajarannya yang telah menyambut dan hadir di gedung serbaguna Boyan Tanjung, dalam rangka peresmian beberapa Bangunan Proyek Desa di wilayah Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung. “Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Nanga Jemah bapak Musmulyadi, yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatannya sebagai kepala desa Nanga Jemah, semoga pada priode berikutnya bisa terpilih kembali.

Secara khusus orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas itu mengatakan, dengan diresmikannya fasilitas pendidikan tersebut, membuktikan bahwa Desa Nanga Jemah, telah memenuhi perintah Undang – undang, yang mengamanatkan bahwa setiap desa harus ada satu PAUD.

Selanjutnya Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi dan bangga, bahwa pembangunan gedung serba guna dan kantor Desa Nanga Jemah yang penancapan tiang pertama dulunya dilakukan oleh Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, SH semasa beliau menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu periode pertama, bisa diresmikan lagi oleh beliau juga ketika menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu periode kedua ini. “Serta balai pertemuan di Dusun Bangik, Desa Nanga Jemah, saya mengucapkan selamat atas diresmikannya empat gedung tersebut. Keempat Gedung yang diresmikan itu termasuk aset desa,”.

Oleh Karena itu bangunan yang merupakan aset desa, maka Bupati Kapuas Hulu meminta masyarakat desa Nanga Jemah bisa mempergunakannya dengan sebaik – baiknya, kemudian harus dijaga dan dirawat keberadaannya oleh pengurus desa dan masyarakat Desa Nanga Jemah. “Sehingga pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa terutama Desa Nanga Jemah, agar pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah dan lancar **(Dok. KIP)**

» BAHWA PEMBANGUNAN  
GEDUNG SERBA GUNA DAN  
KANTOR DESA NANGA JEMAH  
YANG PENANCAPAN TIANG  
PERTAMA DULUNYA DILAKUKAN  
OLEH BUPATI KAPUAS HULU  
A.M. NASIR, SH SEMASA BELIAU  
MENJABAT SEBAGAI BUPATI  
KAPUAS HULU PERIODE  
PERTAMA, BISA DIRESMIKAN  
LAGI OLEH BELIAU JUGA KETIKA  
MENJABAT SEBAGAI BUPATI  
KAPUAS HULU KEDUA INI. «

## WAKIL BUPATI KAPUAS HULU, SOSIALISASIKAN BAHAYA NARKOBA

Wakil Bupati Kapuas Hulu, mengatakan, generasi muda akan melanjutkan estapet pembangunan dimasa mendatang. Oleh karena itu, generasi muda harus terbentengi dari pengaruh Narkoba. "Narkoba saat ini menjadi ancaman bagi generasi bangsa, barang haram itu sudah masuk disemua kalangan tanpa mengenal usia,"

Dengan adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu berharap, tidak ada generasi muda yang coba-coba dengan Narkoba. Sebab sekali mencoba itu akan menyebabkan ketergantungan. "Saya ingatkan jangan mencoba-coba barang haram itu, sekali anda mencoba maka itu akan menjadi awal kehancuran,"



Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Kusnadi, S.Sos. M.Si mengatakan, sampai saat ini belum ada pelajar tersangkut kasus narkoba. Kalau pun ada tertangkap, dirinya berharap ada upaya rehabilitasi. "Saya rasa yang perlu ditangkap itu pengedarnya, kalau mereka yang korban sebagai pengguna lebih baik direhabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkoba," (Dok. KIP)

## BUPATI RESMIKAN SEJUMLAH BANGUNAN DI BUNUT HILIR

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH meresmikan gedung SMP, PAUD, Polindes, Posyandu dan Kantor Desa, di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Senin, (17/04). Pembangunan gedung tersebut bersumber dari anggaran desa.



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengatakan, dengan adanya bangunan-bangunan yang baik, pelayanan terhadap masyarakat juga harus prima. Apalagi bentuk-bentuk pelayanan yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan. "Saya minta agar sarana yang baik ini betul-betul dimanfaatkan masyarakat," ucapnya, disela kegiatan peremian. Selain memanfaatkannya, Bupati Kapuas Hulu juga menghimbau agar masyarakat ikut menjaga fasilitas yang ada. Mulai dari sarana ibadah hingga bangunan yang dibangun Pemerintah. "Saya minta masyarakat agar turut menjaga aset Pemerintah, jangan sudah dibangun dibiarkan begitu saja, harus dipelihara dan dimanfaatkan," ujarnya.

Kepala Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Bapak Sudarso, mengapresiasi kesediaan Bupati dalam meresmikan bangunan di desanya. Dengan bangunan yang selesai dari dana desa tersebut, kades tersebut berharap masyarakat di desanya bisa mendapatkan pelayanan yang baik. "Kita yakin dengan sarana yang sudah ada, masyarakat bisa dapatkan pelayanan yang baik juga," ucapnya.

Meski desa mendapat glontoran dana yang cukup besar, kades tersebut mengatakan bahwa pihak desa masih ada keterbatasan pembangunan. Terutama listrik dan tower telekomunikasi untuk mempermudah akses komunikasi masyarakat sekitar. "Oleh sebab itu kami mengharapkan kedepan bapak Bupati bisa membantu kami untuk listrik dan tower telekomunikasi itu," ucapnya. (Dok.KIP)



## DELEGASI MALAYSIA SURVEY TRAYEK BUS KUCHING - PUTUSSIBAU

Residen Sariaman, Serawak-Malaysia, Anwar bin Hajidan bersama utusan 19 kementerian dari Malaysia lainnya mengunjungi Putussibau, Rabu (19/4). Rombongan delegasi Malaysia ini disambut Bupati dan Wabup Kapuas Hulu, AM Nasir SH dan Antonius L Ain Pamero SH, Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri dan jajaran, serta perwakilan Kementerian Perhubungan RI di kediaman dinas bupati. Kedatangan delegasi Malaysia ini untuk survey jalur tryek bus antar negara Putussibau (Indonesia)-Kuching (Malaysia).

Dalam pertemuan itu, Bupati Kapuas Hulu, mengatakan, sebelum ada PLBN Badau, masyarakat Kapuas Hulu yang mau ke Kuching-Malaysia harus ke Pontianak terlebih dahulu. Tapi setelah PLBN Badau terbangun oleh Pemerintah Indonesia akses darat ke Malaysia jadi lebih pendek. "Seperti rombongan delegasi Malaysia yang datang saat ini, berangkatnya siang tadi dan datangnya malam hari kesini. Tentunya akses darat sudah baik," ujar Bupati.

Bupati Kapuas Hulu menjelaskan bahwa masyarakat Serawak-Malaysia masih serumpun dengan masyarakat di Kapuas Hulu, atau Kalimantan Barat pada umumnya. Sebab itu Nasir juga mengajak delegasi Malaysia untuk sama-sama membangun perekonomian di perbatasan. Mulai dari sektor pasar kerajinan masyarakat, perikanan, sektor wisata dan lainnya.

Untuk potensi ekonomi, kami disini ada banyak seperti kerajinan, hasil perikanan baik olahan atau pun ikan hias. Hal ini bisa saling menguntungkan, seperti bahan kerajinan bisa dibeli dari Malaysia dan diolah masyarakat Putussibau untuk dijual lagi ke Malaysia, paparnya.

Pada sektor wisata, Kapuas Hulu juga didukung dengan adanya Danau Sentarum, Bukit Tilung, Riam Brunyau dan lokasi lainnya. "Nanti delegasi Malaysia akan dibawa ke Danau Sentarum sebelum kembali kenegaranya," kata Bupati Kapuas Hulu.

Malaysia mempermudah proses pengesahan lintas batas untuk kendaraan Indonesia dari Kapuas Hulu. "Saya harap dari delegasi ini bisa menyampaikan usul agar chop (pengesahan) lintas batas kendaraan itu bisa di PLBN Badau, jangan hanya di Entikong Kabupaten Sanggau saja. Ini juga kami harapkan bisa disampaikan perwakilan Kementerian Perhubungan RI yang hadir, untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat," ucap Bupati Kapuas Hulu dua periode ini.

Untuk masalah chop, Residen (Bupati) Sariaman, Serawak-Malaysia, Anwar bin Hajidan, menilai proses tersebut perlu diperbaiki. Sebab itu, dia pun akan menyampaikan permintaan bupati kepada petingginya di Kuala Lumpur. "Kalau lewat Badau harus chop di Entikong itu juga saya rasa menyusahkan," tegasnya.

Terkait kunjungan ke Putussibau, Anwar mengatakan dirinya datang berasama 19 agensi dari kementerian Malaysia yang terkait Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia- Indonesia). Kedatangan tersebut untuk meninjau jalur darat Sariaman-Lubuk Antu-Badau-Putussibau. "Ini pertama kali melawat di Putussibau untuk melihat jalan yang menghubungkan Putussibau-Badau-Lubuk Antu. Dari segi kilo meter tidak jauh, cuma jalannya sempit membuat bis tidak bisa laju," tegasnya.

Anwar juga mengharapkan agar ada pembangunan pengaman jalan di jalur Putussibau-Badau. "Jalan tidak ada lubang cuma dari segi keselamatan di pinggir jalan kurang, apalagi banyak yang curam. Hal ini jangan dibiarkan berkelanjutan," pintanya.

Sehubungan dengan penyambutan pihaknya di Putussibau, Anwar, mengaku terkesan. Pihak yang menyambut juga begitu banyak. "Pada kesempatan ini kami juga mengundang rombongan dari Putussibau untuk melawat ke Kuching. Semoga ini bukan jadi kunjungan yang terakhir, diharapkan ada lanjutan," tutupnya. (Dok. KIP)





## PEREMPUAN MESTI JAUHI DEGRADASI MORAL

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH menghadiri kegiatan peringatan hari Kartini ke 138 yang dilaksanakan di gedung MABM, Kecamatan Putussibau Selatan, Jumat (21/4) Pukul 08.00 Wib.

Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Hulu, tanggal 21 April merupakan hari Kartini yang selalu diperingati setiap tahunnya. Adanya hari Kartini, menurut Nasir, adalah bagian dari sejarah terwujudnya keadilan sosial terhadap kaum perempuan. "Sebab itu, kegiatan ini harusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk saling menghargai sesama manusia," ujarnya dihadapan puluhan perempuan yang hadir dalam kegiatan itu.

Bupati Kapuas Hulu menuturkan, pada jamannya, Kartini sudah berjuang untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan kaum pria. Hal itu adalah bentuk emasipasi perempuan. "Menurut saya, apa yang dilakukan Kartini adalah esensi perjuangan yang menjadi karakter perempuan Indonesia. Mereka sejajar dengan kaum pria, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan," tegas Bupati.

Bahkan sekarang ini, sudah banyak jabatan strategis di pemerintahan yang di isi oleh kaum perempuan. Baik itu di lembaga Legislatif ataupun Eksekutif. "Sebab itu, perempuan sekarang semakin dituntut karena mereka sudah diberikan posisi yang berat, mereka harus tangguh dan berbudi luhur, mampu menjauhi bentuk-bentuk degradasi moral seperti seks bebas dan kegiatan negatif lainnya," tutup Bupati.

Pada peringatan Hari Kartini ke 138, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu didampingi istrinya Ny. Erlinawati Nasir. Hadir pula Wabup, Antonius L Ain Pamero bersama istrinya Ny. Silvia Pamero, kemudian Sekda, Muhammad Sukri, jajaran Forkompinda, DPRD dan SKPD Kapuas Hulu. Adapula penyerahan piala bagi anak-anak yang memenangkan lomba dalam rangka peringatan hari Kartini. (Dok. KIP)



**"Apa yang dilakukan Kartini adalah esensi perjuangan yang menjadi karakter perempuan Indonesia. Mereka sejajar dengan kaum pria, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan,"**

## TP PKK MERUPAKAN MITRA PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM

Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-45 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, TP PKK Kabupaten Kapuas menggelar malam ramah tamah antara pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu, dan TP PKK kecamatan, dan desa, Sabtu (22/4/2017) pukul 20.00 WIB.

Acara berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu (Pendopo), dan hadir Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, Sekda Kapuas Hulu Muhammad Nasir, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah, Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf Muhammad Ibnu Subroto, Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, SKPD, Kasi Intelijen Kejari Kapuas Hulu Acep Subhan, seluruh TP PKK tingkat kecamatan dan desa, serta undangan lainnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas Hulu, Ny Erlinawati Nasir menyatakan, dalam rangka HKG ke-45 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti lomba bidang sekretaris, bidang Pokja 1 hingga Pokja IVHKG) ke-45 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, senam bersama, outbond, lomba penyuluhan program kerja IV, dan kegiatan lainnya.

"Acara ini berlangsung selama empat hari, dari tanggal 22-25 April 2017. Kegiatan seperti ini, merupakan kegiatan pertama kali TP PKK lakukan," ujar Ny Erlinawati Nasir yang juga Anggota DPRD Kapuas Hulu Fraksi PPP itu, saat memberikan katasambutan ramah tamah antara pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu, dan TP PKK kecamatan, dan desa tersebut.

Ny. Erlinawati juga menyatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara TP PKK tingkat kecamatan hingga ke desa. Karena Kapuas Hulu sangat luas, sehingga tidak mudah melakukan pembinaan desa, secara langsung.

"Adanya kegiatan ini, bisa melibatkan langsung pengurus TP PKK tingkat kecamatan dan desa, sehingga bisa meningkatkan silaturahmi dan bertukar ilmu antar desa dan kecamatan," ucapnya.

Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad (AM) Nasir menyatakan, acara ini untuk meningkatkan silaturahmi baik tingkat kecamatan hingga desa. Ini juga momen bertukar informasi terhadap tugas pokok TP PKK dari tingkat kecamatan dan desa.

"Saya melihat kegiatan ini sangat luar biasa, karena tidak semua kabupaten kota bisa menggelar kegiatan ini. Alhamdulillah, Tingkat nasional TP PKK Kapuas Hulu pernah juara II, ini tentu sangat membanggakan Kapuas Hulu," ucapnya.



Selain itu kata Bupati, juga ajang memperkenalkan potensi desa, dan momen untuk ujung kebolehan, karena ada lomba-lomba dan sebagainya. "Jadi kalau tidak ada mengikuti kegiatan ini, sangat rugi karena tidak semua kegiatan dilaksanakan setiap tahun," ujarnya.

Bupati Kapuas Hulu menuturkan, TP PKK merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan program, sehingga TP PKK harus mendapatkan dukungan penuh dari instansi terkait. "Kita ketahui bahwa, TP PKK tidak memiliki anggaran cukup. Pemda tidak bisa lepas dari PKK," ungkapnya. **(Dok. KIP)**



## PROGAM PKK LINIER DENGAN PEMERINTAH

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 45 di Kapuas Hulu sudah mencapai puncak, sejak dimulai pada 22 April lalu. Pada acara puncak yang digelar di gedung Indoor Putussibau, Selasa (25/4) pagi, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH berkesempatan memotong tumpeng.

Pada sambutannya, Bupati Nasir mengapresiasi peringatan HKG PKK di Kapuas Hulu kali ini. Pasalnya ia melihat rangkaian kegiatan yang ada disambut penuh antusias masyarakat dan pengurus TP-PKK Kapuas Hulu. "Saya apresiasi karena HKG ini karena tim PKK dari desa dan kecamatan hadir bahkan awal kegiatan sampai saat ini tidak ada yang pulang. Kekompakan ini harus dipertahankan sampai seterusnya," pesan Nasir.

Bupati Kapuas Hulu mengatakan ia ingin agar gerakan PKK menjadi gerakan masyarakat. Agar menjadi satu gerakan yang dapat mensejahterakan keluarga. "Ini program dari dan untuk masyarakat," tutupnya.

Dia juga minta agar pola kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan Pemerintah terus ditingkatkan TP-PKK Kapuas Hulu. Dengan adanya kemitraan yang baik, kata Bupati itu dapat mengatasi kendala program PKK. "Dhasawisma juga harus ditingkatkan, karena itu program nasional dari PKK. Kemudian pengurus PKK Kapuas Hulu harus memotivasi kader dan masyarakat, supaya mereka mau jalankan program PKK," tutur Bupati Kapuas Hulu dua periode ini.

Sementara itu Ketua TP-PKK Kapuas Hulu, Ny. Erlinawati Nasir mengatakan, PKK terus bergerak linier dan sejalan dengan Pemerintah. Bahkan banya bentuk kerjasama yang sudah berjalan. "Kita ada MoU di bidang pertanian, kependudukan dan bkkbn, desa dan pdt serta yang lainnya. Hal ini perlu diakselerasi dan dipercepat secara bersama-sama oleh seluruh TP-PKK," ujarnya.

Ny. Erlinawati juga menegaskan agar program PKK yang sifatnya seremonial dikurangi. Program yang tersusun harus dikembangkan sesuai prinsip yang ada di Pemerintah. "Kita harus kerja, kerja dan kerja meski hanya dalam skala organisasi PKK," terangnya. Kedepan, keterampilan pengurus PKK harus diperhatikan. Sebab itu ia mengarahkan agar pengurus PKK membuat program pelatihan teknis. "Agar pengurus PKK Kapuas Hulu mau dan mampu jalankan tugas dan fungsinya," tegas perempuan yang juga Anggota DPRD Kapuas Hulu ini.

Ia juga menambahkan, setiap peringatan HKG hendaknya menjadi momentum bagi para pengurus PKK untuk mengevaluasi diri. Lakukan penilaian dini dari program yang sudah dijalankan dan program selanjutnya yang akan dilaksanakan. "Siklus manajemen program dan kelembagaan perlu dilakukan secara berkesinambungan," ujarnya "Saya juga mengajak seluruh pengurus PKK Kapuas Hulu agar membimbing pada kader PKK dan Dhasawisma, karena pada mereka terletak fungsi dan program pokok PKK," tutup Erlinawati. (Dok. KIP)





## BUPATI TUTUP PAMERAN HKG PKK-45

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, menutup acara pameran HKG PKK-45 di taman Alun Kapuas, Putussibau, Selasa (25/4) malam. Pada kesempatan itu Bupati membagikan piala bagi para pemenang stand pameran di hadapan ratusan pengunjung. Adapun pemenang stand pameran adalah sebagai berikut, kecamatan Empanang juara I, Putussibau Selatan juara II, Bunut Hilir juara III, Semitau juara harapan I, Mentebah harapan II, Selimbau harapan III.

“Bagi yang belum dapat piala, bisa datang lagi dikesempatan yg akan datang. Tidak dapat piala saat ini bukan berarti kalah,” ungkap Bupati Kapuas Hulu.



Bupati Kapuas Hulu, mengatakan dirinya mengapresiasi seluruh pemerintah kecamatan yang sudah menyemarakkan kegiatan dalam rangka peringatan HKG PKK ke-45.

Bupati Kapuas Hulu mengharapkan, bagi kecamatan yang belum berhasil meraih juara agar tetap optimis untuk meraih juara di perlombaan selanjutnya.



Bupati Kapuas Hulu mengaku dirinya terkesan dengan antusias masyarakat dari rangkaian kegiatan yang buat ibu-ibu PKK Kapuas Hulu. Terutama dari kegiatan pameran, dimana dari awal kegiatan selalu dipenuhi ratusan warga Putussibau dan sekitarnya.

“Saya melihat momen HKG PKK kali ini berbeda, kegiatan lebih ke out door, ada kegiatan out bound di Pulau Kambing dan taman Alun Kapuas. Antusias masyarakat juga luar biasa. Mudah-mudahan kedepan lebih semarak, kalau perlu kita tambah artis,” tutupnya. (Dok. KIP)

## OLAH RAGA SEBAGAI TREND GAYA HIDUP SEHAT

Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu semakin menyadari pentingnya olahraga bagi kesehatan. Seperti di kota Putussibau, masyarakat terlihat aktif melakukan aktifitas olahraga, mulai dari bersepeda, jogging, senam dan berbagai jenis olahraga lainnya saat pagi dan sore hari.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan sangat mendukung hal tersebut. “Olahraga hendaknya menjadi sebuah keharusan atau trend gaya hidup, sehingga dapat menambah tingkat kesehatan bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Drs Edi Suparman, M.M, Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kapuas Hulu.



Sebagai bentuk dukungan terhadap bidang olahraga, Drs Edi Suparman mengatakan dinas sudah menggelar beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di tahun 2017 adalah Senam Aerobik, Lomba Pangkajene Gasing, Lomba Drum Band, Senam Kesegaran Jasmani Untuk Pelajar. Sedangkan event olahraga terbesar di Tahun 2017 ialah Pekan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Drs Edi Suparman juga menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk memfasilitasi peningkatan prestasi olahraga, serta pembudayaan olahraga di masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagaimana menjadi tugas pokok dan fungsi bidang olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.



Namun, Drs Edi Suparman juga mengakui bahwa masih ada kendala untuk mengembangkan bidang olahraga. Hal tersebut adalah data-data, baik itu data tentang olah raga yang masih berkembang di masyarakat, seperti olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan olahraga khusus, demikian juga terkait data sarana prasarana olahraganya. “Sebab itu prioritas utama Bidang Olahraga di Tahun 2017 adalah untuk melengkapi data-data yang belum lengkap tersebut,” ujarnya. (Dok – KIP)

**“OLAH RAGA HENDAKNYA  
MENJADI SEBUAH KEHARUSAN  
ATAU TREND GAYA HIDUP,  
SEHINGGA DAPAT MENAMBAH  
TINGKAT KESEHATAN BAGI  
SELURUH MASYARAKAT  
KABUPATEN KAPUAS HULU,”**



## MAKSIMALKAN PERAN PERPUSTAKAAN DI KAPUAS HULU

Perpustakaan menjalankan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada poin entri ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Melalui perpustakaan siapapun dapat menambah ilmu pengetahuan agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.



Memperhatikan pentingnya peran perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu terus memaksimalkan peran perpustakaan di Bumi Uncak Kapuas. Pada Tahun 2017 ini, Bidang Perpustakaan intensif melaksanakan Supervisi dan Monitoring pada perpustakaan Sekolah, Desa, Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada triwulan pertama, kegiatan itu sudah dilakukan di Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Kalis dan Kecamatan Bika. Dengan perpustakaan yang ada di kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan cakrawala berfikir dan pengetahuan Masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Kapuas Hulu.

Selanjutnya ada lagi kegiatan perpustakaan tingkat SD, SLTP dan SMA yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian ada lagi Lomba Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan dan Akan dilaksanakan lomba bercerita untuk anak-anak pelajar tingkat Sekolah Dasar.

Selain bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan, termasuk bidang kearsipan.



Untuk Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki program prioritas berupa monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan. Adapula sosialisasi kearsipan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada triwulan pertama tahun anggaran 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monev dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan SKPD di Kecamatan Putussibau Utara, Bika, Putussibau Selatan dan Kecamatan Embaloh Hilir. **(Dok. KIP)**

**“MELALUI PERPUSTAKAAN  
SIAPAPUN DAPAT MENAMBAH ILMU  
PENGETAHUAN AGAR MENJADI  
MANUSIA YANG BERIMAN,  
BERAKHLAK MULIA, BERILMU,  
CAKAP, KREATIF DAN MANDIRI.”**



## KAPUAS HULU KEJAR OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu selalu aktif mengawasi penggunaan keuangan agar sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Meskipun dengan keterbatasan dana yang ada, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu tetap berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas fungsi dan pokok demi kemajuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.



Dalam triwulan pertama, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendata hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Kalimantan Barat untuk melihat sejauh mana yang menjadi titik temuan. Sebab akan dilaksanakan pemeriksaan kembali pada bulan April 2017 untuk ditindak lanjuti. “Kami selalu mengingatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar memperkecil temuan,” kata Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. H Hasan M, M.Si.

Pada Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Mengecualikan). “Sebab itu inspektorat mengiring penyelesaian temuan-temuan yang ada di SKPD,” kata Drs. H Hasan M, M.Si.

Tak luput, Drs. H Hasan M, M.Si menghimbau kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar tidak melakukan pemungutan tambahan atau pemungutan liar kepada masyarakat. “Masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dari Pemerintah, jangan dibebankan lagi,” tuntasnya. **(Dok. KIP)**

## BKPSDM LAKUKAN PENYESUAIAN STRUKTUR SETELAH PERUBAHAN SOPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Perubahan SOPD ini tentu memberikan dampak, khususnya terhadap struktur dan tupoksi masing-masing bidang.

Oleh karena itu, BKPSDM memerlukan penyesuaian struktur dalam pembagian tupoksi pada masing-masing bidang. Penyesuaian struktur ini tidak serta merta dibarengi dengan penyesuaian staf pelaksana yang menguasai teknis kegiatan, sehingga menimbulkan sedikit hambatan dalam capaian progress pelaksana kegiatan. Untuk itu, secara bertahap, BKPSDM melakukan upaya pengisian staf pelaksana menyesuaikan dengan pengaturan tupoksi.

Selain perlu penyesuaian struktur dalam pembagian tupoksi pada masing-masing bidang, perubahan SOPD ini juga memberikan dampak terhadap perencanaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan anggaran pada tahapan penyempurnaan DPA dan dilakukan perubahan pada tahap perubahan DPA.

Terkait dengan perubahan SOPD, yang menjadi tugas pokok dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, dengan 3 program prioritas, yaitu program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pengembangan dan pembinaan aparatur, serta program pendidikan kedinasan. Selain program prioritas tersebut, terdapat pula program lain seperti program pelayanan umum administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. **(Dok. KIP)**

## BKD BERUPAYA MENJADIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TERTIB, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini terus berupaya untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin, dimana tujuannya adalah bagaimana menjadikan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu tertib, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan dukungan sistem Pemerintah Daerah yang kuat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Bab III Pasal 3 yang menyatakan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun program prioritas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2017 ini, antara lain, untuk bidang pendapatan meliputi program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pemungutan bagi hasil pajak dan bukan pajak; program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pemungutan lain-lain sumber pendapatan daerah yang sah; program pemberdayaan unit-unit penghasil; program pengembangan sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah; serta program peningkatan kapasitas dan kapabilitas prasarana dan sarana pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan untuk bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan; program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I Tahun Anggaran 2017 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ada sebanyak 41 kegiatan dengan jumlah dana pada DPA sebesar Rp 15.926.033.400,00 (lima belas miliar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.812.973.080,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan sisa pagu anggaran 2017 sebesar Rp. 12.113.060.320,00 (dua belas miliar seratus tiga belas juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). **(Dok. KIP)**

## TINGKATKAN PELAYANAN DIBIDANG PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perizinan, terus meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan kepada pemohon perizinan dan non perizinan.



Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Helena, S.H., M.A.P. saat ditemui di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (4/4).

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perizinan, lanjut Helena, S.H., M.A.P., pihaknya melakukan sosialisasi perizinan dan non perizinan ke Kecamatan dan memberikan pelayanan dalam proses membuat surat ijin terbit usaha di Kecamatan. Selain itu, masyarakat yang ingin menerbitkan surat ijin usahanya juga dapat datang langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. **(Dok. KIP)**

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU PRIORITASKAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PETANI MELALUI PROGRAM PRIORITAS 2017

Mulai tahun 2017 ini, Dinas Pertanian mengalami perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2017 ini, sesuai dengan SOTK yang baru Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewenangan di bidang pertanian, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan, peternakan dan penyuluhan. Dan ada juga Unit Pelayanan Teknis dan kelompok jabatan fungsional yang diserahkan oleh Bupati.

Untuk program prioritas tahun 2017 di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain, peningkatan ketahanan pangan pertanian atau perkebunan; program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, lapangan dan peternakan; program peningkatan penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perkebunan; program peningkatan kesejahteraan petani; program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian atau peternakan dan perkebunan; program peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan; program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; program pengembangan sarana dan prasarana UPT pertanian, perkebunan dan Puskewan; serta program pengembangan sistem perlindungan tanaman pangan.

Dimana dari kesembilan program itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang artinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperluas pangsa pasar, baik lokal maupun global yang ditempuh dengan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, mandiri serta yang diharapkan mampu meningkatkan keanekaragaman hasil, mutu dan derajat pengolahan hasil pertanian serta diharapkan juga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah, khususnya Kapuas Hulu.

Terkait dengan program prioritas tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Sunarto, menjelaskan bahwa ada beberapa terobosan yang telah dilakukan. Diantaranya adalah pengembangan padi Raja Uncak atau yang lebih dikenal dengan nama beras Seluang di kalangan masyarakat Kapuas Hulu. Untuk padi Raja Uncak ini memiliki pemasaran yang tinggi, bahkan kita kewalahan untuk permintaan dari luar.

Ada beberapa kendala dalam pengembangan padi Raja Uncak ini, yaitu umurnya (masa tanam) panjang yang bisa mencapai 5,5 sampai 6 bulan, sehingga hanya dapat ditanam setahun sekali. Namun, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bekerja sama dengan BPPT Provinsi Kalimantan Barat untuk memperpendek umur (masa tanam) padi Raja Uncak menjadi 4,5 bulan, sehingga ke depannya dapat dilakukan 2 kali penanaman dalam 1 tahun.



Selain tanaman padi, ada juga jagung dan ubi kayu. Jagung yang dibudidayakan dalam hal ini adalah jagung untuk pakan ternak. Sejauh ini, sudah ada lahan seluas 1.500 hektar yang siap ditanami benih jagung di bulan April-Mei, yang dikelola oleh beberapa kelompok tani. Kemudian, untuk ubi kayu, pengembangannya lebih ke arah penyediaan bahan baku untuk tepung mokaf.

Tiga komoditas pertanian tersebut memiliki tingkat pemasaran yang tinggi, jika dilihat dari pangsa pasar yang ada, baik pasar lokal maupun nasional, serta dapat menjadi perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya bagi para petani, sehingga ke depan kesejahteraan petani Kapuas Hulu dapat ditingkatkan. (Dok.KIP)



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA AJAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TERTIB

Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di semua tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas.

Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, ada banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah mulai meningkatnya angka gangguan keamanan (kriminalitas) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat perdesaan pun, yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib, dan tenang, harus merasakannya. Tidak berlebihan apabila dewasa ini tindak kriminalitas yang terjadi di perkotaan dapat terjadi pula di perdesaan, sebut saja kasus pembunuhan, penembakan hingga kasus tawuran yang melibatkan pelajar sekolah menengah.

Menghadapi maraknya kasus-kasus gangguan keamanan tersebut, perlu diambil langkah-langkah antisipatif agar perkembangan tindak kriminal tidak semakin meluas. Salah satu lembaga di luar kepolisian, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepolisian adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Sudarmo, S.Sos, memaparkan bahwa besarnya tugas dan fungsi yang melekat di Satpol PP tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Selaras dengan hal tersebut, disinggung pula perihal narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya di perkotaan saja, tetapi sudah sampai ke desa-desa. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh praktek premanise, kejahatan jalanan dan narkoba itu sendiri, maka Satpol PP juga dituntut perannya sesuai tanggung jawabnya.

Sejauh ini Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan patroli rutin di kota Putussibau, kemudian razia-razia di tempat-tempat kost dan café, serta razia terhadap anak-anak sekolah. Kemudian seandainya ada temuan-temuan di lapangan, langsung akan proses di kantor. Tetapi untuk tahun ini, masih bersifat teguran kepada anak-anak dan belum melakukan tindakan. Karena bagaimanapun jika kita melakukan tindakan sebelum ada teguran mungkin mereka akan merasa tidak dilindungi. Selama ini, yang kita lakukan adalah dengan menyurati sekolah atau orang tua anak yang bersangkutan, sehingga ada efek jera bagi yang bersangkutan, ungkap Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam interview singkat bersama Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu di ruang kerjanya, Abang Sudarmo, S.Sos menghimbau agar semua kalangan masyarakat yang ada di Kapuas Hulu, dapat ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai rumah kost dan kafe-kafe, sebelum ada tindakan dari aparat, hendaknya menegur jika ada hal-hal yang kurang baik. Dan tidak kalah pentingnya barangkali, Ketua RT atau Ketua RW mempunyai data yang akurat untuk terkait rumah kost atau café dan juga warganya. Karena paling tidak, dengan adanya rekam jejak atau data di RT / RW, akan lebih mudah dimonitor. **(Dok. KIP)**

## DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU, TRIWULAN PERTAMA SUDAH TEREALISASI SEPULUH PERSEN



Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati pada bidang kelautan dan perikanan, khususnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan juga memiliki peran untuk merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan administrasi dinas, pelaksanaan fungsi lain yang di serahkan oleh Bupati.

Program prioritas dinas perikanan pada tahun 2017 adalah pembinaan dan pengembangan perikanan, pengembangan kualitas, serta pembangunan peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan kelansin kecamatan Mentebah, pengembangan kawasan budi daya air tawar, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.

Terkait progress kegiatan Dinas Perikanan, sampai dengan triwulan pertama sudah sekitar 10 persen tercapai dari seluruh kegiatan. Salah satu kegiatan yang sudah terlaksana adalah forum peningkatan konsumsi ikan (FORIKAN) yang telah di laksanakan di kecamatan Badau dan kecamatan Hulu Gurung.

Disisi lain sektor Perikanan di Kapuas Hulu masih terkendala. Diantaranya karena keterbatasan kewenangan di bidang SDI. Akan tetapi solusi dari permasalahan itu sudah ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bahwa sebagian kewenangan yang menyangkut perikanan SDI, pengawasan PUD dan pengelolaan hasil perikanan masih dapat di laksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan lainnya adalah belum meratanya prasarana penunjang seperti jalan. Lalu keberadaan balai benih yang ada di Kelansin juga belum berfungsi secara optimal, sarana dan prasarana produksi masih terbatas.



Untuk itu Pemerintah daerah di harapkan dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak ke sektor perikanan, mengingat hasil perikanan dari PUD di kabupaten Kapuas Hulu memberikan kontribusi yang cukup besar pada ketahanan kabupaten Kapuas Hulu. Sebab itu butuh optimalisasi dengan peningkatan sarana balai benih ikan (BBI) kelansin, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran produk perikanan. **(Dok. KIP)**

## BLANKO KTP-ELEKTRONIK MASIH TERBATAS, MASYARAKAT DIHIMBAU UNTUK TETAP TERTIB DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan sertapencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Saat ini pada Disdukcapil memiliki 3 (tiga) bidang, 1 (satu) sekretariat, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tiga bidang ini masing-masing bidang memiliki dua seksi.

Sekretaris Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, M.Nurdin, S.Sos, mengatakan, pada tahun 2017 ini dinasny memiliki beberapa program prioritas berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri. Salah satu program prioritas itu adalah merekam data seluruh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki KTP-Elektronik. “Sehingga tidak ada lagi warga Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki KTP-Elektronik tersebut, dan itu merupakan program utama dari pusat,” ungkapnya.

Hanya saja, kata M Nurdin, S.Sos, blanko KTP-Elektronik (KTP-El) belum tersedia sepenuhnya untuk masyarakat. Masyarakat yang ingin melakukan perekaman atau membuat KTP-EL sementara waktu diberikan surat keterangan yang berlakunya selama enam bulan.

“Kekosongan blanko KTP-Elektronik ini terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Kapuas Hulu,” kata M. Nurdin saat ditemui diruangan kerjanya.

M.Nurdin, S.Sos menjelaskan, masyarakat wajib melakukan perekaman KTP-Elektronik. Sebab itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, bagi yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, untuk segera melakukan perekaman data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.



M. Nurdin, S.Sos menambahkan, selain mengurus KTP-El, masyarakat juga harus membuat Kartu Keluarga (KK) dan Akte kelahiran. Dua adiminstrasi kependudukan ini sangat di perlukan untuk berbagai macam urusan. “Kami juga selalu sosialisasi ke lapangan, baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa serta dusun tentang pembuatan akte kelahiran, karena usia 0-18 tahun harus sudah memiliki akte kelahiran,” tuntasnya. **(Dok. KIP)**

**“KAMI JUGA SELALU SOSIALISASI KE LAPANGAN, BAIK PADA TINGKAT KECAMATAN MAUPUN TINGKAT DESA SERTA DUSUN TENTANG PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN, KARENA USIA 0-18 TAHUN HARUS SUDAH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN,”**



## PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TARGET 2017



Dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati Kapuas Hulu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah kemudian tugas pembantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tiga bidang, tujuh seksi dan satu sekretariat. Salah satu bidang di dinas ini adalah Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kepala Bidang PPLH, Aspiyansah, ST, mengatakan, saat ini yang terkendala adalah masalah persampahan. Kabupaten Kapuas Hulu belum mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Adapun TPA yang selama ini digunakan itu menumpang ditempat pembuangan sampah umum yang berada di daerah Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara. “Untuk mengatasi hal tersebut, rencana kegiatan untuk tahun 2017 ini adalah pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang direncanakan berlokasi di daerah Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan,” ucapnya. Kendala yang kedua adalah fasilitas penunjang kegiatan seperti kendaraan/mobil pengangkut sampah yang sangat terbatas jumlahnya.

Namun yang terpenting, kata Aspiyansah, ST masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan rumahnya masing – masing dan jangan membuang sampah sembarangan. “Karena itu akan berdampak buruk bukan hanya untuk kita sendiri akan tetapi untuk anak cucu kita kedepannya,” kata Aspiyansah, ST.



Sebagai tambahan, Aspiyansah, ST menjelaskan Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dibagi lagi kedalam tiga seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Program prioritas yang sudah ditentukan adalah pemantauan kualitas air dan kualitas udarayang masuk pada Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup. (Dok. KIP)

## DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU PADA TAHUN 2017 MEMPRORITASKAN PEMELIHARAAN TAMAN SEBAGAI PENUNJANG RUANG TERBUKA HIJAU

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi sesuai dengan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, maka beberapa tugas pokok dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan dan air minum;
2. pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan dan air minum;
3. pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
5. pelaksanaan tugas lain yang di serahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain :

1. Program yang pertama adalah Program Pelayanan Administrasi perkantoran;
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. program peningkatan disiplin aparatur;
4. program fasilitas pindah /purna tugas PNS;
5. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan;
7. program penyediaan dan pengolahan air baku;
8. program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah;
9. program pembangunan insfrastruktur perdesaan;
10. program pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum;
11. program pengelolaan pertamanan dan kebersihan kota;
12. program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan .

Gaudensius Boni, S.Kom,M.A.P, Kasubbag Program pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa diantara beberapa program prioritas tersebut yang menjadi program paling prioritas dan utama adalah lebih ke indikator yang akan dinilai pada tiap tahunnya pada pelaporan tahunan, yaitu lebih kepada pendataan aset SKPD, keikutsertaan pada diklat resmi dari kementerian serta meningkatkan keberlanjutan ketersediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini lebih mengacu kepada penduduk yang menggunakan air bersih dan penduduk yang bersanitasi layak. Selanjutnya pengelolaan taman sebagai penunjang ruang terbuka hijau serta pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan.



Kasubbag Program pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, yang biasa disapa dengan nama sapaan Boni saat ditemui di ruangan kerjanya belum lama ini mengatakan, bahwa kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya berbentuk fisik belum berjalan karena masih dalam proses lelang dan survey, dan realisasi anggaran dan fisik pada triwulan pertama baru mencapai 1,24 % per 28 Februari 2017, dan pada bulan maret belum diketahui hasil kegiatan yang dilaksanakan karena kegiatan masih terus berjalan.



Untuk hambatan dan rintangan selama melaksanakan proses kegiatan pada triwulan pertama, beliau mengatakan karena kegiatan yang berbentuk fisik belum berjalan, jadi selama triwulan pertama belum ditemukan titik atau tingkat kesulitan, hambatan dan tantangan dari beberapa program pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terkait dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kasubbag Program ini menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih bersabar dengan program yang sudah diusulkan tetapi belum bisa terealisasi pada tahun 2017 ini, karena harus melalui beberapa proses dan survey, dimana daerah yang benar-benar memerlukannya. (Dok.KIP)

## POTENSI INDUSTRI OLAHAN MASYARAKAT HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK

Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapuas Hulu menjadi salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SPOPD) yang baru terbentuk di 2017. SOPD dinas ini mempunyai satu sekretariat dengan 3 kasubag dan 3 dibang dengan masing-masing memiliki 2 seksi.

Pada dinas ini Perindustrian menjadi bidang kerja utama. "Bidang perindustrian baru bergabung di skpd ini. Secara publik kita juga ingin masyarakat tahu fungsi dari skpd ini," ujar staff Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapuas Hulu.

Dia menjelaskan bidang perindustrian di Kapuas Hulu memiliki banyak potensi. Seperti hasil olahan ikan yang memang jadi produk rumahan. "Banyak yang bisa diolah dari ikan, bisa jadi kerupuk basah, kerupuk ikan kering dan sosis," tuturnya.

Untuk memaksimalkan industri ikan, kata dia, butuh keterpaduan antar SKPD. Secara aturan dinas perikanan di pembudiayaan ikan, dinas perindustrian mengolahnya, kemudian dinas perdagangan memasarkannya. "Ini memang seharusnya bisa satu skpd saja, jadi bisa konek," paparnya. Dia menjelaskan sejauh ini baru kerupuk kering dan kerupuk basah yang sudah mencapai pemasaran keluar daerah.

Industri rumahan lainnya adalah tenun. Industri kerajinan ini memang perlu diperhatikan. "Seperti di Jogja, kerajinan bisa jadi oleh-oleh," Kapuas Hulu juga harusnya bisa demikian, harus cinta produk sendiri. Apalagi kain tenun laku diluar daerah bahkan di Malaysia kain ini dicari-cari.

Kedepan harus ada inovasi mengembangkan kerajinan berupa diversifikasi ke kotak tisu dan tas. "Cuma kendala kita hasil kerajinan ini relatif mahal jualnya karena jarak kita jauh dari tempat beli bahan baku, pengrajin juga mempertimbangan waktu dan tenaga yang sudah keluar. Disisi lain penampung hasil buatan masyarakat juga tidak ada," paparnya.

Kalau melihat dari jumlah masyarakat dengan hasil produk yang tergarap, memang belum banyak. Selain olahan ikan dan kerajinan, baru madu dan mokaf yang sudah tergarap. "Kalau mokaf dibuat tapioka saya rasa akan laku. Tapi produk ini berpengaruh pada mikroba, jadi tidak tahan lama," tutupnya. (Dok.KIP)



## 12 PROGRAM PRIORITAS BERKELANJUTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai dua belas program layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Keduabelas jenis layanan standar pelayanan minimal ini merupakan program prioritas pencapaian SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan, di tambah lagi dengan beberapa program yang masih berjalan dan dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

Dua belas program standar pelayanan minimal tersebut antara lain:

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang dengan TB;
12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

Utin Darmiariani, S.E staf pengelola program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, selain kedubelas program capaian standar pelayanan pada bidang kesehatan tersebut masih ada lagi penambahan program prioritas pada tahun 2017, yakni akreditasi puskesmas dan pembangunan/rehab puskesmas dibeberapa kecamatan wilayah perbatasan, yaitu Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana yang masih berjalan permbangunanya, sedangkan untuk progres realisasi anggaran dan kegiatan pada Dinas Kesehatan sampai dengan saat ini telah mencapai 8, 24 %.

Disingung masalah hambatan dan tantangan terkait dengan kegiatan yang menjadi prioritas dan kegiatan yang sedang berlangsung pada triwulan pertama maupun selanjutnya, Utin Darmiariani, selaku staf pengelola program mengatakan belum mendapat laporan tentang hambatan dan keluhan dari beberapa rekan dilapangan dan keadaan sampai sekarang masih lancar dan teratasi .

Saat di temui di ruang kerjanya belum lama ini , Sekretaris Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Gunawan, S.Sos mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu .



Terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut , Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 ini menjadi tipe A, dengan struktur dinas memiliki empat bidang dan satu sekretariat. Pada kesempatan wawancara akhir, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu menghimbau kepada semua kalangan masyarakat untuk mewaspadai munculnya kasus penyakit menular dengan cara tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mendapat keluarga yang sehat, dan jangan biarkan jenis-jenis penyakit tidak menular menjadi trend, cegah dengan hidup bersih dan sehat (PHBS).**(Dok.KIP)**

## WAJAH BARU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 secara resmi berdiri sendiri setelah beberapa tahun kebelakang dimerger dengan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dengan wajah baru ini, diharapkan peran Kominfo sebagai unit kerja yang menangani tupoksi penyebaran informasi, penyerapan, pengelolaan opini publik, dokumentasi kegiatan pemerintahan secara komprehensif serta urusan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan secara optimal.



**Gedung LPSE Kapuas Hulu**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dibagi menjadi 1 Sekretariat, 2 Bidang dan 1 UPT.

Untuk Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) sendiri, pada tahun 2017 masih melanjutkan kegiatan yang telah dirancang pada tahun sebelumnya, antara lain : pengelolaan LPPL Radio Rasika, Publikasi dan Dokumentasi, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Pertunjukan Tradisional (METRA).



**Gedung Radio Rasika 103.4 FM**

Menurut Kabid. KIP “ tahun ini kita masih menjalan kegiatan secara reguler, namun hanya menambahkan beberapa konsep tambahan dalam setiap kegiatannya,”. seperti kegiatan penerbitan Buletin Uncak Kapuas, pada terbitan 2017 ini, tata letak berita dibagi kedalam 3 kolom berita, antara lain : agenda pimpinan daerah, liputan OPD dan informasi umum seputar kapuas hulu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memilih tema berita yang ingin diketahui.





Ditambahkan oleh beliau bahwa, kolom yang baru dalam buletin ini adalah liputan OPD, dimana pada kolom berita ini Diskominfo Statistik langsung mengambil berita dalam bentuk interview ke semua OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Disampaikan oleh beliau “ masih ada beberapa kendala untuk pengisian kolom berita ini, baik itu faktor internal maupun eksternal, dan hal ini menjadi evaluasi kami untuk penerbitan pada edisi selanjutnya” ungkapnya.



**Gedung Data Centre Kapuas Hulu**

Untuk kegiatan lain, seperti pembinaan KIM, pada tahun ini sebenarnya hanya berfokus pada pembinaan kelompok yang telah terbentuk sebanyak 14 KIM se-Kapuas Hulu. Menurut Kabid KIP “ kita ingin kelompok yang sudah ada dibina terlebih dahulu secara mapan, untuk pembentukan kelompok baru hanya pada beberapa daerah yang masuk dalam program pengembangan wilayah tertentu seperti P2WKSS atau sejenisnya.”

Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan LPPL Radio Rasika, masih dilaksanakan seperti biasa, hanya saja pada tahun 2017 ini kami lebih mendorong setiap OPD yang memiliki tupoksi pelayanan publik untuk dapat berkontribusi dalam pembuatan iklan layanan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapat informasi terkait layanan publik.

Untuk kegiatan pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informasi (SAI) pada tahun ini masih pada pengusulan BTS dan internet desa. Seperti yang disampaikan oleh Kabid SAI, “ pada tahun ini kita mengusulkan ke kementerian melalui dana APBN sebanyak 54 BTS dan 30 Internet Desa, untuk berapa yang menjadi realisasi semua tergantung pada pihak kementerian karena program bantuan ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia.”. Selain pengusulan perangkat telekomunikasi, Kasi Aplikasi Informatika juga menyampaikan “ bahwa pada tahun ini kita akan coba untuk implementasi SIMAYA atau sistem informasi kantor maya, dengan pilot project pada Dinas Kominfo sendiri.”. Harapannya apabila project ini berhasil, maka selanjutnya akan direkomendasikan ke semua OPD untuk menggunakan SIMAYA agar pelaksanaan administrasi perkantoran lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk kegiatan pada seksi Statistik, masih melanjutkan penerbitan buku Data Pokok Kapuas Hulu sebagai sumber informasi data sektoral pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. **(Dok.KIP)**



## KEJARI PUTUSSIBAU ADAKAN SEKOLAH ANTI KORUPSI DI KECAMATAN MENTEBAH

Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau melaksanakan sekolah anti korupsi kepada aparat-aparat Desa se-Kecamatan Mentebah, Kamis (19/1). Sekolah anti korupsi itu adalah bentuk pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum). "Kami laksanakan kegiatan ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung RI melalui Gerakan Langsung Anti Korupsi," kata Acep Subhan, Kasi Intelijen Kejari Putussibau, Jumat (20/1).

Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Putussibau kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum seperti ini sudah aktif sejak lama, sebelumnya ada kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta penyuluhan Hukum di beberapa Desa di Kapuas Hulu. Sedangkan untuk kegiatan kali merupakan upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi yang rentan terjadi terutama yang berkaitan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar. "Sasaran dalam kegiatan ini adalah aparat Desa se Kabupaten Kapuas Hulu yang akan di pusatkan penyuluhannya di setiap Kecamatan,".

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Putussibau menambahkan, sosialisasi kegiatan anti korupsi ini selain di kecamatan Mentebah sudah dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara dan Kalis. Dengan melibatkan aparat desa yang ikut dalam sosialisasi tersebut. "Untuk kegiatan di Kecamatan Mentebah diikuti sebanyak 50 orang peserta dari aparat desa.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Putussibau mengharapkan kedepannya dalam kegiatan ini, dapat bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan bagian pemerintahan Setda Kapuas Hulu, karena melibatkan camat dan kepala Desa. "Selain itu dari 23 kecamatan sudah bersedia diantaranya, Kecamatan Empanang, Embaloh Hilir, Pengkadan, dan Boyan Tanjung,".



Bagi kecamatan yang mau dilaksanakan kegiatan ini kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Putussibau, silahkan SMS ke CENTRE 0811-5678-765. Dimana pihaknya ingin adanya sikap pro aktif dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mengawasi penggunaan dana ADD serta segera melaporkan kepada aparat terkait

"Jika di temukan adanya dugaan penyelewengan Dana ADD/DD oleh aparat Desa di Kapuas Hulu, segera melaporkan ke kami. Selain itu untuk mengawasi penggunaan dan pertanggung jawaban ADD, kami berkeinginan untuk mengoptimalkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)." (Dok.KIP)

**“ JIKA DI TEMUKAN ADANYA DUGAAN PENYELEWENGAN DANA ADD/DD OLEH APARATUR DESA DI KAPUAS HULU, SEGERA MELAPORKAN ”**

**BAGI KECAMATAN YANG MAU DILAKSANAKAN KEGIATAN INI  
KATA KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU,  
SILAHKAN  
SMS KE CENTRE 0811-5678-765**



## QORI-QORIAH KAPUAS HULU DI HARAPKAN MAMPU KE STQ NASIONAL

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, S.H. menutup acara Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat kecamatan Hulu Gurung di Depan Kantor Camat Kecamatan Hulu Gurung Desa Tepuai, Minggu (29/01) Pukul 20.00 wib. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan agar dari seleksi STQ di Kecamatan Hulu Gurung tersebut ada Qori dan Qoriah yang mampu menembus STQ tingkat Provinsi maupun Nasional. "Kami ingin kedepannya dari Kecamatan Hulu Gurung ini ada qori-qoriah yang bisa masuk ke tingkat Provinsi dan Nasional, agar mengharumkan nama daerah Kapuas Hulu,".

Bupati Kapuas Hulu berharap agar hasil dari seleksi STQ di Kecamatan Hulu Gurung dapat dipersiapkan dengan baik. Untuk mengikuti lagi seleksi STQ tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut Bupati Kapuas Hulu, kegiatan keagamaan seperti STQ sangat penting. Sebab dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman tentang keagamaan, terutama para generasi muda sehingga dapat membentengi mereka dari segala bentuk perbuatan yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas, narkoba dan segala bentuk kenakalan remaja lainnya.

Sementara itu Camat Hulu Gurung, Drs. Baharudin mengatakan, masyarakat sangat menyambut baik serta sangat antusias dengan adanya kegiatan STQ, sehingga masyarakat berpartisipasi dengan mengikut sertakan putra-putri mereka dalam kegiatan tersebut.

**"AGAMA SANGAT  
PENTING BAGI REMAJA  
KITA, OLEH KARENA  
ITU KEDEPAN  
PEMBINAAN  
KEAGAMAAN HARUS  
TERUS DITINGKATKAN"**

"Saya mewakili masyarakat Hulu Gurung mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bupati Kapuas Hulu beserta rombongan,". Kedepannya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan generasi Islami yang berprestasi demi mengharumkan nama Kecamatan Hulu Gurung, kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat.

"Agama sangat penting bagi remaja kita, oleh karena itu kedepan pembinaan keagamaan harus terus ditingkatkan,".

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu, H. Kusyairi mengatakan ada beberapa kecamatan di Kapuas Hulu yang banyak melahirkan generasi Islami yang berprestasi dalam hal keagamaan seperti kecamatan Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan, Bunut Hulu, Bunut Hilir dan Mentebah.

"Dari Hulu Gurung dan Jongkong sudah ada yang pernah mewakili Kalimantan Barat dalam cabang perlombaan musabakah tilawatil Quran dan Tahfiz Quran,"

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu, upaya yang dilakukan dalam melahirkan generasi islami yang berprestasi dalam hal keagamaan pihaknya melakukan pembinaan kepada para remaja baik melalui sekolah formal maupun non formal.

"Kalau untuk yang sekolah formal seperti SD dan Madrasah kami mewajibkan mereka mengaji Al-quran sebelum memulai pelajaran," untuk yang Non Formal seperti TBA, TPA, TPQ, Diniyah dan majelis taklim pihaknya secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. (Dok.KIP)

**"KEDEPAN KITA AKAN  
MENGALAKKAN KEGIATAN  
GEMAR MAGRIB MENGAJI,  
TUJUANNYA AGAR TUMBUH  
QORI-QORIAH YANG  
BERKUALITAS".**

## PEMBANGUNAN JEMBATAN MUPA KEMBALI DILANJUTKAN

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berusaha melakukan peningkatan infrastruktur daerah, baik itu jalan maupun jembatan. Untuk tahun 2017 ini, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu setempat sudah merencanakan untuk membangun kembali jembatan rangka baja dusun Mupa di kecamatan Putussibau Utara, jembatan Mandai menuju Kecamatan Embaloh Hilir dan akses darat menuju kecamatan Bunut Hilir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, Ana Mariana, S.T.,M.M. mengatakan pihaknya sengaja melanjutkan kembali jembatan Mupa agar dapat memperlancar akses antara dari desa Pala-Pulau ke Desa Sambus dan beberapa Desa lainnya. Hal tersebut juga sudah menjadi harapan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan sejak lama. “Jadi tahun ini jembatan Mupa itu dilanjutkan lagi. Nanti kita beli rangka dan pasang,” tuturnya, Selasa (31/1).

Untuk pendanaan jembatan tersebut, menggunakan dana Kabupaten Kapuas Hulu, bukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nantinya akan ada lelang untuk pembangunan jembatan tersebut. “Pembangunan ini memang sudah komitmen dari Bupati Kapuas Hulu, supaya itu jembatan cepat selesai dan tidak terbengkalai,” sambung Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.



Progres pembangunan jembatan Mupa memang panjang. Untuk tahun lalu pembangunan jembatan tersebut sempat terkendala untuk pembuatan tiang tengah, sebab pengerjaan dari pihak ketiga tidak sesuai dan sudah putus kontrak. Mereka yang bertanggungjawab juga sudah kena denda. “Kami ambil tindakan tegas ini karena ingin jembatan itu terbangun sesuai harapan,” tegasnya.

Selain jembatan Mupa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan tahun ini pihaknya juga akan membangun jembatan Mandai. Jembatan Mandai tersebut adalah objek vital untuk menghubungkan akses darat ke Kecamatan Embaloh Hilir, sehingga masyarakat disana bisa menggunakan jalur darat untuk keluar daerahnya. “Demikian juga pembangunan akses darat menuju Kecamatan Bunut Hilir tetap kami lanjutkan. Kita ingin jalur itu dapat dilalui masyarakat dengan baik,” tutupnya. (Dok.KIP)

**“ JADI TAHUN  
INI JEMBATAN  
MUPA ITU  
DILANJUTKAN  
LAGI ”**

**“KAMI AMBIL TINDAKAN  
TEGAS INI KARENA INGIN  
JEMBATAN ITU  
TERBANGUN SESUAI  
HARAPAN”**



## MASYARAKAT KELIBANG MINTA DI BANGUN SARANA TELEKOMUNIKASI (BTS)



Akses telekomunikasi di desa Kelibang, Kecamatan Bunut Hulu hingga saat ini masih belum memadai. Masyarakat desa Kelibang sangat kesusahan mendapatkan jaringan telepon untuk berkomunikasi itu, masyarakat Desa Kelibang mengharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat membantu masyarakat Kelibang untuk mengusulkan pembangunan sarana Telekomunikasi (BTS) ke Kementerian Kominfo RI.

Kepala Desa Kelibang, Kecamatan Bunut Hulu, Yusuf Basuki mengharapkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia dapat membantu membangun sarana telekomunikasi (BTS) untuk masyarakat di Desanya. "Kami lihat di lintas utara sudah banyak dibangun, lintas selatan juga ada satu. Dari itu kami juga berharap di Desa kami bisa dibangun Tower serupa," katanya saat ditemui di Putussibau, Rabu (1/2).

Menurut Kepala Desa Kelibang, dirinya sudah sempat mengusulkan pembangunan Tower Telekomunikasi (BTS) ke Kementerian Kominfo RI melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, di tahun 2015. Namun usulan tersebut belum terealisasi di tahun 2016 lalu. "Kami berharap 2017 ini Desa kami bisa dapat pembangunan Tower tersebut.

Kepala Desa Kelibang Yusuf Basuki menegaskan, masyarakat di desa Kelibang sangat mengharapkan di bangunnya Tower untuk sarana Komunikasi, karena jaringan telepon di Desa tersebut belum memadai. bahkan masyarakat di Desa Kelibang sudah menyiapkan lahan untuk lokasi pendirian Tower. "Lahan sudah ada kami siapkan, tinggal Pemerintah bangun saja,". (Dok.KIP)

**"KAMI BERHARAP  
2017 INI DESA KAMI  
BISA DAPAT  
PEMBANGUNAN  
TOWER"**

**"LAHAN SUDAH ADA KAMI  
SIAPKAN, TINGGAL PEMERINTAH  
BANGUN SAJA"**

## SEKERTARIS DAERAH MINTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) VALIDKAN LPPD TAHUN 2016



Memasuki tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ada yang berubah nama, bergabung bahkan dihapuskan. Memperhatikan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ir. H Muhammad Sukri mengingatkan agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 lalu dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat terkait, dan diselesaikan dengan data yang valid.

“Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama harus tetap bertanggungjawab terhadap penyiapan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 tersebut. Selain itu diharapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memonitor dan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya dan valid per 30 Desember 2016,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pada acara Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (2/2).

Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pilihan dan urusan wajib, elemen data yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus telah didukung dengan data yang memadai dan tanpa ada koreksi. Kemudian pelaksanaan kebijakan administrasi umum juga demikian, telah didukung dengan rincian data yang memadai.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu rapor pemerintah daerah, karenanya semua unsur dilingkungan Pemda Kapuas Hulu harus menjaga agar rapor pemda tetap bernilai baik. “Daftar isian harus benar, valid dan tepat waktu,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2016 LALU DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT TERKAIT

Untuk hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kapuas Hulu tahun 2015 lalu oleh Tim Nasional, evaluasi meliputi kesesuaian materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 3 Tahun 2007 dan tingkat capaian kinerja. Baik pada tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan maupun urusan pemerintahan. (Dok.KIP)

## PP (PERATURAN PEMERINTAH) NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA

“DAFTAR ISIAN HARUS BENAR, VALID DAN  
TEPAT WAKTU”



## MASALAH PERIZINAN GALIAN C BERESIKO HAMBAT PEMBANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mewacanakan untuk membentuk tim pendamping untuk TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kapuas Hulu. Salah satu dari fokus tim pendamping TP4D ini adalah menuntaskan masalah perizinan galian C yang ada di Bumi Uncak Kapuas. Sebab masalah perizinan tersebut beresiko menghambat program pembangunan infrastruktur yang telah tersusun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri menjelaskan adanya Tim pendamping TP4D ini adalah untuk koordinasi tentang hukum. Supaya bentuk-bentuk pembangunan daerah bisa dapat diperjelas kepada aparat hukum, khususnya saat ini tentang bidang pertambangan. "Sebab dalam hal pertambangan ini, seperti galian C, sudah jadi wewenang Provinsi," ujarnya, usai rapat pembentukan tim pendamping TP4D Kapuas Hulu.

Pemkab Kapuas Hulu sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, berdasarkan koordinasi itu, kementerian terkait menegaskan semua galian C harus kantong izin. Ada juga penjelasan kalau Gubernur bisa melimpahkan izin untuk tambang dengan luasan dibawah 5 Hektare kepada Bupati setempat. "Dari Kementerian ESDM juga sudah dikonsultasikan, ini satu kubik pun harus ada Izin," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk proses Izin tambang saat ini, dari pertambangan daerah mengusulkan dulu ke Gubernur, baru ajuan tersebut turun ke dinas teknis terkait untuk dibahas. Setelah itu, lanjutnya, baru naik lagi ke gubernur untuk persetujuan. Proses ini memang agak rumit. "Sementara perizinan galian C itu perlu segera diselesaikan, agar pembangunan di Kapuas Hulu tidak stagnan (diam ditempat),".

Oleh sebab itu, dari tim pendamping akan berkoordinasi masalah pertambangan galian C tersebut kepada tim inti TP4D Kapuas Hulu yang sudah dibentuk Kejaksaan Negeri Putussibau. Kemudian, Tim pendamping akan jajaran Legislatif setempat untuk melakukan audiensi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk menyampaikan permasalahan yang ada baik itu tentang galian C atau pun hal lain yang mengait ke pemerintah provinsi. "Dalam Tim pendamping TP4D ini semua SKPD juga akan terlibat, sebab tim ini tidak sekedar menyangkut pembangunan atau tambang saja. Ada juga terkait administrasi dan sebagainya," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sementara itu Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, Nusantara Gawat menjelaskan, permasalahan perizinan galian C ini memang bisa menjadi kendala untuk proses lelang dan pelaksanaan paket pembangunan infrastruktur, sebab pasti menggunakan materil galian C. Jadi, masalah perizinan galian C ini harus cepat diselesaikan. "Dari tahun 2015 memang banyak juga kontraktor yang memproses izin galian C itu, tapi masih ada yang tersisa dan sedang proses Izinya, sekarang sudah di Provinsi semua," tuturnya.

Kalau izin tambang yang di bawah 5 Ha bisa dilimpahkan ke Bupati, menurut Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, itu dapat mempermudah proses izin pertambangan di daerah. Namun hal tersebut perlu juga diperjelas, sehingga kata dia tidak ada permasalahan hukum yang akan menggait nantinya.

Kabag Hukum Setda Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau juga menambahkan, Pemkab Kapuas Hulu melalui tim pendamping TP4D memang perlu audiensi ke Gubernur, supaya bisa menyampaikan permasalahan yang ada di Kapuas Hulu, terkait galian C. " Dari audiensi itu mungkin ada jalan keluar dari pemerintah provinsi untuk permasalahan ini," tutupnya.

Rapat Tim pendamping TP4D Kapuas Hulu melibatkan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab setempat. Tim pendamping tersebut dibentuk untuk bersinergi dengan tim inti TP4D Kapuas Hulu yang di leading sektori oleh Kejaksaan Negeri Putussibau. **(Dok.KIP)**

**IZIN TAMBANG YANG DI BAWAH 5 HA BISA DILIMPAHKAN KE BUPATI**



## DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TES 637 PELAMAR TENAGA KONTRAK



Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan test untuk penerimaan tenaga kontrak baru tahun 2017, di gedung Indoor Putussibau, Rabu (8/2) pagi. Terdapat 637 pelamar yang mengikuti test tersebut. Pelaksanaan test itu sendiri mendapatkan pengawasan langsung dari Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Satpol PP setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dr. H. Harisson, M.Kes menuturkan, peserta yang ikut tes tenaga kontrak kesehatan hari ini harusnya berjumlah 648 orang. Namun, kata dia ada 11 peserta yang tidak hadir, sehingga yang ikut tes hanya 637 orang. "Mereka yang 11 tidak ikut tes itu otomatis gugur," ucapnya, sembari mengawasi pelaksanaan test tenaga kontrak. Tes tenaga kontrak tersebut, dibagi menjadi dua tahap, yaitu tes tertulis dan wawancara. Untuk tes tertulis saat ini, menurutnya memang soal terstandar dari Kementerian Kesehatan. Ada tes intelegensi umum sebanyak 25 soal, penalaran logis sebanyak 25 soal, kemampuan bidang sebanyak 50 soal. "Setelah tes tertulis ini akan dilanjut wawancara," terangnya. Sedangkan pada tes wawancara nanti, menurut Kepala Dinas Kesehatan pihaknya akan melihat sisi motifasi dan keseriusan kerja dari para pelamar ketika bertugas di daerah terpencil. Sebab posisi yang dicari dalam tes ini banyak yang ditempatkan di puskesmas daerah terpencil. "Untuk penilaian nanti ada rumusan sendiri dari kami, ini merangkum tes tertulis dan wawancara," tukasnya.

Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dari 637 peserta yang ikut tes kali ini, hanya dicari 124 orang saja untuk tenaga kontrak baru. Ini mencakup dokter, perawat dan bidan, gizi, farmasi dan lainnya. "Untuk penerimaan tenaga kontrak baru ini, kami memang utamakan pelamar dari daerah setempat. Hanya saja kita lihat kembali lagi dari pelamarnya, ada atau tidak di daerah itu," ujarnya. Selain tenaga kontrak yang baru ini, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan tes untuk tenaga kontrak yang lama, sebanyak 115 orang.

"Jadi total tenaga kontrak tahun ini ada 239 orang," terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan kebutuhan daerah, rekrutmen tenaga kontrak di tahun 2017 belum menutupi kekurangan tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan Kapuas Hulu masih membutuhkan 558 orang tenaga kesehatan lagi, dan perhitungan kebutuhan tenaga medis ini sesuai standar dari Kemenkes. "Kapuas Hulu ini masih butuh banyak. Kalau memang anggaran ada misal dari APBN, tahun depan bisa kita tambah lagi tenaga kontraknya. Tapi menurut saya akan lebih baik lagi kalau ada buka penerimaan ASN tenaga medis," tutupnya.

Salah satu pelamar tenaga kontrak baru Dinkes Kapuas Hulu, Anggelina Lilivera mengaku kesulitan mengerjakan soal tes. Namun ia berharap tetap dapat diterima oleh Dinkes Kapuas Hulu. "Harapan saya semoga lulus dan bisa terima saja, penempatan terserah dimana," ucap Perwat DIII, lulusan Stikes PHI Jakarta tahun 2010 ini. Anggelina mengaku, sebelum ikut tes ini, dirinya sempat honor di Puskesmas kecamatan Bika pada tahun 2011. Namun pekerjaannya tersebut terpaksa diputus karena keterbatasan anggaran di Puskesmas terkait. "Ini motivasi saya ikut kontrak kali ini. Supaya bisa layani masyarakat lagi," tuntas perempuan asal Desa Bika ini.

Sementara itu salah seorang dokter muda yang juga ikut tes tersebut, Haviz Saifulah mengungkapkan, dirinya siap mengabdikan diri kepada masyarakat Kapuas Hulu, apabila diterima sebagai dokter kontrak daerah. "Saya akan tetap bertugas sesuai kompetensi. Secara pribadi kalau pun tugas di pedalaman itu tidak bermasalah, walau pun harus melayani masyarakat di daerah danau saya siap," tegas dokter umum lulusan tahun 2016 ini. (Dok.KIP)

**TOTAL TENAGA KONTRAK  
TAHUN INI ADA 239 ORANG**



## KINI SATPOL PP MERANGKAP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bertambah. Jika pada umumnya Satpol PP sebagai aparaturnya penegak peraturan daerah, kini mereka ngerangkap menjadi petugas penanggulangan bencana termasuk juga petugas pemadam kebakaran.



Sekertaris Satpol PP Kapuas Hulu, Abang Sudarmo, S.Sos menjelaskan, seiring dengan perombakan nomenklatur pemerintahan Kapuas Hulu, tanggung jawab Satpol PP bertambah. Selain menangani damkar, juga menangani penanggulangan bencana daerah. "Jadi sekarang kami ada bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Disitu ada dua seksi, pertama penanggulangan bencana dan kebakaran, kedua seksi linmas," ujarnya di Indor Putussibau, Rabu (8/2).

Seiring bertambahnya tugas, beberapa fasilitas juga bertambah, khususnya untuk fasilitas penanggulangan bencana. "Kalau mobil damkar memang tetap jumlahnya seperti kemarin. Kalau fasilitas penanggulangan bencana, ada sebagian yang sudah dialihkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Hulu yang kini kontornya sudah merger. Ada tenda, mobil, perahu karet yang saat ini lagi kami lakukan pendataan aset," tutur Sekertaris Satpol PP Kapuas Hulu.

Terkait dengan jumlah personil, SKPDnya juga mendapat penambahan Aparatur Sipil Negara. Para ASN tersebut berasal dari SKPD yang sudah di merger atau di hapus, beberapa waktu lalu. "Personil memang kebanyakan adalah pindahan kantor BPBD yang sudah merger,".

Untuk peningkatan kapasitas personil Satpol PP dalam penanganan kebakaran dan bencana alam, Sekertaris Satpol PP Kapuas Hulu memastikan akan ada upaya pelatihan terhadap personilnya. Akan tetapi, pihaknya belum menentukan jadwal tetap. "Mungkin untuk pemantapan pelatihan personil kami di tahun 2018, sebab tahun ini kami belum bisa sesuaikan di anggaran," tutup Sekertaris Satpol PP Kapuas Hulu. (Dok.KIP)

**“SELAIN MENANGANI DAMKAR, JUGA MENANGANI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH”**

## PEMKAB KAPUAS HULU ANGGARKAN RP 9 M UNTUK BANGUN MESS

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menambah PAD tersebut, Pemerintah Kapuas Hulu akan pembangunan Mes Pemda. Dana sebesar Rp 9 Miliar pun telah disiapkan melalui APBD tahun 2017.

Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir, S.H. mengatakan, lokasi pembangunan Mess tersebut ada di kawasan rumah dinas DPRD sekitar jalan Rahadi Usman Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara. Untuk itu, aset rumah DPRD yang tidak difungsikan tersebut akan dirobohkan dan dibangun Mess. “Rumah dinas DPRD itu memang mulai dibongkar karena kita mau bangun Mess Pemda,” tutur Bupati Kapuas Hulu, Kamis (9/2).

Pemkab Kapuas Hulu sudah menyiapkan dana sebesar Rp9 miliar untuk membangun mess tersebut. Setelah jadi mess pemda ini akan dikelola langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. “Karena selama ini usaha BUMD itu belum ada, makanya kami ingin mengembangkan pembangunan mes atau penginapan ini,” ujar Bupati Kapuas Hulu.

Diakui Bupati Kapuas Hulu, ketika ada acara besar di Bumi Uncak Kapuas pihaknya kerap kesulitan untuk menempatkan tamu dari luar, sebab penginapan terbatas. “Kami ingin menyelesaikan masalah seperti itu, selain itu juga jika dilihat dari PAD nya ini lumayan besar jika dikelola dengan baik,” tuntasnya.

“ WACANA PEMBANGUNAN HOTEL DI AREAL RUMAH DINAS DEWAN TERSEBUT SEBENARNYA SUDAH LAMA YAKNI DARI TAHUN 2014 DAN BARU TEREALISASI PADA TAHUN 2017 INI ”

Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Ir. Istiwa, M.Si, membenarkan kalau lokasi rumah dinas DPRD Kapuas Hulu tersebut dibangun mes atau penginapan yang akan dikelola oleh perusahaan daerah. “Kami sudah beberapa kali rapat untuk kesepakatan pembangunan hotel ditempat tersebut,”.

Wacana pembangunan Hotel di areal rumah dinas dewan tersebut sebenarnya sudah lama yakni dari tahun 2014 dan baru terealisasi pada tahun 2017 ini. “Kamikan harus menyelesaikan dulu masalahnya baik itu masalah tanah dan lainnya. Tapi sekarang sudah selesai urusannya,” tuturnya.

Untuk aset bangunan yang sudah dirobohkan itu, tentunya akan dilelang, proses lelang tersebut tentunya pihaknya akan bekerjasama dengan pemilik sementara yakni Sekretariat Dewan.

Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kapuas Hulu,tidak menampik jika kondisi bangunan rumah dinas dewan tersebut dianggap masih layak untuk ditempati, namun karena kebijakan pemerintah, rumah tersebut harus dirobohkan dan diganti pembangunannya menjadi mess .”Saya disini hanya melanjutkan kebijakan pimpinan yang sudah disepakati,” tutupnya. (Dok.KIP)



**“KAMI KAN HARUS MENYELESAIKAN DULU  
MASALAHNYA BAIK ITU MASALAH TANAH DAN  
LAINNYA. TAPI SEKARANG SUDAH SELESAI  
URUSANNYA”**





## ALIANSI MASYARAKAT ADAT NASIONAL (AMAN) KAPUAS HULU USULKAN REKOMENDASI KE PRESIDEN, MINTA HAK KELOLA HUTAN

Baru-baru ini Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) cabang Kapuas Hulu menggelar seminar yang melibatkan jajaran Pemkab Kapuas Hulu, masyarakat adat, serta pihak-pihak yang terkait dengan tata kelola taman nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun.

Menurut Ketua Dewan Adat Dayak Kapuas Hulu, Agus Mulyana, M.H. kegiatan tersebut sangat positif, sebab lewat kegiatan musyawarah itu, dibahas juga tentang hutan adat serta hak-hak masyarakat adat, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012. “Keputusan itu memang perlu ditindaklanjuti, supaya masyarakat adat bisa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola hutan adatnya,” ungkap Agus Mulyana, M.H., Jumat (10/2).

## KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35 TAHUN 2012

Dijelaskan oleh Pak Agus Mulyana, M.H., sekitar 51,6 persen wilayah Kapuas Hulu terdiri dari kawasan taman nasional, hal ini pun menjadikan Kapuas Hulu sebagai Kabupaten konservasi. “Dari penetapan status ini harusnya ada kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan NGO setempat, supaya segala hal terkait kehutanan bisa terkordinasi secara baik,” tuturnya.

Selaku DAD, Agus Mulyana, M.H. mengaku pihaknya sangat mendukung kegiatan pembahasan hak-hak masyarakat adat terhadap kawasan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Semoga, kata Agus Mulyana, M.H., nantinya ada rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Kebetulan ada staf ahli presiden yang ikut pertemuan tersebut,” ucapnya.

Dengan adanya rekomendasi itu, Agus Mulyana, M.H. berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan kepada masyarakat adat yang ada di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan, hak-haknya dalam mengelola hutan itu sendiri. Diakui Agus Mulyana, M.H., kawasan taman nasional kerap menghambat upaya pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. “Kalau pun mau membangun di kawasan hutan itu, harus melalui proses pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Pak Agus Mulyana, M.H., sekitar 51,6 persen wilayah Kapuas Hulu terdiri dari kawasan taman nasional, hal ini pun menjadikan Kapuas Hulu sebagai Kabupaten konservasi. “Dari penetapan status ini harusnya ada kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan NGO setempat, supaya segala hal terkait kehutanan bisa terkordinasi secara baik,” tuturnya.

Selaku DAD, Agus Mulyana, M.H. mengaku pihaknya sangat mendukung kegiatan pembahasan hak-hak masyarakat adat terhadap kawasan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Semoga, kata Agus Mulyana, M.H., nantinya ada rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Kebetulan ada staf ahli presiden yang ikut pertemuan tersebut,” ucapnya.

Dengan adanya rekomendasi itu, Agus Mulyana, M.H. berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan kepada masyarakat adat yang ada di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan, hak-haknya dalam mengelola hutan itu sendiri. Diakui Agus Mulyana, M.H., kawasan taman nasional kerap menghambat upaya pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. **(Dok.KIP)**

## SEKITAR 51,6 % WILAYAH KAPUAS HULU TERDIRI DARI KAWASAN TAMAN NASIONAL

“Kalau pun mau membangun dikawasan hutan itu, harus melalui proses pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Prose pinjam pakai tersebut pun membuat kebutuhan-kebutuhan masyarakat jadi terkendala. Padahal, kata Agus Mulyana, M.H., masyarakat adat sudah lebih dahulu berada di dalam hutan, sementara penetapannya menjadi taman nasional adalah baru. “Hal yang diinginkan masyarakat dalam kawasan hutan itu adalah, segala sesuatu pembangunan yang sifatnya untuk kebutuhan mereka, jangan selalu dinyatakan tidak boleh dan tidak ada solusi. Kalau demikiankan justru tidak membangun masyarakat,” ucap Agus Mulyana, M.H..

Seperti untuk membangun tower telekomunikasi, kata Agus Mulyana, M.H., karena ada di kawasan hutan pembangunan tower itu pun terhambat. Sementara itu, tower itu pun adalah kebutuhan masyarakat di kawasan hutan tersebut. “Karena harus izin pinjam pakai pembangunan tidak jadi. Tentu sangat disayangkan, karena itu kebutuhan,” terangnya.

Begitu juga kalau mau mendirikan sekolah, kata Agus Mulyana, M.H., itu tentu harus ada sertifikat tanah syaratnya. Menurutnya, bagaimana masyarakat di kawasan hutan itu bisamendapatkan sertifikat tanah untuk bangun sekolah, sementara itu dikawasan taman nasional. “Harapan dari masyarakat adat, supaya aturan kehutanan yang ada dikoordinasi dengan baik, agar tidak saling bertentangan. Kalaupun ada prosesnya, seperti izin pinjam pakai, jangan dibuat rumit untuk masyarakat,” tutup pria yang pernah menjabat Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2010-2015 ini.



## MANFAATKAN ANGGARAN DESA UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA

Anggaran desa yang terdiri dari Anggaran Dana Desa (dari pemerintah daerah) dan Dana Desa (dari pemerintah pusat) terus bertambah beberapa tahun terakhir. Membengkaknya anggaran desa tersebut memberi banyak dampak positif dalam perkembangan pembangunan di tingkat desa, baik dari infrastruktur dasar hingga sarana kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Kepala Desa (Kades) Kelibang, Kecamatan Bunut Hulu, Yusuf Basuki mengatakan, besarnya anggaran desa memang beresiko bagi para Kades. Namun, jika dikelola dengan benar, kata dia dana tersebut akan sangat membantu pembangunan desa terkait. “Prinsipnya dana tersebut memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, kalau mikir individu tentu beresiko,” ujarnya.

Dari anggaran desa Kelibang tahun 2016 lalu, kata Yusuf Basuki dirinya berupaya merealisasikan sejumlah kebutuhan warga desannya. Adapun pendanaan tersebut ia arahkan untuk Pusat Kesehatan Desa, Pos Keamanan Keliling, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan peningkatan mutu jalan.

“Tahun kemaren kami ada bangun jalan gang di dalam desa dan jalan menuju ke tempat pemakaman umum, itu semua dari anggaran desa. Sudah juga kami anggarkan untuk speed 15 pk, itu untuk bawa orang sakit yang tidak bisa dibawa dari jalan darat, atau bawa jenazah untuk pemakaman karena lokasi TPU berseberang sungai dengan pusat desa,” terangnya. **(Dok.KIP)**

## ANGGARAN DESA KAMI RP 900AN JUTA DI TAHUN 2016

Menurut Yusuf Basuki, pihaknya tidak mengalami kendala dalam pemanfaatan dana desa. Sebab tinggal mengikuti aturan dan petunjuk teknis yang ada. “Anggaran desa kami Rp 900an juta di 2016. Tahun ini belum tahu saya,” ujarnya.

Untuk tahun 2017, kata Yusuf Basuki memang ada sejumlah pembangunan yang diprioritaskan lewat anggaran desa. Rencana pembangunan yang disusun adalah membuka jalan pertanian warga, dan juga membangun jaringan air bersih untuk semua penduduk desa.

“Kalau untuk PAUD tetap rutin dianggarkan karena ini wajib, mulai dari honor sampai operasional. Lokal PAUD kemaren dibangun baru satu dan sepertinya tidak cukup, jadi mau ditambah lagi. Termasuk juga puskesmas dan posyadu kita usahakan dibantu dari anggaran Desa, karena itu penting untuk kesehatan kami di kampung,” ujarnya.



## DINAS PERDAGANGAN PERSIAPKAN PASAR KEDAH UNTUK DIRESMIKAN

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu bakal melakukan sejumlah persiapan dan pembenahan di Pasar Kedah Indah, Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan. Pembenahan tersebut lantaran pasar kedah akan segera diresmikan oleh Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir, S.H.

Pembenahan pasar Kedah melibatkan tim dari kecamatan Putussibau Selatan serta kelurahan Kedamin Hulu. Sekertaris Dinas Perdagangan, Serli, Camat Putussibau Selatan, Salafudin dan Lurah Kedamin Hulu, Sabran pun meninjau langsung lokasi Pasar Kedah, Senin (13/2) pagi. Peninjauan itu untuk memantau kebutuhan pembenahan di pasar tersebut.

Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Ilhamsyah Ugen mengatakan, pasar Kedah akan dilakukan peresmian. Untuk itu, pihaknya akan melakukan rapat dengan calon pedagang yang akan menempati pasar tersebut. “Kami masih lakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk menentukan progres pemanfaatan pasar itu nanti,” ujarnya.

Tahun ini, kata Yusuf Basuki, desanya juga mendapat informasi dapat jatah bantuan mobil angkutan perdesaan dari Dinas Perhubungan. Namun, Yusuf Basuki mengatakan belum tahu tanggal pasti pemberian angkudes tersebut. “Ini yang juga masih kami tunggu,” ucapnya.

Terkait jaringan listrik ke desanya, Yusuf Basuki mengatakansaat ini baru ada pemasangan tiang saja. Belum ada jaringan kabel yang menghubungkan ke rumah-rumah warga. “Mungkin tahun ini bangun jaringan dan 2018 mungkinsudah bisa digunakan masyarakat,” kata dia. Desa Kelibang memiliki warga sebanyak 581 Jiwa. Desa ini terdiri dari dua dusun dan empat RT. Pekerjaan masyarakatnya mayoritas pada sektor pertanian dan perkebunan. “Desa kami dari pusat Kecamatan sekitar 20 Km,” tutupnya.

Kabid Perdagangan menjelaskan, pihak Kelurahan Kedamin Hulu sudah diminta segera menginventarisir para pedagang yang siap menempati pasar Kedah. Dari informasi yang diterima oleh Kabid Perdagangan, jumlah calon pedagang yang mendaftar sudah mencapai puluhan pedagang.

Ditambahkannya, setelah diresmikan sistem beroperasinya pasar Kedah nanti masih bersifat uji coba. Kemudian terkait penarikan distribusi nantinya diserahkan ke Kecamatan setempat mengelolanya. “Kita uji coba, sambil penyesuaian,” ucapnya.

Dari sisi kesiapan fasilitas, Kabid Perdagangan memastikan pasar Kedah siap ditempati, terutama instalasi listrik dan air yang sudah terpasang dan siap pakai. Sehingga pedagang tidak perlu khawatir masalah listrik dan air bersih disana. “Untuk menjamin pasar Kedah aman dari gangguan pengrusakan dan sebagainya, ada Satpam yang ditugaskan untuk penjagaan dilingkungan pasar Kedah,” ujarnya.

Camat Putussibau Selatan, Ahmad Salafudin menjelaskan, sambil melakukan persiapan pasar Kedah, pihaknya akan melakukan rapat tim terlebih dahulu. Menurutnya semakin cepat pasar ini difungsikan justru makin bagus karena bisa meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Namun, dalam pengaturan bagi pedagang yang berjualan itu harus benar-benar diatur, jangan sampai campur aduk. “Jual daging jangan bercampur dengan pedagang yang berjualan sayur, apalagi bergabung dengan penjual pakaian,” tegasnya.

Lanjutnya, pengoperasian pasar Kedah ini akan diuji coba terlebih dahulu selama satu bulan sambil melihat perkembangan yang ada sehingga pihaknya bisa mengevaluasi mana kekurangan yang perlu diperbaiki. Ditambahkan Sabran Lurah Kedamin Hulu mengungkapkan, bahwa pasar Kedah ini memang lebih diprioritaskan untuk masyarakat Putussibau Selatan. “Hingga hari ini sudah ada 75 calon penghuni pasar yang akan menempati lapak maupun kios. Jumlah ini akan terus bertambah,” ujarnya.

Meskipun memprioritas pedagang yang ada di Putussibau Selatan, pihaknya juga menampung pedagang yang berjualan di Pasar Pagi Kota Putussibau, karena pihaknya tidak mau membatasi jumlah pedagang. “Hingga saat ini kita belum tahu siapa yang akan menempati lapak maupun kios yang sudah ada tersebut, karena sistemnya nanti akan dicabut undi siapa yang berhak menempatinnya,” tuturnya. **(Dok.KIP)**





## IZIN PINJAM PAKAI UNTUK JALAN DI HULU KAPUAS SUDAH KELUAR

Desa-desa di perhuluan sungai Kapuas di kecamatan Putussibau Selatan masih terisolir karena akses darat menuju desa-desa tersebut belum terbangun oleh Pemerintah dan akses yang ada saat ini hanya transportasi air. Terkendalanya pembangunan akses darat ke desa perhuluan sungai Kapuas, salah satunya Desa Tanjung Lokang, lantaran masuk kawasan hutan, sehingga butuh izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Baru-baru ini izin tersebut dikabarkan sudah diberikan oleh kementerian terkait, dan itu mengartikan pembangunan jalan ke desa-desa di perhuluan sungai Kapuas bisa dilakukan.

Bupati Kapuas Hulu, Bapak A.M. Nasir, S.H. membenarkan bahwa Izin pinjam pakai kawasan hutan di perhuluan sungai Kapuas sudah keluar. Dari itu, dirinya memprediksikan pembangunan jalan bisa dilakukan, "Izin pinjam pakai sudah keluar, saya sudah lihat. Jadi itu sudah tidak ada masalah lagi," tuturnya saat ditemui di Aula Setda Kapuas Hulu, tim khusus sudah turun untuk survey keadaan geografis di daerah perhuluan. Bahkan ada beberapa ahli konstruksi bangunan yang ikut serta dalam survey itu. "Tim yang turun ada yang ahli pembangunan jalan, apabila geografisnya batu kapur itu ada ahlinya juga ada turun kemarin," ungkap Bupati Kapuas Hulu.

**"IZIN PINJAM PAKAI  
KAWASAN SUDAH KELUAR"**

Hanya saja, Bapak A.M. Nasir S.H. mengaku dirinya belum bisa memastikan kapan pembangunan jalan ke perhuluan sungai Kapuas tersebut dapat dilakukan. Sebab otoritas pembangunan tersebut, menurutnya tidak melekat di tingkat kabupaten, melainkan pemerintah pusat. "Dana pembangunannya saya belum tahu ada atau tidak tahun ini, dan pembangunan jalan itu pun urusan Pemerintah Pusat," terang Bupati Kapuas Hulu dua periode ini.

Bapak Bupati Kapuas Hulu berharap, pembangunan jalan betul-betul dapat terealisasi hingga ke daerah Tanjung Lokang (desa paling ujung di perhuluan Sungai Kapuas). Supaya masyarakat di kawasan hutan tersebut tidak lagi terisolasi. "Kita tentu ingin masyarakat di hulu kapuas maju. Dari itu kita juga berharap pemerintah pusat betul-betul merealisasikan pembangunan jalan ini," tutupnya. (Dok.KIP)

**"BUPATI KAPUAS HULU  
BERHARAP PEMBANGUNAN  
JALAN BETUL-BETUL DAPAT  
TEREALISASI HINGGA KE  
DAERAH TANJUNG  
LOKANG"**



## DESA RIAM TAPANG JADI PERCONTOHAN KAMPUNG KB

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk DWG (*Distrik Working Group*) untuk membina berbagai bentuk program Keluarga Berencana (KB). Gorup yang terdiri dari beberapa lembaga terkait pembinaan KB ini, berfokus untuk mengembangkan Kampung KB yang ada di Bumi Uncak Kapuas. Sejauh ini Kapuas Hulu baru memiliki satu kampung KB, yaitu Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu. Desa tersebut telah dilakukan pembinaan oleh DWG dan kini menjadi percontohan kampung KB di Kalimantan Barat.

Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Ir. H. Muhammad Sukri mengatakan pembinaan Kampung KB tidak saja berbicara satu program saja, tapi banyak program lintas sektor terkait. Sebab dalam penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan di Kampung KB oleh masing – masing SKPD, harus searah dengan visi - misi pemerintah kabupaten Kapuas Hulu. “Tahun ini ada dua Kampung KB lagi yang akan dibentuk yaitu di Kecamatan Hulu Gurung, Desa Nanga Nubung dan di Kecamatan Empanang, Desa Laja Sandang,” tuturnya disela kegiatan Rakor DWG di Aula Kantor Bupati, Selasa (14/2).

“Sebab selain tetang KB, kita perlu mengatasi permasalahan lemahnya implementasi kependudukan dan ketahanan keluarga serta memastikan bahwa program yang telah disusun oleh pemerintah terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Bapak Ir. H. Muhammad Sukri.

Terkait dengan terbentuknya Desa Riam Tapang tahun 2016, Bapak Ir. H. Muhammad Sukri menuturkan apresiasinya. Sebab dari evaluasi dan pemantauan langsung dilapangan, Kampung KB Desa Riam Tapang merupakan Kampung KB unggulan di Provinsi Kalbar dan dijadikan model. Itu hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh tim terpadu BKKBN pusat, YCCP Indonesia dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 – 8 Desember 2016 lalu.

“Program yang sudah dilakukan di Riam Tapang ini merupakan inspirasi untuk percontohan Kampung KB ditempat lain. Desa Riam Tapang merupakan salah satu tipe ideal Kampung KB,” tegas Bapak Ir. H. Muhammad Sukri. Dari strategi dan kegiatan yang dilakukan di Desa Riam Tapang, kata Bapak Ir. H. Muhammad Sukri itu akan diadopsi oleh pusat dalam penyusunan program, hingga membuat suatu regulasi untuk pembentuk Peraturan Presiden. Ini semua kata Bapak Ir. H. Muhammad Sukri adalah wujud nyata kerja keras dan kerja cerdas bapak/ibu yang tergabung dalam DWG serta dukungan penuh dari Pemda Kapuas Hulu, BKKBN Perwakilan Kalbar dan YCCP Indonesia. “Keberhasilan tentu tidak membuat kita berpuas diri, karena masih banyak hal lain yang memerlukan perhatian dan menunggu sentuhan kita bersama,” tutupnya. (Dok.KIP)

INSPIRASI UNTUK  
PERCONTOHAN KAMPUNG KB





## PEMKAB KAPUAS HULU ADAKAN APEL DISIPLIN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

Pemerintah saat ini diharuskan melaksanakan apel setiap tanggal 17. Apel tersebut sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara). Sebagai bentuk pembinaan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara), Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga menggelar Apel tersebut. Apel peningkatan disiplin dan pembinaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut juga dirangkaikan dengan Apel memperingati Peduli Sampah Nasional tahun 2017.

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri mengatakan, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 019.1/397/SJ Tanggal 28 Juli 2015 tentang pelaksanaan upacara bendera dan penggunaan bendera Negara, mewajibkan seluruh Instansi pemerintah pada tanggal 17 setiap bulannya harus melaksanakan upacara bendera. Kecuali ada upacara hari besar Nasional dan lainnya. “Apel ini juga merupakan Pemerintah dalam rangka peningkatan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil),” kata Sekda ketika menjadi inspektur upacara pada apel evaluasi dan pembinaan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil),” dilingkungan Pemda Kapuas Hulu di halaman Kantor Bupati, Kamis (16/2/2017)

**SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 019.1/397/SJ  
TANGGAL 28 JULI 2015**

**“ MARI KITA SALING MENGINGATKAN DAN  
MENINGKATKAN KINERJA MASING – MASING  
GUNA PELAKSANAAN TUGAS KITA SEBAGAI ABDI  
MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA ”**

## PP NO. 53 TAHUN 2010 HARUS DITERAPKAN SELURUH ASN

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan agar Apel pembinaan dan peningkatan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut dilaksanakan pada setiap Kecamatan. Kemudian pelaksanaan Apel di Kecamatan itu dilaporkan kepada Pimpinan, melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), ditembuskan ke Bupati dan Sekretaris Daerah selaku pembina ASN (Aparatur Sipil Negara) di daerah.

“Demikian juga dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, setiap Pagi dan Sore harus melaksanakan Apel di Instansi masing – masing. ini untuk peningkatan disiplin dan kinerja kita sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mengingatkan, PP No. 53 Tahun 2010 harus diterapkan seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), terutama Pimpinan SKPD mesti melakukan pembinaan kepada seluruh jajarannya dan Staf yang ada. “Pembinaan yang dimaksud antara lain memberikan peringatan dan sanksi bagi yang melanggar disiplin PNS. Serta melaporkan perkembangannya ke Pimpinan melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),” pinta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tambah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam pelaksanaan disiplin tersebut, kepala SKPD hendaknya tidak pandang sebelah mata. Karena penegakan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara), itu dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. “Mari kita saling mengingatkan dan meningkatkan kinerja masing – masing guna pelaksanaan tugas kita sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” tutupnya. **(Dok.KIP)**







## SEMENTARA LAYANAN KIR DIHENTIKAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terpaksa menghentikan layanan pemeriksaan kendaraan/ Kir kepada masyarakat. Pasalnya, lima unit alat uji Kir bantuan Kementerian Perhubungan RI yang hari-hari digunakan petugas, sedang rusak.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. H. Abdul Halim mengatakan, sudah satu minggu uji emisi dan uji petik kendaraan bermotor di Kabupaten Kapuas Hulu dihentikan sementara pelayanannya. "Lima alat yang biasa kami pakai sudah rusak dan banyak belum dikalibrasi, kalibrasi itu semestinya satu tahun sekali. Tapi kami sudah mengajukan permohonan kepada Dirjen Perhubungan di Jakarta," ungkapnya, Kamis (23/2/2017).

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, selain memang alat mereka banyak rusak dan menghentikan pelayanan sementara, pihaknya juga berupaya untuk menghindari adanya kegiatan Pungli dilingkungan kerja mereka sehingga menyvetop sementara pelayanan uji KIR. "Namun jika masyarakat yang ingin melakukan uji KIR kendaraan mereka, kami hanya bisa memberikan rekomendasi uji KIR ke Kabupaten Sintang. Kami juga tidak mau menghambat masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, untuk di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri minat masyarakat dalam melakukan uji KIR kendaraan mereka lumayan tinggi, karena masyarakat juga sudah sadar bagaimana menjaga keselamatan mereka dalam berkendara. "Karena uji KIR inikan penting untuk memeriksa kesiapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, karena semuanya diperiksa," ujarnya.

**“ SEMENTARA KAMI HANYA BISA MEMBERIKAN REKOMENDASI UJI KIR KE KABUPATEN SINTANG ”**

Lanjutnya, uji KIR ini biasanya dilakukan berkala untuk menjamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan, sebelum beroperasi. Menurutnya, ada tiga tujuan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. Hal itu diingatkan agar pengguna jalan lebih peduli akan keselamatan berkendara.

Pertama yakni memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor. "Serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat," tuturnya.

**“ MEMBERIKAN JAMINAN KESELAMATAN SECARA TEKNIS TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN ”**

Ia berharap nantinya pengujian berkala kendaraan bermotor bisa dilaksanakan lebih profesional, efektif dan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat." Tentunya sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009," tutupnya. **(Dok.KIP)**



**“ AMANAT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 ”**



## PERLU DIPERHATIKAN INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT PERBATASAN

Kawasan Perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu masih membutuhkan perhatian pembangunan dari Pemerintah. Hal yang paling utama adalah kebutuhan dasar, seperti kesehatan pendidikan, termasuk masalah infrastruktur.

Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Robertus, S.H. menilai, fasilitas umum, sarana prasarana di perbatasan memang perlu diperhatikan. Menurut dia, fasilitas yang perlu diperhatikan pemerintah tersebut seperti jembatan, akses jalan, listrik, kesehatan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan. "Seperti kecamatan Puring Kencana, ada tiga jembatan penghubung yang perlu dibangun, namun sampai sekarang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat," tegasnya, Jumat (24/2)

Jembatan-jembatan itu, kata Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mempermudah akses transportasi dan kegiatan perekonomian masyarakat. Tapi karena statusnya bukan kewenangan Pemerintah daerah, jadi tidak bisa cepat dibangun. "Pembangunan jembatan itu merupakan kewenangan Pusat," tuturnya.

Selain itu, Ruas jalan Badau - Empanang juga saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dimana jalan tersebut sudah mengalami kerusakan yang sangat berat, sehingga perlu diperbaiki. "Dengan kondisi jalan yang rusak Masyarakat disana membeli sembako dari malaysia karena lebih dekat dan lebih murah. Mereka mengambil dari desa sungai antu (Indonesia) ke Batu lintang (Malaysia)," teranginya.

Disisi lain, lanjut Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, fasilitas listrik juga masih jadi masalah utama diperbatasan. Sampai saat ini masih ada beberapa desa di Kecamatan Puring Kencana yang belum teraliri listrik, diantaranya desa Sungai Mawang, Sungai Antu, Merakai Panjang dan Kantuk Bunut. "PLTMA memang sudah ada di Kecamatan Puring Kencana, namun jika air tidak hujan maka PLTMA tersebut tidak akan jalan, turbin pembangkit itu sendiri mengandalkan air dari sungai bukan dari bukit, sehingga itu tidak efektif. Permasalahan listrik ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat," ungkap Robert, untuk masyarakat Badau dan Empanang sendiri masih menggunakan listrik dari Malaysia.

**“ PERMASALAHAN  
LISTRIK INI AKAN  
DISAMPAIKAN KE  
PEMERINTAH PUSAT ”**

Terkait Pendidikan dan kesehatan di perbatasan, kata Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, masyarakat di Kecamatan Empanang, Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana banyak yang bersekolah dan berobat ke Negara Malaysia. "Sebab di Malaysia ada program pendidikan gratis dan berkualitas, begitu juga pelayanan kesehatannya memadai dibanding kita disini. Hal ini jadi tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangnya dengan menyediakan juga sarana dan prasarana yang memadai," tutupnya. **(Dok.KIP)**

**“ HAL YANG PALING UTAMA  
ADALAH KEBUTUHAN DASAR,  
SEPerti KESEHATAN  
PENDIDIKAN, TERMASUK  
MASALAH INFRASTRUKTUR ”**

**“ TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH UNTUK  
MENANGGULANGINYA DENGAN  
MENYEDIAKAN SARANA DAN  
PRASARANA YANG MEMADAI ”**

## 3 RENCANA PEMBANGUNAN DI BADAU



Kecamatan Badau adalah salah satu Kecamatan di daerah perbatasan yang sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, untuk rencana pembangunan tahun 2018 mendatang. Dalam pembahasan Musrenbang tersebut ada tiga rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk masyarakat Kecamatan Badau.

Camat Badau, Adenan, S.IP mengatakan, pihaknya sudah selesai menggelar Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang tersebut pada tanggal 15 Februari 2017 lalu.

“Dalam pembahasan itu memang ada tiga rencana pembangunan yang disampaikan pihak Kabupaten. Tiga rencana pembangunan tersebut adalah membangun Seteher di Pulau Majang, jalan ke Desa Empaik, ada juga peningkatan pada Puskesmas Badau,” tuturnya, saat ditemui di Badau, Sabtu (24/2/2017).

Untuk prioritas pembangunan usulan dari Kecamatan, kata Camat Badau cukup banyak, masing-masing Desa mengusulkan lima program prioritas. Untuk keseluruhan ada sekitar 45 program yang diusulkan. Usulan-usulan tersebut, kata dia, sudah diupload ke Web e-Musrenbang dan dapat diakses untuk kepentingan umum. “Kami disini ada 9 Desa, masing-masingnya diminta 5 Program prioritas. Jadi sekitar 45 program yang kami usulkan,” tuturnya.

Program yang diusulkan dari Kecamatan itu, menurut Camat Badau tidak semua akan tertampung di Tahun 2018. Ada seleksi lagi di Musrenbang tingkat Kabupaten. “Oleh sebab itu kami belum tahu program prioritas kami yang mana, yang tertampung. Nanti di Kabupaten kan semua Kecamatan masuk programnya, baru diputuskan mana yang lebih prioritas,” tegasnya.

Kendati demikian, Camat Badau mengatakan, dirinya sangat berharap usulan pelebaran jalan dari simpang Kantor Camat, menuju Kantor Camat dapat terealisasi. Sehingga perkantoran dan Hotel milik BUMD setempat dapat terlihat dari jalan dan menarik para pengunjung yang ada. “Harapan saya, ajuan jalan, dari simpang jalan ke Kantor Camat ini dikabulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Supaya Hotel dan Kantor Camat Badau kelihatan, sehingga mereka yang berkepentingan tidak sulit mencarinya dan Hotel pun bisa dikunjungi warga, untuk pendapatan Daerah,” tutupnya. **(Dok.KIP)**

“Harapan saya, ajuan jalan, dari simpang jalan ke Kantor Camat ini dikabulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”

## “ 5 PROGRAM PRIORITAS ”



## GEDUNG BARU PLBN BADAU SUDAH BEROPERASI



Gedung baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Badau sudah digunakan oleh petugas untuk Pelayanan administrasi lintas batas baik Bea Cukai / Imigrasi dan karantina sudah dilakukan di gedung tersebut.

Penggunaan gedung baru PLBN Badau, dibenarkan oleh Camat Badau, Adenan, S.IP. Menurut Beliau dirinya sempat diundang untuk meninjau persiapan peresmian gedung tersebut, saat ada wacana kunjungan Presiden RI Joko Widodo. "Tinjauan tersebut dilakukan pada Rabu (15/2) lalu, semua sudah siap, pelayanan sudah digedung, tinggal sedikit lagi persiapan disana," ujarnya, Sabtu (25/2/17). Fasilitas sudah cukup memadai, masyarakat tinggal mengikuti pelayanan yang ada. "pelayanan keluar masuk orang dan barang memang sudah lancar disana," ujarnya.

Berdasarkan pantauan dilapangan, Sabtu (25/2/17), gedung PPLBN Badau masih dalam penanganan pihak ketiga. Jalur keluar dan masuk dari Badau (Indonesia) ke Lubuk Antu (Malaysia) sudah dipisah di bagian kiri untuk pemeriksaan arus keluar dan bagian kanan gedung untuk pemeriksaan arus kedatangan.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan di PLBN Badau, Viktor mengatakan pelayanan memang sudah dipindahkan ke gedung baru karena fasilitas untuk pelayanan juga sudah siap. "Pelayanan sudah pindah ke gedung baru, untuk fasilitas juga sudah siap," ungkapnya di hubungi via telpon.

Terkait dengan wacana peresmian PLBN Badau yang sempat dikabarkan bakal diresmikan Presiden RI, Jokowi, Viktor mengaku masih menunggu informasi lanjutan. "Untuk peresmian kami juga masih nunggu informasi dari BPP Pusat," ucapnya.

## WARGA PERBATASAN DAPAT LAYANAN DOKTER SPESIALIS



Puluhan warga perbatasan mengunjungi Rumah Sakit Bergerak Badau, Jumat (24/2). Mereka datang untuk mendapatkan pelayanan Dokter Spesialis yang diturunkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dokter Spesialis yang diturunkan yaitu Dokter Spesialis Anak dan Kandungan.

Adanya pelayanan Dokter Spesialis ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Warga Desa Kekurak Kecamatan Badau, Mingang, mengatakan bahwa dirinya sengaja datang untuk memeriksakan istrinya ke Dokter Spesialis Kehamilan. "Sudah ada disini, jadi periksanya tidak perlu ke Putussibau," ujarnya, saat ditemui Jumat (24/2) malam. **(Dok. KIP)**

Warga Desa Kekurak Kecamatan Badau menceritakan, dirinya melakukan pemeriksaan ke Dokter Spesialis di Kecamatan Badau karena belum puas dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Kata dia, dirinya sempat memeriksakan istrinya ke Malaysia untuk mengetahui penyebab keluhan nyeri di bagian perut oleh istrinya. "Di Malaysia saya habis sekitar 3 juta semalam. Waktu periksa disana mereka bilang ada benjolan di rahim istri saya, dan disarankan operasi, waktu tanya biayanya hampir 100 jutaan, jadi saya bawa pulang saja lagi," ujarnya.

Setelah itu, kata dia, dirinya kembali berobat ke RSUD di Putussibau, hasil pemeriksaan beda, justru di pembuangan. Sudah diberi obat, kata Warga Desa Kekurak Kecamatan Badau, istrinya mulai baik. "Namun karena pas pemeriksaan di Putussibau, saya lupa kasi tahu tentang pemeriksaan di Malaysia, jadi saya periksa lagi ke Badau, mumpung ada Dokter Spesialis. Hasil pemeriksaan di Badau, tidak ada lagi," ucapnya sembari bersyukur.

## 4 KECAMATAN DI KAPUAS HULU JADI SASARAN GERTAM CABAI DAN BAWANG MERAH

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Gerakan Nasional Tanam Cabai (Gertam Cabai) dan Bawang Merah untuk seluruh daerah di Indonesia, sedangkan TP-PKK Kapuas Hulu sendiri mendapat jatah mengelola 7 hektar dari 40 hektar jatah yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekertaris TP-PKK Kapuas Hulu, Elisabet Roslin, SH, M.Si mengatakan bahwa TP-PKK Kapuas Hulu memang mendapat jatah 7 hektare untuk Gertam Cabai dan Bawang Merah. Menurut Elisabet Roslin, jatah tersebut dipertegas melalui penandatanganan MoU antara Ketua TP-PKK Kapuas Hulu Ny. Erlinawati Nasir dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, tanggal 27 Februari lalu di Pontianak. "Program ini tentunya akan dilakukan secara bertahap oleh PKK Kapuas Hulu mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa. Bahkan untuk Kecamatan, Ketua TP-PKK Kapuas Hulu juga sudah membuat MoU dengan TP-PKK Kecamatan, untuk Gertam Cabai dan Bawang Merah ini melekat pada Kelompok Kerja (Pokja) III di PKK. Namun realisasi program ini di tingkat Kecamatan dan Desa tetap diawasi secara bersama-sama oleh TP-PKK Kabupaten. "Pelaksanaan program ini tetap melibatkan PKK Kecamatan dan Desa tapi TP-PKK Kapuas Hulu tetap memantau," ujarnya.

Ketua Pokja III TP-PKK Kapuas Hulu, Ibu Maryatiningsih menambahkan program Gertam Cabai dan Bawang Merah sudah diteruskan PKK Kabupaten ke Kecamatan dan sudah ada penandatanganan kerjasama antara Ketua TP-PKK Kabupaten Kapuas Hulu dengan TP PKK Kecamatan dan berlangsung di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Sabtu (4/3) lalu. Dimana ada empat Kecamatan yang menjadi sasaran yaitu TP PKK Kecamatan TP PKK Putussibau Utara, TP PKK Putussibau Selatan, TP PKK Kalis dan TP PKK Kecamatan Mentebah.

Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, menurut Maryatiningsih, telah dibagi target dan kesanggupan masing – masing TP PKK di empat Kecamatan, yaitu masing – masing seluas 1,75 hektar dan untuk mendukung program tersebut dapat dialokasikan di kebun dasawiswa, kebun PKK Desa dan kebun PKK Kecamatan. Sedangkan untuk target dan kesepakatan tersebut sudah disetujui dan ditandatangani oleh masing – masing TP PKK empat Kecamatan," ucapnya.



Dari jatah 7 hektare peruntukan TP PKK TP PKK Kecamatan diharapkan bisa melanjutkan program Gertam Cabai dan Bawang Merah dengan mengajak seluruh masyarakat di wilayah masing – masing untuk mengelola pekarangan dengan ditanami cabai dan bawang merah. "Untuk merealisasikan Program Tanaman Cabai dan Bawang Merah di Kabupaten Kapuas Hulu, telah dialokasikan lahan seluas 40 hektare, dengan peruntukan 33 hektar bagi Poktan/Gapoktan/KWT dan 7 hektare diserahkan pengelolaannya kepada TP PKK Kapuas Hulu," kata Maryatiningsih.

Terkait penyaluran sarana – prasarana seperti benih, polibag, pupuk dan pestisida menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. "Untuk kegiatan di masing – masing kecamatan akan didampingi PPL, mantri tani dilokasi masing – masing," tutupnya. (Dok. KIP)



## 7 Kecamatan Di Kapuas Hulu Masuk Program Kawasan Strategis Agropolitan



Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu tengah merancang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Plt Kepala Bappeda Kapuas Hulu, M. Mauluddin, S.IP, M.Si mengatakan ada 3 jenis KSK di Kapuas Hulu yang diproses pihaknya, tiga KSK tersebut adalah KSK agropolitan, KSK ekowisata TNDS dan KSK koridor TNDS-TNBK. “KSK-TNDS memang untuk wilayah danau sentarum saja. Sedangkan Koridor TNDS-TNBK itu terkait kedua taman nasional yang berlokasi di kecamatan Batang Lupar, sebab ada aspek fauna saling berkaitan di kedua taman nasional tersebut,” ungkap Plt Kepala Bappeda Kapuas Hulu, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/3).



Untuk KSK agropolitan ini ada 7 kecamatan yang menjadi sasaran yaitu Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Semitau, Empanang, Hulu Gurung, Seberuang dan Pengkadan. “Terkait KSK agropolitan ini sendiri sudah ada Perda Nomor 1 tahun 2014. KSK agropolitan ini sendiri sudah pernah dilakukan FGD atau forum diskusi, yang fungsinya untuk menyatukan persepsi antara berbagai pemangku kepentingan. KSK agropolitan berkaitan juga dengan Areal Penggunaan Lain (APL).

“Kita tahu APL di Kapuas Hulu sebagian sudah digunakan untuk investasi perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk APL sisanya itu yang lagi diupayakan agar bisa diterapkan KSK agropolitan, tapi hanya di 7 kecamatan saja,” tuturnya.

Terkait penentuan jenis tanaman yang akan diterapkan melalui KSK Agropolitan ini, kata Mauluddin akan ditentukan setelah melakukan pengkajian. “Pemda sendiri sudah bekerjasama dengan WWF untuk mengkaji kebutuhan masyarakat di 7 kecamatan, yang menjadi objek KSK agropolitan itu sendiri,” ujarnya.

Pengkajian tersebut sedang berjalan, untuk kajian literatur sudah dilakukan pada Februari lalu dan akan disusul kajian empiris serta observasi lapangan di bulan Maret. “Jadi setelah kajian nantinya akan dibuat analisa pengembangan dan skema lapangan, terus pada bulan Mei sampai Juli dibuat rancangan kegiatan serta KLHS, di bulan Agustus baru akan di buat naskah akademik dan terakhir disusun menjadi Raperda di September nanti,” paparnya.

Plt. Kepala Bappeda ini mengatakan, pihaknya mengharapkan pada tahun 2018 produk Raperda KSK sudah terealisasi, sehingga dapat diteruskan dengan program lanjutan. “Dari KSK agropolitan ini kami sangat mengharapkan itu dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, maka kami tidak hanya sekedar berbicara tapi juga lakukan observasi ke lapangan,” tuntasnya. (Dok. KIP)

**“Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu, Semitau, Empanang, Hulu Gurung, Seberuang Dan Pengkadan Merupakan Kecamatan Sasaran KSK Agropolitan”**



## 26 SPEED BOAT LAYANI MASYARAKAT DI JALUR KAPUAS



Sungai Kapuas masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Kapuas Hulu, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan seperti Kecamatan Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, Selimbau dan Suhaid. Masyarakat di empat Kecamatan tersebut masih dominan mengandalkan transportasi sungai untuk segala aktifitas sosial ekonomi, hingga urusan Pemerintahan ke Putussibau.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan, sejauh ini ada 3 perusahaan yang menyajikan jasa transportasi umum sungai. Ketiga perusahaan tersebut mencakup tiga rute pelayanan di sepanjang sungai Kapuas. "Sejauh ini ada 3 perusahaan yang melayani masyarakat di jalur Kapuas. Masing-masing perusahaan punya satu rute, Putussibau-Bunut Hilir, Putussibau-Embaloh Hilir dan Putussibau-Suhaid. Keseluruh armada dari tiga perusahaan itu berjumlah 26 speed," ujar Aleksius Bulin, Kepala Bidang Lalin Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dishub Kapuas Hulu, Minggu (12/3).

Trayek angkutan sungai di Kapuas Hulu, menurut Aleksius Bulin, disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang pelabuhan. Perda tersebut mengatur izin trayek speed. "trayek angkutan sungai ini ada batas maksimal dan minimal sesuai Perda, selain itu memang diatur pula tentang retribusinya. Masing-masing speed hanya memiliki kapasitas maksimal mengangkut 6 orang sudah termasuk supir dan penumpang. Satu speed boat tersebut maksimal muatannya 500 kg, itu juga sudah termasuk orang dan barang. Sebelum beroperasi, ditekankan oleh Kabid Lalin Angkutan Sungai ini, driver atau motoris speed harus ada Surat Izin Belayar (SIB) dari petugas perhubungan. "SIB ini harus selalu dikantongi sang driver atau motoris setiap berangkat membawa penumpang dari Putussibau ke tujuan trayeknya masing-masing.

Dinas Perhubungan sendiri memiliki petugas di dermaga yang siap mengawasi kelayakan masing-masing speed, kalau layak akan diberikan SIB, jika tidak layak maka akan ditunda keberangkatannya," ujar Aleksius Bulin. Terkait tarif trayek, Dinas Perhubungan sudah menentukan batas bawah pada masing-masing rute. Adapun yang sudah ditetapkan diantaranya Putussibau-Bika Rp 10.878,-, Putussibau-Manday Rp 8.288,00,-, Putussibau-Embaloh Hilir Rp 23.310,-, Putussibau-Bunut Hulu Rp 30.562,-, Putussibau-Boyan Tanjung Rp 45.584,-, Putussibau-Pengkadan, 55.426,-, Putussibau-Jongkong Rp 85.470,-, Putussibau-Tepuai Rp 60.606,-.

Kemudian untuk rute Putussibau-Sejiram Rp 88.060,-, rute Putussibau-Semtau Rp 96.866,-, Putussibau-Suhaid Rp 101.528,-, Putussibau-Silat Rp 104.118,-, Putussibau-Embaloh Hulu Rp 47.656,-, putussibau-Batang Lupar Rp 63.714,-, Putussibau-Badau Rp 88.578,-, Putussibau-Empanang Rp 97.902,-, Putussibau-Puring Kencana Rp 109.816,-.

"Pemberlakuan traif trayek batas bawah ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2007," tutup Aleksius Bulin. **(Dok. KIP)**

**"Driver Atau Motoris Speed Harus Memiliki Surat Izin Belayar (Sib) Dari Petugas Perhubungan, Dan Harus Selalu Dikantongi Oleh Motoris Setiap Beroperasi Membawa Penumpang".**

## Pemerintah Kapuas Hulu Persiapkan Lahan 10 Hektare Untuk TPA



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merencanakan untuk membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang baru di kawasan Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan. Lokasi yang dipilih, jauh dari permukiman masyarakat dengan luas lahan sekitar 10 hektare. TPA ini sendiri tengah diproses Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kapuas Hulu.

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kapuas Hulu, Ir. H. M. Sayuti, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan rencana realisasi TPA baru itu. Kemungkinan kata dia, realisasi TPA tersebut di tahun 2018 mendatang. “Kemaren rencananya lokasi TPA itu di desa Seluan kecamatan Putussibau Utara, tapi ternyata lokasinya masuk kawasan hutan, jadi pindah lagi dan sudah ada lokasinya yang baru,” papar Pak Sayuti, Senin (13/3). Sementara untuk lokasi yang dipilih untuk TPA, berada di Kedamin Darat tempatnya pun tidak di samping jalan, masuk lagi kedalam hutan sekitar 2 km. “Lokasi yang disiapkan di dalam hutan itu 10 hektar,” paparnya.

Untuk merealisasikan TPA tersebut, tidak bisa sembarangan syarat membuat TPA harus ada sertifikat, ada juga study kelayakan dan rencana pembangunan yang merupakan ranah di Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, kemudian harus juga punya izin UPL-UKL yang nanti akan dibuat Dinas Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, karena TPA ini mesti ada sertifikat tanah, jadi kami masih mengurusnya ke Bagian Pertanahan di Sekertariat Daerah,” ungkapny. TPA baru memang harus direalisasikan, karena TPA yang lama sudah kurang memadai. Dari volume sampah yang aktif diproduksi masyarakat Putussibau dan Sekitarnya saat ini, TPA lama hanya bisa bertahan 1 sampai 2 tahun saja. “Di TPA yang lama menurut saya sudah over kapasitas dan lokasinya tepi jalan lagi, kalau di Kedamin Darat agak jauh dari permukiman warga,” imbuhnya.

Dalam penanganan sampah di kota Putussibau dan sekitarnya, pihaknya berupaya mengelola secara bertahap. Saat ini, kata dia Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah melakukan peralihan aset penanganan sampah dari Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya.

“Kami baru melakukan mutasi aset persampahan dari Dinas terkait ke Dinas kami, seperti truk, amrol, motor tosa pengangkut sampah dan mobil pickup. Memang ada yang rusak dan perlu diperbaiki, karena sudah lama. Rencananya kami akan mengsulkan penambahan dum dan amrol untuk 2018. Ini penting untuk mengelola persampahan,” paparnya. Senada dengan Pak Sayuti, Kabid pengendalian dan pemeliharaan lingkungan, Aspiyansyah, S.T. juga membenarkan kalau fasilitas untuk mengangkut sampah kurang memadai. “kami memang ada kendala untuk armada angkutan sampah, banyak yang sudah tua dan ada yang sudah rusak, kalau dari petugasnya, saya lihat sudah maksimal,” tambah Aspiyansyah. Terkait volume sampah dari data tahun 2016 lalu diketahui volume sampah di kota Putussibau dan sekitarnya itu sebanyak 71 kubik perhari. Volume itu, menurutnya adalah akumulasi keseluruhan sampah baik organik dan non organik. “Saat ini kita masih bisa operasikan amrol 9 unit, dumb-truk 2 unit, mobil pick-up 1 unit dan motor bak tosa 1 unit. Ini diperkirakan masih bisa menangkut sampah yang ada di kota Putussibau dan sekitarnya,” Tren sampah pasti naik karena bertambah orang akan membuat produksi sampah bertambah pula. Namun dari tata kelola sampah sejauh ini keaktifan masyarakat juga cukup membantu, dengan membuang sampah ke tempat yang sudah disiapkan. “Petugas sampah kami selain mengangkut di TPS (tempat pembuangan sementara), sebagian masuk juga ke gang-gang untuk mengambil sampah,” ujarnya.

Untuk pengambilan sampah itu sendiri mulai Sibau Hulu sampai Kedamin Darat. Personil yang bertugas sementara ini cukup, tapi kalau nambah pelayanan tetap harus menambah personil lagi. “Pengangkutan sampah kami menggunakan sistem ambrol, dan sudah dibagi rute pengangkutannya. Terkait waktu mengangkut sampah itu sendiri ada yang jam 6 pagi, sementara untuk kawasan pasar waktu pengangkutannya adalah sore hari,” tutur Pak Aspiyansyah.

Langkah kedepan, kata dia, untuk mengurangi debit sampah harus ada sistem pemilahan sampah organik dan non organik. “Memang ada rencana sistem komposer untuk sampah organik dan untuk yang non organik akan diolah untuk biji plastik. Namun ini perlu bertahap penerapannya,” tutup Pak Aspiyansyah. **(Dok. KIP)**





## BUPATI KAPUAS HULU MINTA RKPD 2018 SESUAI RPJMD

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, di gedung Indoor Putussibau, Selasa (14/3) pagi. Dalam kesempatan itu, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH menghendaki agar, RKPD tahun 2018 tidak keluar dari visi misinya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu 2016-2021. “Saya minta RKPD ini tetap mengacu pada dokumen RPJMD Kapuas Hulu 2016-2021 yang menetapkan 3 misi, yaitu tata kelola pemerintahan baik dan bersih, memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan, meningkatkan layanan infrastruktur dengan skema kelestarian lingkungan,” tegasnya sembari membuka kegiatan musrenbang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat dalam amanatnya yang dibacakan oleh Robertus Insius, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemrov Kalbar meminta agar Pemkab Kapuas Hulu menyelaraskan RKPD 2018-nya dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. RKPD ini adalah penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), oleh karena itu RKPD perannya sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinkronkan juga dengan RKPD Pemprov Kalbar dan Pusat. Bapak Robertus Insius juga mengatakan setelah seluruh Kabupaten menyelenggarakan Musrenbang maka akan dibawa lagi ke musrenbang tingkat Provinsi dan Pusat. Untuk dua musrenbang lanjutan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan April. “6 april 2017 musrenbang provinsi Kalbar. Selanjutnya minggu kedua bulan april musrenbang tingkat pusat,” paparnya.

Kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Robertus berpesan agar kondusifitas daerah harus tetap dijaga, baik oleh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, sebab hal tersebut penting untuk memastikan realisasi pembangunan daerah tetap baik. “Tingkatkan pencegahan untuk menangkal gangguan keamanan di Kabupaten dan Kecamatan,” imbuhnya.

Kepada seluruh ASN, Robertus juga mengingatkan agar tetap menjaga disiplin. Dia menegaskan stigma negatif pada ASN harus dirubah. Selain itu, dia juga mengharapkan agar bisa membuat inovasi program baru yang dapat menunjang pembangunan daerah.

Musrenbang penyusunan RKPD Kapuas Hulu tahun 2018 ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kapuas Hulu. Selain ada pula Forkompinda Kapuas Hulu, Pimpinan berserta anggota DPRD Kapuas Hulu, para Camat dan Kades se Kapuas Hulu. (Dok. KIP)

**“Saya minta RKPD tetap mengacu pada dokumen RPJMD Kapuas Hulu 2016-2021 yang menetapkan 3 misi, yaitu tata kelola pemerintahan baik dan bersih, memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan, dan meningkatkan layanan infrastruktur dengan skema kelestarian lingkungan,”**



## Kementerian Pertanian Kunjungi Kapuas Hulu

Tim teknis dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjajaki potensi – potensi tanaman pangan yang bisa menjadi produk unggulan daerah, khususnya di kabupaten perbatasan.

Prof. Deciyanto Soetopo dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian RI menjelaskan agenda kunjungan mereka ke Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan program untuk pengembangan lumbung pangan yang berorientasi ekspor. “Jadi kami dari Kementan diminta untuk pergi ke daerah perbatasan seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya usai audiensi bersama Bupati, Sekda dan jajaran OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu di rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, Rabu (15/3)

Menurut Prof. Deciyanto Soetopo di Kalimantan Barat ada empat kabupaten yang akan dikunjungi dimana tugas pertama dari kunjungan tersebut dalam waktu jangka pendek yakni mempelajari potensi di wilayah untuk menuju sasaran lumbung pangan berbasis ekspor. “Setelah kami teliti dan kaji, potensi – potensi apa saja yang bisa diangkat, akan kita diskusikan, dalam jangka pendek kedepan lumbung pangan berorientasi ekspor itu bisa dicapai,” katanya.

Selain menggali jenis pertanian yang berpotensi untuk diekspor, pihaknya juga lanjut Soetopo akan membantu pemecahan masalah pengembangan sektor pertanian, pihaknya juga akan memberi rekomendasi kalau di daerah tersebut bisa menjadi lumbung pangan. “Kalau sekarang seperti padi di Kapuas Hulu capaian produksi belum memenuhi kebutuhan, selain raja uncak berapa padi yang bisa menjadi unggulan. Kami berharap dalam orientasi ekspor bisa berbentuk komoditas premium atau komoditas spesifik,” ungkapnya.

Menurut Soetopo Kementan RI siap mendukung pengembangan sektor pertanian yang potensial di suatu daerah, baik dalam bentuk sarana – prasarana, penyuluhan dan sebagainya, kemudian pembentukan model. “Bagaimana kira – kira lumbung pangan bisa terwujud sekaligus menjadi orientasi ekspor,” kata Soetopo.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Pemda Kapuas Hulu dalam audiensi tersebut, pihaknya melihat Kapuas Hulu memiliki peluang bagus untuk pengembangan lahan sawah, khususnya daerah pesisir sungai kapuas yang ketersediaan airnya mencukupi.

“Persentase itu menjadi bahan bagi kami, kami akan berusaha semaksimal mungkin, maka nanti Menteri akan meminta sesegera mungkin hasil kunjungan kami ke lapangan. Kami melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan disini (Kapuas Hulu)” ulasnya.

Ketika ditanya potensi komoditas untuk di ekspor ke negara tetangga, Soetopo menyampaikan pihaknya akan menjajaki terlebih dahulu kebutuhan dan persyaratan setiap negara tujuan ekspor, kemudian akan dicocokkan dengan produktivitas dalam negeri. “Mampu atau tidaknya memenuhi kebutuhan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, S.H menyampaikan bahwa Pemda akan terus mendorong agar capaian produksi komoditas pertanian bisa meningkat. “Para kelompok tani selalu kita ingatkan, agar berupaya meningkatkan jumlah produktivitas, namun perlu dilakukan secara bertahap karena masih dalam tahap penyesuaian untuk merubah pola berpikir masyarakat petani,” katanya.

Namun Bupati melihat saat ini banyak perubahan cara pandang masyarakat dalam bertani, sehingga mulai berlomba untuk mengembangkan sektor pertanian. “Masyarakat mulai sadar, dulu petani dianggap miskin, kemudian untuk makan setahun cukup. Tapi sekarang beda, orientasinya mulai pada peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi keluarga melalui hasil pertanian itu,” ungkap Bupati.

Beliau juga menekankan bahwa produksi hasil panen mesti ditingkatkan, karena Pemda berkomitmen mendukung dengan berbagai sarana – prasarana yang dibutuhkan para petani tentunya. **(Dok. KIP)**

**Tantangan Untuk Petani Kapuas Hulu : “Bagaimana kira – kira lumbung pangan bisa terwujud sekaligus menjadi orientasi ekspor,”**

## PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN PLBN BADAU



Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo meresmikan penggunaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Badau di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/3), Pukul 12.30 Wib.

Jokowi mengatakan dengan persemiannya PLBN Badau diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di perbatasan. Untuk itu ia meminta agar dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh masyarakat. "Saya minta ini betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat" tegasnya.

Presiden Jokowi juga mengharapkan pembangunan pasar di sekitar PLBN Badau segera terealisasi agar dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. "Pesan saya di sekitar PLBN ini harus ada pasar," tuturnya.

Jokowi menambahkan kunjungannya ke Kapuas Hulu adalah kunjungannya ke 7 di Kalimantan Barat. Sementara di pulau Kalimantan sendiri, Provinsi yang lain hanya satu. "Kemaren saya baru meresmikan PLBN di Entikong, sekarang di Badau. Presiden Jokowi juga menekankan dengan adanya PLBN Badau tidak ada lagi penyelundupan dari jalur tikus. Penyelundupan barang-barang ilegal dan narkoba harus di berantas. "Jangan sampai ada penyelundupan seperti melalui jalan tikus dan jalur ilegal."

**"Saya Minta Ini (PLBN Badau) Betul-Betul Dimanfaatkan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."**





Dalam peresmian PLBN Badau, Presiden Jokowi juga didampingi istrinya Hj.Iriana Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Kerja, dan hadir juga Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis MH berserta rombongan Pemprov Kalbar serta Bupati Kapuas Hulu AM. Nasir SH berserta jajaran Pemkab Kapuas Hulu.



Selesai meresmikan PLBN Badau, Jokowi juga melakukan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat perbatasan di kantor Kecamatan Badau.

Rangkaian kegiatan Jokowi di Badau mendapat pengawalan ketat dari personil TNI-Polri setempat serta Paspampres. Antusias masyarakat sangat tampak, ribuan masyarakat perbatasan di Kapuas Hulu menyambut kedatangan presiden di PLBN Badau dan hal ini menyebabkan jalan utama Kecamatan Badau sempat macet, namun dapat diatasi oleh aparat keamanan.

(Dok. KIP)





## PUAN MAHARANI LEPAS EKSPOR CPO KE MALAYSIA



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani didampingi Seknet Indonesia, Pramono Anung, Dirjen Bea dan Cukai Indonesia, Heru Pambudi, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Pontianak, Saifullah Nasution dan Kakan Bea dan Cukai PLBN Badau, Indra Mustika melepas ekspor 11 truk cpo kelapa sawit di PLBN Badau, Kamis (16/3) siang. Belasan truk tersebut memuat sebanyak 407 matrik ton.

Dalam pelepasan ekspor itu Puan Maharani menegaskan ekspor dari Indonesia ke negara luar memang perlu ditingkatkan supaya pendapatan negara juga bertambah. "Kita berhadapan dari PLBN Badau bisa menambah pendapatan bagi masyarakat setempat, termasuk untuk daerah dan negara dari aktifitas ekspornya," singkat Puan, sambil menyapa para supir truk yang mengangkut minyak CPO di PLBN Badau, Kamis (16/3).

Sementara itu Dirjen Bea dan Cukai Indonesia Heru Pambudi menegaskan dari 407 matrik ton CPO yang diekspor, Indonesia mendapatkan devisa ekspor sebanyak Rp 255.416,14 USD. "Kita berharap kedepan pendapatan ekspor meningkat. Pihak Bea Cukai sangat mendukung kawasan Badau menjadi sentral untuk ekspor CPO kelapa sawit salah satu upayanya yaitu balking yang ada hendaknya menjadi terminal barang atau pun dry port di kawasan Badau. "Sehingga industri CPO di sekitar Badau bisa diekspor, tidak hanya di Malaysia, tapi negara lain," ujarnya.

Kepala Bea dan Cukai Badau, Indra Mustika menambahkan pada tahun 2015 devisa ekspor CPO di Kapuas Hulu sebesar 36.055.197,98 USD, dengan total berat CPO 69.859.480 kg, sementara di tahun 2016 lalu, pendapatan devisa ekspor 34.017.691,66 USD dengan total berat 57.676.790 kg. Menurutnya, dari Badau ekspor cpo belum dapat nilai yang optimal karena hanya bergantung di pihak Malaysia. Cpo itu hanya bisa dijual ke daerah Bintulu dan sebagian wilayah Malaysia. "Dengan ada terminal barang di Badau, di kawasan Kapuas Hulu, kami berharap industri cponya bisa diekspor ke negara lain diluar Malaysia lewat melalui PLBN Badau.

Terkait target ekspor CPO dari PLBN Badau di tahun 2017, Indra Mustika mengatakan targetnya sebanyak 120.000 matrik ton. Diharapkan dari pengembangan industri sawit yang ada dari PLBN Badau bisa berikan devisa ekspor 1 juta dolar per tahun. "Selain CPO, kami juga berharap ada ekspor lain sekala besar baik dari Kapuas Hulu atau pun Kabupaten lain, seperti Sintang," tutupnya. (Dok. KIP)

**"Selain CPO, kami juga berharap ada ekspor lain sekala besar baik dari Kapuas Hulu atau pun Kabupaten lain, seperti Sintang,"**

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERENCANA RANGKUL WARGA UNTUK KELOLA SAMPAH

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas LHPKRP) Kapuas Hulu berencana untuk kerjasama dengan masyarakat ditingkat Rukun Tetangga (RT) adapun kerjasama yang dimaksud adalah untuk manajemen sampah rumah tangga sekaligus penerapan retribusi persampahan.

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kapuas Hulu, Ir.H. M.Sayuti mengatakan dalam pengelolaan sampah lingkungan, pihaknya berencana untuk berkerjasama dengan ketua RT dan warga. Menurut Sayuti, sampah lingkungan perlu ditata sedari dini agar kedepan tidak menjadi permasalahan. "Kita memang perlu ada kesepakatan dengan pihak RT untuk teknis pengelolaan sampah rumah tangga," ujarnya, Senin (20/3).



Kesepakatan tersebut berkaitan dengan sistem angkut sampah, yang kedepannya akan ditawarkan kepada masyarakat untuk diangkut dari masing-masing rumah, sehingga kedepan tidak terjadi penumpukan sampah. "Selain teknis jemput bola, yang mau dibahas nanti termasuk tentang retribusi dari Perda sampah itu sendiri," ujarnya.

Sesuai Perda, retribusi sampah adalah Rp 5.000/bulan/rumah. Biaya retribusi ini, rencananya akan dikenakan bagi warga yang memanfaatkan jasa angkut sampah rumah. "Bisa saja selain dana retribusi ada lagi penambahan tarif untuk biaya operasional petugas angkut sampah, namun ini masih didiskusikan dengan Ketua RT dulu," tuturnya.

Kabid Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas LHPKRP Kapuas Hulu, Aspiansyah,S.T. menerangkan konsep pengelolaan sampah di RT tersebut sudah berhasil diterapkan di Pontianak. Hal itu bisa dicontoh untuk manajemen sampah di Kapuas Hulu, khususnya Putussibau. "Memang untuk pengelolaan sampah ke komplek ini kita mencontoh ke Pontianak, disana ada warga yang dipekerjakan untuk mengambil sampah ke rumah-rumah warga dan warga membayar retribusi. Selain sampah terkelola baik ada juga pendapatan daerah," ujarnya.

Selain manajemen sampah ke tingkat RT, menurut Aspiansyah kedepannya wilayah Putussibau perlu didukung TPS terpadu, untuk memilah sampah, hal ini penting untuk mengurangi volume sampah. "Sehingga di TPA nantinya hanya jenis sampah yang tidak bisa di daur ulang saja yang ditumpuk, untuk yang plastik bisa diolah jadi biji plastik, yang organik diolah untuk pupuk. Tapi ini masih sebatas wacana, butuh tahapan untuk mewujudkannya, semoga Pemda mendukung," tutup Aspiansyah. (Dok. KIP)



**"Kedepannya Akan Ditawarkan Kepada Masyarakat, Sampah Rumah Tangga Akan Diangkut Dari Rumah Masing-Masing, Sehingga Tidak Akan Terjadi Penumpukan Sampah."**





## 23 KECAMATAN IKUTI PORSENI KABUPATEN KAPUAS HULU

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kabupaten Kapuas Hulu bakalan semarak, pasalnya 23 Kecamatan yang ada di Bumi Uncak semuanya ikut kegiatan rutin tahunan tersebut. Sekitar 2336 peserta yang mayoritas adalah pelajar ikut andil dalam kegiatan tersebut, mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, mengaku senang karena Porseni tahun ini begitu antusias, seluruh Kecamatan ikut andil. "Saya mengapresiasi dukungan dari pihak Kecamatan yang telah mendukung para kontingen masing-masing, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan setahun sekali ini," usai mengikuti kegiatan pembukaan Porseni tingkat Kabupaten tahun 2017 di GOR Putussibau, Senin sore (20/3).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya ada tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan mulai dari Sepak Bola, Voli, Sepak Takraw, Badminton, Tenis Meja, Atletik dan Catur. Sementara itu untuk seni ada tujuh cabang yang diperlombakan diantaranya Pidato Bahasa Indonesia, Karya Anyaman, Story Telling, Cipta Puisi, Baca Puisi, Menyanyi Solo dan Baca Quran. "Nanti dari kontingen Kecamatan yang berhasil menjadi juara tentunya akan mengikuti Porseni tingkat Provinsi,"

Melalui kegiatan Porseni ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan, akan muncul atlet berprestasi untuk Kapuas Hulu, sehingga bisa mengharumkan nama Kapuas Hulu ditingkat Nasional maupun Internasional.

Hal senada diungkapkan, Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, S.H. Ia berharap dengan kegiatan ini muncul atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kapuas Hulu hingga tingkat Nasional. "Saya bangga dengan Kecamatan yang ada karena mereka semuanya mengikuti Porseni ini, semoga ada yang bisa menjadi atlet yang mengharumkan nama daerah," ucapnya.

Selain untuk menjaring atlet berprestasi, kata Bupati Kapuas Hulu, Porseni adalah wadah untuk mempererat silaturahmi antar atlet. Bupati Kapuas Hulu juga berpesan kepada atlet yang bertanding agar dapat menjunjung tinggi Sportivitas karena kalah dan menang itu hal biasa dalam pertandingan. "Begitu juga dengan Wasit, saya minta adil dalam memimpin pertandingan," tegasnya.

Bupati Kapuas Hulu juga mengimbau agar para pelajar menghindari hal negatif, terutama Narkoba. Sebab saat ini Narkoba mulai menyerang generasi Bangsa, maka harus berhati-hati. "Sekarang Narkoba sudah mulai menyerang pelajar, makanya mereka harus waspada. Bila perlu pelajar di tes urine," himbaunya. **(Dok. KIP)**



## PEMKAB KAPUAS HULU MULAI LELANG JABATAN ESELON II



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membuka lelang jabatan untuk memenuhi 12 Kursi Jabatan Eselon II yang belum terisi. Ketua Tim Pelelangan Jabatan Ekselon II Pemerintah Kabupaten (Pembab) Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri, mengatakan pendaftaran peserta lelang jabatan akan dimulai sejak 22 Maret sampai 31 Maret 2017.

"Pelaksanaan tes pelelangan Jabatan akan dilaksanakan secara bertahap, dimana untuk tahap pertama akan dilakukan uji Kompetensi pada tanggal 12 April 2017, kemudian tahap selanjutnya akan dilakukan tes asesment pada tanggal 15 Mei 2017," paparnya, Rabu (22/03)



Menurut Sekda Kabupaten Kapuas Hulu, lelang jabatan hanya diperuntukan bagi pejabat setempat yang sudah memenuhi syarat. Setidaknya, kata dia, di Kapuas Hulu sudah ada sekitar 51 orang Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria untuk ikut lelang tersebut. "Untuk saat ini ASN di Kapuas Hulu yang sudah memenuhi syarat sebanyak 51 orang, namun kita belum tahu juga apakah mereka semuanya akan mendaftar," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Syarat utama bagi ASN yang mau ikut lelang Jabatan Eselon II, mereka harus sudah pernah menduduki Jabatan Eselon III A sebelumnya. Untuk jumlah Jabatan Eselon II yang dilelang oleh Pemkab Kapuas Hulu sebanyak 12 jabatan. "Dalam lelang Jabatan ini melibatkan Tim gabungan seperti dari Kabupaten hanya tiga orang, tiga orang dari Provinsi, dan satu orang langsung dari Jakarta," ungkapnya.

Ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, lelang Jabatan dilakukan secara terbuka, sehingga semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menduduki jabatan yang dilelang. Kepada para peserta, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berpesan agar dapat mempersiapkan mental dan kompetensi terkait Jabatan yang hendak dilamar. Ia mengatakan dengan dilaksanakannya pelelangan jabatan secara terbuka tersebut, diharapkan akan melahirkan pejabat-pejabat yang benar - benar berkompetensi dibidangnya. "Dengan dilaksanakan secara terbuka ini, saya Optimis mampu lulus dalam pelelangan Jabatan. Untuk bentuk soal dalam tes saya belum tau seperti apa," singkatnya. (Dok. KIP)

## SUPLAY AIR BERSIH TAMBAHAN KE PERSERTA PORSENI, PDAM KERAHKAN 2 MOBIL TANKI

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni di Kabupaten Kapuas Hulu mendatangkan lebih dari 2300an orang dari berbagai kecamatan. Keadaan ini membuat kebutuhan air bersih di Putussibau meningkat, khususnya 12 lokasi yang menjadi tempat peserta Porseni bermalam. Untuk membantu kebutuhan air bersih para peserta Porseni, PDAM Kapuas Hulu pun mengerahkan 2 Mobil Tanki air.



Direktur Utama PDAM Kapuas Hulu, Saini Hadi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan suplai air tersebut sejak hari Minggu lalu. Suplai tersebut disalurkan ke semua penginapan kontingen Porseni. “Kami memberi dukungan air untuk semua penginapan kontingen, mulai dari minggu lalu,” ujarnya saat dihubungi via WA (Whatsapp), Kamis (23/3).

Direktur Utama PDAM Kapuas Hulu mengakui, petugasnya cukup kewalahan memenuhi suplai air bersih untuk peserta Porseni. “Iumayan kewalahan petugas kami. Kami suplai dari pagi sampai malam ke sekolah-sekolah, pakai dua mobil tanki. Ada 12 titik yang kami suplai,” tuturnya.

Kedua belas titik suplay tersebut, kata Saini, diantaranya SMPN 1 Putussibau, SMPN 5 Putussibau, SMP PGRI 2 Putussibau, SMP Panca Utama Putussibau, SDN 04 Putussibau, SDN 05 Putussibau, SDN 06 Putussibau, SDN 17 Pala Pulau, SDN 03 Pala Pulau, SDN 02 Putussibau serta dua Home Stay.

Dijelaskan Direktur Utama PDAM Kapuas Hulu, suplai air tambahan dengan mobil tanki harus dilakukan karena suplai air dari jaringan PDAM Putussibau belum mampu memenuhi kebutuhan pemakaian. Sebab jumlah pemakai di 12 titik tersebut cukup banyak. “Seperti di SMP 1 itu ada 400 lebih orang, di SD 4 ada 800 lebih orang, jadi walau pun ledingnya lancar, tetap kurang,” terangnya “Oleh sebab itu PDAM memberikan suplai tambahan. Suplai tersebut akan terus dilakukan sampai acara Porseni selesai. “sampai selesai kegiatan nanti,”. (Dok. KIP)

## BENTUK FORIKAN DI KECAMATAN PERBATASAN RI-MALAYSIA, KAPUAS HULU PASOK 70 % KEBUTUHAN IKAN KALBAR

Gaya hidup yang gemar mengkonsumsi ikan secara klinis dapat membantu kecerdasan anak. Memperhatikan hal tersebut, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kabupaten Kapuas Hulu pun berupaya menstimulasi masyarakat untuk gemar makan ikan melalui pembentukan Forikan tingkat kecamatan. Pada 22 Maret lalu, Forikan Kapuas Hulu pun membentuk Forikan Kecamatan Badau, untuk menjadi pemacu daya konsumsi ikan di Perbatasan RI-Malaysia.

Kabid Kelembagaan dan Pengelolaan TPI di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Triwati, mengatakan, sejauh ini baru satu Forikan Kecamatan yang terbentuk, yaitu di Kecamatan Badau. Badau menjadi prioritas agar daya konsumsi ikan disana meningkat, yang mana harapan akhirnya adalah pada peningkatan sumberdaya manusia disana. “Kita ingin anak perbatasan bisa cerdas dengan menyadarkan mereka betapa pentingnya mengkonsumsi ikan,” ucapnya, Jumat (24/3).



Menurut 'kacamata' Kabid Kelembagaan dan Pengelolaan TPI di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, pembentukan Forikan setiap kecamatan itu penting karena masyarakat harus menyadari gizi ikan yang sangat tinggi itu baik untuk dikonsumsi, untuk kecerdasan. Apalagi Kapuas Hulu memiliki produksi ikan cukup tinggi, sehingga perlu diimbangi dengan daya konsumsi. "Setidaknya kita harus bisa menyamai standar konsumsi ikan nasional," tuturnya "Setelah pembentukan Forikan di Kecamatan Badau, rencananya pihaknya akan membentuk Forikan Kecamatan Hulu Gurung".

Sementara itu Erlinawati Nasir Ketua Umum Forikan Kapuas Hulu mengungkapkan, Kapuas Hulu merupakan salah satu Kabupaten pemasok ikan air tawar terbesar di Kalbar, baik ikan hias maupun ikan konsumsi lainnya terutama dalam bentuk ikan olahan seperti ikan asin, kerupuk kering maupun hasil olahan ikan lainnya. "Sekitar 70 persen ikan olahan dipasok dari Kapuas Hulu ke daerah lain, setiap tahunnya," ujarnya.



Tingginya produksi dan potensi perikanan di Kapuas Hulu tidak berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan masyarakatnya, hal ini terlihat dari tingkat konsumsi ikan pada tahun 2016 baru bisa mencapai 37,5 Kg perkapita masih berada dibawah standar konsumsi ikan nasional yaitu 40 Kg perkapita.

"Makanya hari ini kita memadupadankan tekad dan niat untuk memajukan kesehatan dan kecerdasan masyarakat Kecamatan Badau khususnya dan Kapuas Hulu pada umumnya, itu dengan cara peningkatan konsumsi ikan yang telah diakui manfaatnya bagi kesehatan," tutupnya. (Dok. KIP)

**"Sekitar 70 persen ikan olahan dipasok dari Kapuas Hulu ke daerah lain, setiap tahunnya,"**

## KECAMATAN JONGKONG JUARA UMUM PORSENI - KAPUAS HULU 2017

Ajang Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 telah berakhir. Ajang tahunan ini ditutup oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bapak Antonius L. Ain Pamero, S.H. di Gor Uncak Kapuas Putussibau, Sabtu (25/3/2017) pukul 14.00 WIB.



Dalam dari Porseni 2017, posisi juara umum ditempati oleh Kecamatan Jongkong. Kecamatan pesisir sungai Kapuas ini mendapatkan medali emas sebanyak delapan, perak sebanyak tiga, dan perunggu hanya dua, dengan jumlah 13 medali. Disusul juara umum II yang ditempati Kecamatan Putussibau Utara dengan medali emas ada lima, perak empat, dan perunggu dua, dengan jumlah medali sebanyak 11. Juara umum III jatuh pada Putussibau Selatan, dengan emas sebanyak empat medali, perak ada tiga, dan perunggu tiga, dengan jumlah 10 medali.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bapak Antonius L. Ain Pamero, S.H., menuturkan atlet terbaik dalam porseni kali ini akan mewakili Kapuas Hulu ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat provinsi, dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Nasional. "Saya harap jangan berpuas hati dengan prestasi disini saja, namun segera mempersiapkan diri berlatih dengan lebih keras, disiplin, dengan penuh kesungguhan dan semangat," paparnya.



O2SN dan FLS2N tingkat provinsi, akan dilaksanakan di Kota Pontianak, tanggal 3-10 Mei 2017. Bagi yang mewakili Kapuas Hulu harus lebih meningkatkan kualitas, karena tingkat provinsi harus bersaing dengan 14 kabupaten kota se-Kalbar. "Kita harus optimis bisa bersaing dengan kabupaten lainnya," tandasnya.

Untuk kontingen yang belum berhasil mendapatkan juara pada Porseni 2017, Bapak Antonius L. Ain Pamero, S.H. meminta, agar tidak putus asa dan selalu semangat terus berlatih. "Jadikan kesempatan ini sebagai pengalaman, dan pelajaran berharga dalam upaya mengukir kembali prestasi diwaktu akan datang," ungkapnya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Petrus Kusnadi menyatakan, persaingan antara kecamatan dalam porseni tingkat kabupaten kapuas hulu semakin ketat. "Kita tahu bahwa selama ini, kejuaraan sering didapatkan oleh kecamatan yang ada di Putussibau. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, dan menunjukan pembinaan ditingkat kecamatan berhasil. Karena sudah ada peningkatan, baik kualitas, dan peserta porseni semakin meningkat," ujarnya.

**"Kita harus optimis bisa bersaing dengan Kabupaten lainnya."**

Maka dari itu kata Bapak Petrus Kusnadi, kecamatan-kecamatan yang diluar putussibau jangan minder dan buktinya kejuaraan didapatkan oleh kecamatan jongkong. "Berjuanglah, kalau kita selalu berjuang kesuksesan akan kita raih. Terpenting pembinaan baik dan terus belajar," tutupnya. (Dok. KIP)

## DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN MENGIKUTI PAMERAN DI BATAM INDAGKOP DAN UKM 2017

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti kegiatan Pameran Indagkop dan UKM di Batam pada 24 – 27 Maret 2017. Dalam pameran tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menggandeng beberapa UKM, salah satunya "Kerawing Gallery" yang merupakan toko/gallery yang khusus memasarkan produk kerajinan khas Kabupaten Kapuas Hulu.



Pemilik UKM Kerawing Gallery di sela-sela penyiapan pameran menyampaikan bahwa, setiap pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kami para pelaku ukm selalu dilibatkan sehingga pengalaman mengikuti pameran seperti ini sudah beberapa kali diikuti.







Dari pihak penyelenggara sendiri, disampaikan oleh Direktur PT. Prawira Kreasi Indonesia Bapak Dedy, bahwa pelaksanaan pameran kali ini sengaja ditempatkan pada lokasi batam center karena posisi mall ini merupakan pintu gerbang masuknya penyeberangan ferry Singapura, sehingga target kami para pelancong dari luar pada saat masuk ke batam center langsung dapat melihat dan berbelanja barang-barang pada pameran ini. Hal tersebut juga yang menjadi alasan waktu pelaksanaan pameran dilaksanakan pada saat week-end mulai jumat sampai dengan senin, karena para pelancong dari luar negeri (singapura-malaysia) banyak yang menghabiskan waktu untuk belanja dan kuliner di Batam.



Dari pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sudah mempersiapkan jauh jauh hari untuk mengikuti pameran ini. Rapat bersama unit kerja terkait juga telah dilaksanakan bersama Sekretaris Daerah, Bappeda dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Adapun jumlah materi yang akan dipamerkan dalam kegiatan ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) item jenis barang dengan produk unggulan adalah gelang, cincin, antinng, tas dan keranjang (dubuk) yang terbuat dari bahan alam ramah lingkungan seperti rotan, semar, akar anggrek hutan, kantong semar bambu dan senggang. Disampaikan oleh Kasi Promosi, Edyatma, SE, MM bahwa selain bertujuan sebagai ajang untuk memperkenalkan produk kerajinan kapuas hulu, minat pengunjung dalam pameran ini juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan strategi bisnis ke depan.



Kegiatan yang ditutup pada hari senin, 27 Maret 2017 ini telah memberikan kesan yang sangat berarti bagi tim pameran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu karena mengantarkan Kapuas Hulu sebagai juara II stand terbaik Pameran Batam Indagkop 2017. Semoga hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk event event mendatang . (Dok. KIP)



## KASUS DIARE KAPUAS HULU MENURUN

Pada Periode Januari hingga Maret 2017 ini penyakit diare di Kapuas Hulu sudah mencapai 723 kasus, Sedangkan pada Periode sebelumnya yaitu Januari hingga Maret tahun 2016 lalu terdapat 1.040 kasus. "Belum ada lonjakan kasus diare, Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kasus diare ditahu ini menurun," Tutur Bapak Harisson Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Senin (27/3).

Kasus diare tahun ini, banyak terjadi di Desa Sebintang Kecamatan Kalis. Semuanya penderitanya anak-anak. "Saya rasa ini dipicu lingkungan yang tidak bersih serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang kurang terjaga," ungkapnya.



Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu mengatakan, dirinya sudah melakukan penyuluhan dan pengobatan melalui Puskesmas setempat. Ia juga menghimbau agar masyarakat dapat menjaga lingkungannya agar lebih bersih, selain itu PHBS masyarakat juga perlu diperhatikan. "Misalnya anak itu harus diberi ASI eksklusif, kemudian jika anak itu minum susu formula, botol dot nya harus dicuci bersih dan direbus dahulu, begitu juga dengan empengnya," ungkapnya.

Lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, penyakit diare tidak lagi harus menunggu musim kemarau, musim penghujan seperti ini pun diare sudah mulai menyerang karena diare itu tergantung dengan kebersihan lingkungan dan PHBS masyarakat. "Jadi saya ingatkan pada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya anak-anak yang terkena diare, orang tuanya harus segera membawa mereka ke petugas kesehatan agar segera diobati," ujarnya.

### KASUS DIARE DI KABUPATEN KAPUAS HULU

■ Kasus Diare

JANUARI - MARET 2017

723

JANUARI - MARET 2016

1040

Ditambahkan Ade Hermanto Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, kasus diare di Desa Sebintang Kecamatan Kalis itu bermula dari terjadinya banjir di desa tersebut sehingga membuat anak-anak bermain air dan akhirnya mengalami BAB terus menerus. "Lingkungan mereka yang tidak bersih serta PHBS mereka yang membuat mereka terserang diare dan menyebabkan satu anak meninggal," katanya. Kasus diare di Kapuas Hulu hingga hari ini belum melonjak, bahkan jumlah kasusnya menurun. Meskipun saat ini peningkatan kasus penyakit diare disejumlah wilayah sudah dapat ditekan, namun masyarakat harus tetap waspada diare. (Dok. KIP)

**"Segera Bawa Anggota Keluarga yang terkena Diare ke Petugas Kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan dan pengobatan"**



## PUTUSSIBAU-SINTANG SUDAH BISA LEWAT UDARA



Rute penerbangan Putussibau-Sintang dan sebaliknya sudah dibuka pihak bandara Pangsuma Putussibau sejak Selasa (21/3). Penerbangan dari Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Sintang ini dijadwalkan setiap hari Selasa. Kepala Bandara Pangsuma Putussibau Kapuas Hulu, Hariyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah membuka rute Putussibau-Sintang dan sebaliknya. Rute tersebut, adalah rute penerbangan printis. "Itu rute penerbangan perintis, dalam jadwal penerbangan kami itu satu kali seminggu, setiap hari Selasa, rute penerbangannya dari Sintang-Putussibau-Sintang," ungkapnya, Jumat (31/3).

Kepala Bandara Pangsuma Putussibau Kapuas Hulu menuturkan, maskapai yang melakukan penerbangan tersebut adalah Dimonim Air tipe grand caravan. Kapasitas penumpang dalam pesawat itu hanya 11 orang. "Dengan adanya penerbangan ini kita berharap masyarakat dapat terbantu dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar," singkatnya.

Warga Putussibau, Edo, mengatakan dirinya baru tahu kalau ada rute penerbangan Putussibau-Sintang. Menurut dia, adanya penerbangan itu semakin memperlancar akses transportasi lintas kabupaten. "Kita tahu kalau jalur darat dari Putussibau ke Sintang itu sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau lewat udara mungkin bisa setengah jam saja," tuturnya.

Terkait jasa penerbangan, Edo mengharapkan adanya kelonggaran, khusus untuk warga yang sakit dan butuh penanganan cepat. Selama ini, kata dia, masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke Sintang dan Pontianak jarang diperbolehkan ikut pesawat. "Sebetulnya butuh perlakuan khusus untuk masyarakat yang dalam keadaan urgen, harus dibawa ke Pontianak atau Sintang. Kita tahu kalau lewat jalan darat itu jauh, belum lagi kalau jalannya rusak. Semoga hal ini bisa dipikirkan pemerintah dan pihak maskapai," harapnya. **(Dok. KIP)**



## PANEN PERDANA, DESA BUNUT HILIR HASILKAN 2 TON IKAN

Desa Bunut Hilir kecamatan Bunut Hilir memiliki beberapa danau yang dilindungi oleh masyarakat. Danau-danau tersebut adalah Danau Sabu, Danau Temeruang, Danau Pilin dan Danau Sunjung. Keempat danau ini juga sudah menjadi danau lindung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

Kepala Desa (Kades) Bunut Hilir, Bapak Andi Syamsu, mengatakan, dirinya bersama Camat Bunut Hilir, dan masyarakat desanya baru saja menggelar panen ikan entukan di Danau Pilin dan Sunjung. Dari kedua danau itu ada 2 ton ikan yang dipanen. "Awalnya masyarakat sempat berfikir dengan dilindunginya danau itu akan mempersempit wilayah pencarian ikan para nelayan, namun setelah melaksanakan panen ikan perdana ini masyarakat mulai menyadari pentingnya melindungi danau,"katanya.

Kades yang akrab disapa Boy ini menuturkan, hasil panen ikan itu sebagian dibagikan kepada masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk membeli peralatan untuk memanen ikan didanau lindung tersebut. Jumlah ikan yang dipanen khusus untuk di danau Pilin sebanyak satu ton lebih sementara untuk danau Sunjung hampir satu Ton. "Jenis ikan yang dipanen itu hanya ikan Entukan saja, untuk berat rata-rata ikan yang dipanen sekitar 3 ons per ekornya," ungkapny.

**“ HASIL PANEN IKAN ITU  
SEBAGIAN DIBAGIKAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN  
SEBAGIAN LAGI DIJUAL ”**

Dijelaskannya, ikan hasil panen tersebut selain dibagikan secara gratis kepada masyarakat juga diperjualbelikan, dimana untuk harganya berbeda-beda, jika pembelinya warga desa Bunut Hilir harga ikan Rp. 10 ribu perkilogramnya, namun jika pembelinya orang luar desa Bunut Hilir maka harganya Rp.18 ribu perkilogramnya. "Dari hasil penjualan ikan itu terkumpul uang sebanyak Rp. 8 juta, uang itu langsung digunakan untuk membeli alat pemanenan ikan berupa jermal,"ungkapnya

**" Melalui danau lindung  
inilah salah satu cara kami  
untuk memberdayakan dan  
mensejahterakan  
masyarakat "**

Diterangkannya, dari ke empat danau lindung tersebut yang paling banyak memiliki potensi ikan adalah danau Sunjung, didanau tersebut juga terdapat berbagai macam jenis ikan air tawar.

"Jumlah ikan entukan saja diperkirakan sebanyak 50 ton di Danau Sunjung itu, belum termasuk ikan yang lain," katanya. Diungkapkannya, Danau lindung yang ada diwilayah Desa Bunut Hilir ini merupakan aset desa kedepannya, ia berencana bila nanti danau tersebut telah berhasil, maka untuk hasil danau lindung tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat umum seperti Jembatan, rumah ibadah, sekolah, membantu pendanaan warga yang sedang sakit, membantu biaya sekolah anak yang tidak mampu dan berbagai keperluan masyarakat lainnya. (Dok. KIP)



## GURU KONTRAK DITARGETKAN NGAJAR DI TAHUN AJARAN BARU

Seleksi guru kontrak tahun 2017 yang digadang-gadang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu masih ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya mereka yang lulusan perguruan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Meski belum ada tanggal pasti kapan seleksinya, namun Disdikbud sendiri menargetkan pada tahun ajaran baru para guru kontrak sudah mengajar. “Tanggal seleksi belum kami pastikan, itu masih diproses. Tapi memang harapannya tahun ajaran baru mereka sudah ngajar,” ungkap Bapak Petrus Kusnadi, Kadisdikbud Kapuas Hulu, belum lama ini.

Kadisdikbud Kapuas Hulu menegaskan, penerimaan tenaga kontrak tetap dilaksanakan karena dana sudah ada, yaitu sebesar Rp 7 Miliar. Dana tersebut, menurut beliau, untuk gaji guru kontrak setahun dan pembuatan naskah tes serta proses seleksi lainnya. “Dari estimasi dana tersebut memang diprediksikan akan menerima 340 tenaga kontrak,” paparnya.

Untuk itu, Kadisdikbud mengatakan, pihaknya berupaya mempercepat proses yang ada. “Seluruh persyaratan segera digodok dan akan kami dilaporkan ke Bupati,” imbuhnya.

Disinggung terkait proses seleksi terselubung, beliau menyatakan, hal tersebut tidak ada didalam penerimaan guru kontrak 2017. “Penerimaan ini memang akan dilakukan sebaik mungkin. Hal diluar itu semua resiko masing-masing,” tegasnya.



Hal senada disampaikan Sekda Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri. Ia menegaskan proses penerimaan guru kontrak memang harus transparan. “Tidak ada main titipan-titipan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan, tidak ada jalur-jalur tertentu yang memastikan peserta tes diterima. Penerimaan adalah berdasarkan hasil tes dan itu bisa langsung diketahui peserta setelah tes. “Tidak ada jalur A atau jalur B, lalu bisa diterima,” ungkap beliau. **(Dok. KIP)**



**“ TIDAK ADA  
JALUR A  
ATAU JALUR B  
”**





## “ MESKI ADA PENERIMAAN TENAGA KONTRAK, GURU MASIH KURANG ”

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kabupaten Kapuas Hulu adalah wadah yang menaungi seluruh guru di Bumi Uncak Kapuas. PGRI Kapuas Hulu menilai langkah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam merekrut guru kontrak sudah tepat dalam menutup jumlah kekurangan guru di daerah.

Ketua PGRI Kapuas Hulu, Bapak Sunarto, mengatakan, PGRI sudah melakukan penyisiran di seluruh kecamatan yang ada. Dari pantauan dilapangan, pria yang karib disapa Narto ini mengatakan ada lebih dari 1000an tenaga guru yang dibutuhkan. “Kalau penerimaan tahun inikan 340 orang tenaga kontrak, sementara kebutuhan itu lebih dari 1000an guru, jadi masih kurang gurunya,” tutur Ketua PGRI tersebut, saat ditemui di SMKN 1 Putussibau, belum lama ini.

Untuk menutupi kekurangan yang tersisa, kata dia, itu bisa dilakukan bertahap, melalui kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. “Menurut saya butuh ada semacam Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengaturnya,” kata beliau.

Perbup tersebut, menurut Bapak Sunarto, diharapkan untuk mengarahkan agar pihak sekolah bisa merekrut guru kontrak juga. Misalkan, kata dia, melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). “Sehingga dari sekolah juga ada pegangan untuk menerima guru kontrak, sehingga bisa membantu Pemerintah menutup kekurangan guru,” jelasnya.

Terkait penerimaan guru kontrak, beliau sangat mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kaum guru dengan adanya program tersebut. Dia mengharapkan, penerimaan tersebut dapat transparan dengan semua guru. “Disisi lain, perlu juga ada perhatian lebih untuk guru-guru kontrak yang lama, yang sudah belasan tahun mengabdikan,”. (Dok. KIP)

“ ada lebih dari 1000an tenaga guru yang dibutuhkan ”

“ PERLU JUGA ADA PERHATIAN LEBIH UNTUK GURU-GURU KONTRAK YANG LAMA ”



## BADAU DAN BATANG LUPAR TARGET PENDAMPINGAN IPDN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Lembaga Pengabdian Masyarakat Perbatasan. Lembaga tersebut akan memfokuskan kegiatan di Badau dan Batang Lupar. “Kami telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan di kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ini targetnya di Badau dan Batang Lupar,” kata Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, saat sosialisasi pembukaan kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan di Aula Setda Kapuas Hulu, Rabu (5/4).

Beliau mengatakan, IPDN sekarang ini harus turun ke daerah perbatasan dan pulau terluar serta daerah terpencil untuk mensukseskan program pemerintah sesuai Nawacita Presiden Indonesia, Joko Widodo. Oleh sebab itu IPDN sudah masuk di seluruh perbatasan termasuk Kapuas Hulu. “Program negara adalah membangun dari daerah terdepan, seperti Kapuas Hulu ini adalah serambi negara, jadi kami ada disini,” tuturnya.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata juga menuturkan, institusinya akan mengirimkan Praja (mahasiswa) ke Badau dan Batang Lupar. Para Praja tersebut, kata Suradinata, akan membantu berbagai aspek pembangunan pemerintah kecamatan dan desa, serta melakukan reset.

“Saya akan kirim mahasiswa ke perbatasan di sini. Kami akan berusaha membantupembangunan perbatasan, termasuk membangun rumah tidak layak huni, jadikan layak huni. Kami akan cari rumah tersebut, bangun, dan setelah selesai diberikan ke masyarakat yang bersangkutan,” paparnya “Kami juga akan masuk ke monografi desa, jadi monografi itu akan kami lengkapi dan ditinggalkan ke pihak kecamatan terkait,”.

**“ PROGRAM NEGARA ADALAH  
MEMBANGUN DARI DAERAH  
TERDEPAN, SEPERTI KAPUAS HULU ”**

Menurut Gubernur IPDN tersebut, Pemerintahan sekarang ini dihadapkan dengan kondisi yang kompleks. Seperti kabupaten Kapuas Hulu yang juga mengedepankan konsep konservasi. Dari konsep konservasi itu tata kelola ruang memang perlu diperhatikan. Kalau tidak secepatnya di tanggulangi dan tidak dikelola dengan benar akan berakibat tidak baik. “Kalau bumi dikelola tidak baik, bumi yang melibas kita, lewat bencana alam,” tuturnya.

Untuk memperbaiki ini, inovasi adalah ujung tombak. Sebab itu perlu pendampingan, pengkajian secara tepat. “Semoga karya kami nanti memberi manfaat untuk masyarakat Kapuas Hulu,” ungkap pimpinan institusi yang didirikan Presiden Soekarno pada 17 maret 1976 di Malang ini.

Dengan adanya peran pendampingan IPDN pada masyarakat perbatasan, Asisten III Setda Kapuas Hulu, H. M Yusuf mengatakan, Kapuas Hulu menjadi kabupaten konservasi dengan adanya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Dua taman nasional ini juga salah satu taman nasional terbesar di Kalbar. “Dengan sempitnya ruang gerak dari konservasi ini hendaknya ada inovasi usulan untuk pembangunan yang lebih baik dari IPDN,” tuturnya saat menyampaikan sambutan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH.

Dipaparkan Asisten III, Kapuas Hulu memang salah satu kabupaten perbatasan dengan total 23 kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk seluruhnya ada 236.888 jiwa, dengan mata pencaharian petani padi, pekebun karet dan nelayan. “Dari jumlah kecamatan yang ada di Kapuas Hulu, ada 6 kecamatan lini satu yaitu Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau dan Puring Kencana,” ucapnya.

Beliau juga menambahkan, Indonesia saat ini menjadikan perbatasan sebagai beranda depan yang harus dibangun. Ini tentunya membutuhkan kebijakan khusus berupa keberpihakan pembangunan yang lebih besar. “Tapi kami melihat keberpihakan itu sudah nyata dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi ke kecamatan Badau, Kapuas Hulu tanggal 16 maret lalu,” tutupnya. (Dok. KIP)





## BUPATI AJAK MASYARAKAT DUKUNG TMMD (TENTARA MANUNGAL MASUK DESA)

Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad (AM) Nasir membuka langsung kegiatan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) reguler ke-98 di Lapangan Bola Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Rabu (5/4). Dalam program TMMD tersebut ada kegiatan fisik pembukaan jalan sepanjang 10,5 km dengan lebar 8 meter, serta ada kegiatan non fisik berupa penyuluhan narkoba, bela negara, kesehatan dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya. "Saya minta seluruh lapisan masyarakat, untuk selalu mendukung serta mensukseskan kegiatan TMMD ini sebaik mungkin, baik kegiatan fisik maupun non fisik," ujar beliau.

Menurut Bupati Kapuas Hulu, TMMD adalah program yang tepat dan strategis dalam kondisi pembangunan saat ini. Peralannya, kata dia, lewat TMMD dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan. "TMMD juga mewujudkan semangat juang dan gotong-royong bagi masyarakat, untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, demi menjaga keutuhan NKRI," tuturnya.

Bupati Kapuas Hulu menilai TMMD merupakan wujud kepedulian TNI, supaya tercipta kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. TMMD dilaksanakan secara terpadu dan direncanakan dengan melibatkan semua pihak, disisi lain kegiatan ini juga sudah dikoordinasikan dengan sejumlah instansi terkait. "Harapan saya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan," ungkapnya.

**“ TMMD juga mewujudkan semangat  
juang dan gotong-royong bagi masyarakat,  
untuk terciptanya kesejahteraan  
masyarakat, demi menjaga keutuhan  
NKRI ”**

Hadir dalam pembukaan TMMD itu Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf M. Ibnu Subroto, Camat Bunut Hulu, OPD Kapuas Hulu, perwakilan Kejari Putussibau, Pengadilan Negeri Putussibau serta aparat desa.

Dandim 1206/Putussibau, Letkol Inf M. Ibnu Subroto, menuturkan, dalam TMMD di kecamatan Bunut Hulu ada program fisik dan non fisik. Untuk fisik ada pembukaan jalan dari Desa Nanga Suruk menuju dusun Muncin, Desa Riam Piyang. "Panjang sekitar 10,5 Kilometer lebarnya 8 Meter," tuturnya.

Usulan pembuatan jalan tersebut, menurut Dandim 1206 adalah usulan masyarakat, sebab akses darat dari kedua desa tersebut cukup jauh sekitar 20 Km sampai 25 Km. Oleh sebab itu, dalam TMMD dibuat jalan pintas, supaya lebih dekat. "Pengerjaan ini akan melibatkan sekitar 150 orang, dari TNI-Polri, Pemda dibantu masyarakat," paparnya. **(Dok. KIP)**





## DATA PETANIAN HARUS TERSINGKRONKAN DAN VALID



Asisten Administrasi dan Umum, H. M Yusuf menghadiri pertemuan teknis penyuluh pertanian, tingkat Kabupaten Kapuas Hulu di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Rabu (5/4).

Dalam kesempatan itu Bapak H.M Yusuf membacakan sambutan tertulis Bupati Kapuas Hulu AM. Nasir, S.H pada seluruh penyuluh pertanian di Bumi Uncak Kapuas. “Sinkronkan database pertanian yang benar – benar akurat dan valid, guna memberikan data dan informasi secara komprehensif kepada publik,” paparnya.

Asisten Administrasi dan Umum juga mengajak penyuluh pertanian yang ada untuk komitmen dalam membangun pertanian secara utuh, fokus dan prioritas sesuai kondisi potensi daerah. Selain itu, program yang disusun untuk para petani harus terorganisir dengan baik dan disesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. “Kita harus sinergikan program pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.

Terkait pertemuan penyuluh pertanian ini, Bapak M. Yusuf beranggapan itu adalah ajang penyampaian program kegiatan, arah kebijakan, serta strategi pencapaian pembangunan pertanian. “Artinya peran dan fungsi penyuluh pertanian sangat strategis, karena berusaha memperbaiki hajat hidup petani,” imbunya.

**“ KITA HARUS SINERGIKAN  
PROGRAM PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAN  
PUSAT ”**

**“ MEMBANGUN BIDANG  
PERTANIAN BUTUH  
KOMITMEN BERSAMA,  
TERMASUK PERAN PARA  
PENYULUH ”**

Sementara itu, Kabid Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Sunarto mengatakan bahwa membangun bidang pertanian butuh komitmen bersama, termasuk peran para penyuluh. “Kita punya potensi lahan pertanian, petani ada kemudian teknologi sudah mulai diterapkan. Masing – masing kecamatan juga ada mantri tani, kemudian dukung bantuan mekanisasi dari pusat, hanya memang ada tantangan,” tuturnya.

Tantangan yang Kabid Pangan dan Holtikultura maksudkan adalah merubah pola pikir masyarakat petani di daerah yang belum terlalu fokus mengelola bidang tanaman pangan untuk dijadikan nilai tambah dalam menopang perekonomian keluarga. “Bagaimana kita menambah petani kebun memiliki skill sehingga menjadi petani yang produktif. Namun saya yakin kedepan ini bisa, hanya butuh waktu. Kemudian punya etos kerja,” katanya.

Bapak Sunarto juga optimis Kapuas Hulu bisa bersaing dengan daerah lain dalam bidang pertanian, terutama usaha peningkatan produksi baik padi, jagung, ubi kayu dan tanaman pangan lainnya. “Kita perlu kerja keras dan kebersamaan, baik petugas PPL dan petani selaku pelaksana,” tutup Kabid Pangan dan Holtikultura tersebut. **(Dok.KIP)**



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H. memberi arahan dalam pembekalan purna tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu yang memasuki batas usia pensiun tahun 2018, di Aula Bank Kalbar Putussibau, Kamis (6/4) pagi. Pada kesempatan itu, Bupati mengingatkan pada calon pensiunan yang berprofesi sebagai guru dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menyelesaikan administrasi yang ada.

"Terkait guru dan lainnya, kalau ada yang masih berkaitan dengan keuangan harap diselesaikan terlebih dahulu. Sebab ada pertanggungjawaban BOS. Ini butuh diselesaikan untuk laporan ke pemerintah. Jangan sampai pensiun sudah tenang kena persoalan hukum," papar beliau dihadapan 181 orang calon pensiunan PNS Kapuas Hulu tahun 2018. Masalah pensiun sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. "Proses penanganan pensiun harus bersinergi dengan beberapa instansi. Ini perlu birokrasi yang panjang, jadi perlu dipahami oleh para pensiunan," tuturnya.

Bupati mengatakan sumbangsih pemikiran dari para pensiunan tetap dibutuhkan untuk pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya. "Karya para purna tugas di masyarakat sangat diharapkan. Kita perlu berkompetisi dengan kabupaten lain. Saya minta pensiunan tetaplah mengabdikan di masyarakat," ungkapnya.

Masa pensiun, menurut beliau, bukanlah akhir masa karya. Masih banyak yang diberikan untuk kontribusi pembangunan. "Apalagi pensiunan akan terjun langsung ke lingkungan masyarakat," terangnya.

Tak luput, Bupati Kapuas Hulu mengapresiasi, pengabdian para pensiunan di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Ia mengharapkan, kegiatan pembekalan purna tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kapuas Hulu dapat jadi motivasi bagi yang memasuki purna tugas. "Semoga masa pensiun dapat dinikmati dengan bahagia, terimakasih banyak atas pengabdian pada masyarakat." tutupnya.

Untuk tahun 2018, pensiunan PNS Kapuas Hulu sekitar 181 orang. Dari jumlah itu yang dominan adalah guru dengan jumlah pensiunan 91 orang, sisanya adalah pensiunan struktural dan medis. (Dok.KIP)

**“ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS ”**



## DINAS LH, PERA DAN KAPERKIM DATA RUMAH TAK LAYAK HUNI

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pera dan Kaperkim) Kabupaten Kapuas Hulu mulai mendata posisi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Data tersebut untuk kepentingan penyaluran program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah.

Sekertaris Dinas Pera dan Kaperkim Kapuas Hulu, Ir. H. M. Sayuti menuturkan, terkait Rumah Tak Layak Huni (RTLH) memang sudah menjadi ranah di dinasnyanya. Untuk triwulan pertama tahun 2017, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan terhadap Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang ada di Bumi Uncak Kapuas. “Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan memang dari bidang perumahan rakyat, mereka sudah mendata stimulan tidak layak huni untuk memetakan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kapuas Hulu,” paparnya, Kamis (6/4).

Bapak Sayuti mengatakan, belum ada penetapan angka Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tersebut oleh pihaknya. Sebab proses yang berjalan masih pendataan. “Kami mulai bergerak di Rumah Tak Layak Huni (RTLH) karena itu penting, untuk mengarahkan bantuan Pemerintah untuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tersebut,” ujarnya.

“Sudah Mulai Melakukan  
Pendataan Terhadap Rumah  
Tak Layak Huni ”

“ PEKERJAAN KAMI  
MENGACU PADA  
PERBUP KAPUAS  
HULU NOMOR 53  
TAHUN 2015 ”

Bapak Ir. H. M. Sayuti mengungkapkan, pada Dinasnya ada tiga bidang pekerjaan. Tiga bidang tersebut diantaranya, bidang tatalingkungan yang bekerja untuk menangani amdal dan penegakan hukum peti termasuk karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Lalu ada bidang pemerliharaan lingkungan hidup yang akan memantau segala hal tentang lingkungan, persampahan serta rehabilitasi lingkungan hidup. Terakhir bidang pera dan permukiman, yang menangani Rumah Tak Layak Huni (RTLH), termasuk untuk perumahan BTN. “Pekerjaan kami mengacu pada Perbup Kapuas Hulu Nomor 53 tahun 2015,” ujarnya. (Dok. KIP)



## LIMA SMA DI PUTUSSIBAU LAKSANAKAN UNBK



Lima Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Putussibau melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (10/4) pagi. Sementara itu, untuk SMA ditingkat kecamatan masih menerapkan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Sekda Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri bersama Kabagnya serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Petrus Kusnadi, meninjau empat dari lima sekolah penyelenggaraan UNBK. Dari hasil peninjauan tersebut pelaksanaan UNBK berjalan lancar. "Hasil peninjauan pelaksanaan UNBK, kami tidak menemukan ada kendala, siswanya hadir, sinyal internet dan listrik tidak ada kendala," ujarnya Sekda disela kegiatan peninjauan.

Hanya saja, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, langkah evaluasi harus juga dilakukan dari pihak sekolah. Pihak sekolah perlu melihat volume peserta UN, kalau bertambah maka perangkat juga mesti bertambah. "Karena dari tinjauan ini saya dapat informasi bahwa untuk perangkat komputer banyak juga yang dibantu dari pihak komite, karena pihak sekolah belum mampu menyiapkan sesuai jumlah yang ada," tuturnya "Terkait kekurangan perangkat komputer tersebut, perlu juga jadi perhatian dinas terkait di Pemerintahan Provinsi Kalbar,".

Kepala Disdikbud Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, menyatakan, pelaksanaan UNBK dan UNKP SMA/SMK memang masih melibatkan dinas. Selain memantau pihaknya juga membantu agar pelaksanaan UN lancar. "Sekarang kita tidak lagi berbicara ini tugas siapa, tapi apa yang bisa kita kerjasama, kita kerjasamakan. Apalagi ini anak-anak kita yang harus sukses dalam pendidikannya," tegas Bapak Petrus Kusnadi.

Untuk UNBK dan UNKP kali ini, kata Kadisdikbud adalah setingkat SMA. Pelaksanaannya sampai tanggal 13 April. Kalau SMK sudah beberapa hari lalu dilaksanakan. "UNBK setingkat SMA hanya dilaksanakan SMAN 1 Putussibau, SMAN 2 Putussibau, SMA Karya Budi, SMA Setia dan Madrasah Aliyah. Sedangkan SMA di kecamatan lain menggunakan sistem UNKP," paparnya.

Terkait UNKP dari tingkat kecamatan, Bapak Petrus Kusnadi, hingga saat ini informasinya berjalan lancar. Naskah UNKP tersebut sudah terdistribusi sejak dua minggu yang lalu dan langsung diamankan di Polsek-Polsek. "Kami juga berterimakasih kepada kepolisian yang sudah mengamankan soal UNKP di kecamatan-kecamatan, semoga saja kebocoran-kebocoran soal itu tidak terjadi," ujarnya.

Bapak Petrus Kusnadi juga menjelaskan, belum ada informasi terkait naskah UNKP yang rusak. "Naskah itu sudah dicek kemaren bersama pihak kepolisian, bahkan ada tim khusus juga yang memeriksanya. Sampai sekarang belum ada info kerusakan," tutupnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Putussibau, Bapak M. Djuanudin, mengatakan, jumlah siswanya yang mengikuti UNBK sebanyak 169 orang, sementara ada 3 orang siswa lainnya yang berhenti dan tidak ikut UN. UNBK itu sendiri dilakukan dalam tiga sesi, sesi pertama dari Pukul 07.30-9.30 wib, sesi kedua Pukul 10.30 -12.30 wib dan sesi ketiga 14.00- 16.00 wib.

**" Jumlah komputer yang tersedia untuk pelaksanaan UNBK sebanyak 65 unit sudah termasuk cadangan, komputer tersebut banyak dibantu dari pihak komite "**

Bapak Djuanudin menilai, siswanya dapat menyesuaikan diri dengan pola UNBK, sebab sebelumnya sudah dilakukan simulasi UNBK sebanyak dua kali. "Terkait pelaksanaan UNBK selama empat hari, dimana satu hari satu mata pelajaran. Untuk mata pelajaran dihari pertama UNBK ini adalah Bahasa Indonesia, selanjutnya ada Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran pilihan masing-masing siswa sesuai jurusannya IPA atau IPS," paparnya. **(Dok.KIP)**



# DAFTAR

## NAMA-NAMA OPD KABUPATEN KAPUAS HULU

**1. SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Antasari No. 2 Putussibau / Telp. (0567) 21003-21252-21402, Fax (0567) 21096

**2. SEKRETARIAT DPRD**

Alamat : Jl. Antasari No. 1 Putussibau

**3. INSPEKTORAT**

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Putussibau / Telp. (0567) 21133 - 21552

**4. BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 02 Putussibau / Telp. (0567) 21682

**5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 22 A Putussibau / Telp. (0567) 21071

**6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 5 Putussibau / Telp. (0567) 21 21027, Fax (0567) 21 21027

**7. DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Alamat : Jalan Lingkar Mupa Trasmigrasi Desa Pala Pulau Putussibau

**8. DINAS PENATAAN RUANG DAN DAN CIPTA KARYA**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 12 Putussibau / Telp. (0567) 21174

**9. DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 27 Putussibau / Telp. (0567) 21009 Fax. (0567) 21666

**10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 10 Putussibau / Telp. (0567) 21092

**11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Alamat : Jl. K.S. Tubun No. 108 Putussibau / Telp. (0567) 22790-22791 Fax (0567) 22790

**12. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Alamat : Jl. Pendidikan No. 03 A Putussibau / Telp. (0567) 21051

**13. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRASMIGRASI**

Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 2 Putussibau / Telp. (0567) 21205, Fax (0567) 21205

**14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 02 Putussibau / Telp. (0567) 21089

**15. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 20 Putussibau / Telp. (0567) 21049, Fax (0567) 21049

**16. DINAS PERIKANAN**

Alamat : Jl. Antasari No.6 Putussibau / Telp./Fax (0567) 21644

**17. DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 5 Putussibau / Telp. (0567) 21047

**18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Alamat : Jl. Antasari No. 8 Putussibau / Telp (0567) 21006

**19. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Komyos Sudarso No. 122 Putussibau

**20. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Jl. Merdeka No. 06 Putussibau / Telp. (0567) 21131

**21. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Kom.Yos Sudarso No. 22 Putussibau / Telp. (0567) 21942

**22. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Antasari No. 15 Putussibau / Telp. (0567) 21022, Fax. (0567) 21022

**23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Putussibau / Telp. (0567) 21485

**24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Danau Luar No. 1 Putussibau



# **DAFTAR NAMA-NAMA INSTANSI VERTIKAL**

## **INSTANSI VERTIKAL**

### **KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. Kom. Yos Sudarso No. 115 / Telp. (0567) 21033 Fax. (0567) 21943

### **PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 10 Putussibau / Telp. (0567) 21087 Faxes. (0567) 22004

### **IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU**

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 Putussibau

### **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. Antasari No.13 Putussibau 78711 Telp. 0567-21088 Fax. 0567-22041

### **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

#### **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. WR. Supratman No. 4 Putussibau / Telp. (0567) 21173

### **KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU**

Alamat : D.I. Panjaitan No.05 Putussibau

### **PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU**

Alamat : Jl. Antasari No.3 Putussibau / Telp. (0567) 21015-21235

### **BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

#### **STASIUN METEOROLOGI PANGSUMA KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. Adi Sucipto Putussibau

### **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

#### **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

#### **RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PUTUSSIBAU**

Alamat : Jl. Penjara No. 47 Putussibau / Telp. (0567) 21294

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,  
BERDAYA SAING DAN HARMONIS ”**





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

**ALAMAT :  
JALAN ANTASARI NO. 8 TELP. (0567) 21006  
PUTUSSIBAU**

*Website : [www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id) / Email: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)*